

BAB III

STRUKTUR POLITIK INDONESIA TAHUN 1970-2006

III.1. Pemerintahan Soeharto

Pilar Kekuatan Orba

Salah satu ciri menonjol—sejak awal—Orde Baru adalah mengandalkan tiga kekuatan politik demi mensukseskan tujuannya, yakni masing-masing: (1) ABRI; (2) Teknokrasi; dan (3) Golongan Karya (Golkar). ABRI merupakan institusi penyangga Orde Baru, sekaligus mesin yang efektif untuk menerobos basis-basis 'kekuasaan sipil'. Doktrin dwifungsi ABRI—ABRI memiliki fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (hankam) dan politik—merupakan dasar normatif yang dijadikan pembenaran bagi ABRI untuk berkorporasi di 'wilayah' sipil. Kehadiran kaum teknokrat semasa Orde Baru, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, mengingat perannya yang juga dominan dalam menata infrastruktur pembangunan di Indonesia. Inilah yang menjadi ciri Orde Baru, peran militer yang dominan, sebagai penjamin stabilitas politik, dan teknokrat yang terampil dalam menata ekonomi nasional. Politik Orde Baru nyaris identik dengan politik Golkar, namun bukan Golkar yang menentukan segala sesuatunya, melainkan Dewan Pembinaanya, yakni Presiden Soeharto.¹¹⁴

William Liddle melihat bangunan politik Orde Baru itu sebagai sebuah piramida, dimana puncak kekuatan dan kekuasaan di dalamnya didominasi presiden, di level bawahnya militer, dan birokrasi. Negara, memiliki kekuasaan

¹¹⁴ Urbaningrum, Anas, *Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 35.

yang amat besar terhadap masyarakatnya dalam pola-pola kooptasi dan represi.¹¹⁵ Dalam format politik Orde Baru, kita ketahui bahwa sejak 1968 sampai pertengahan 1980-an, pemerintahan Presiden Soeharto memelihara koalisi yang sangat baik antara kekuatan kalangan abangan, kecuali kalangan Soekarnoïs, dan kalangan Kristen/Katolik. Sementara itu, Islam berada dalam posisi pinggiran, bahkan menjadi kekuatan di luar sistem. Golkar yang merupakan mesin politik yang sangat dominan pada waktu itu diwarnai oleh kerja sama yang harmonis antara kekuatan abangan dan Kristen/Katolik. Sementara, Islam tidak mendapat tempat..¹¹⁶

Beberapa karakteristik utama dari pemerintah Indonesia Orde Baru menurut Afan Gafar adalah :

1. Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan
2. Rendahnya kesetaraan di antara Lembaga Tinggi Negara
3. Rekrutmen politik yang tertutup
4. Birokrasi sebagai Instrumen kekuasaan
5. Kebijakan politik yang tidak transparan
6. Sentralisasi
7. Implementasi HAM yang masih rendah
8. Sistem peradilan yang tidak independen.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 36-37.

¹¹⁶ Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan ketiga, 2002, hal. 132-133.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 150

De-Aliranisasi (Asas Tunggal)

Format politik Orde Baru memperlihatkan kenyataan yang sangat menarik yaitu terjadinya proses de-aliranisasi yang dilakukan pemerintah dengan ditopang ABRI. Proses de-aliranisasi itu dilakukan dengan berbagai macam cara. *Pertama*, dengan melakukan depolitisasi massa secara sistematis. Depolitisasi tersebut dilakukan dengan melalui sejumlah langkah kebijakan, misalnya : prinsip monoloyalitas bagi semua pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara, dan dibentuknya sebuah organisasi serikat untuk semua pegawai pemerintah, yaitu Korps Pegawai Negeri (Korpri). Dengan demikian pegawai pemerintah tidak terkotak-kotak ke dalam aliran ideologi yang mengikuti ideologi partai-partai politik yang ada pada waktu itu.¹¹⁸

Dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1982 di hadapan DPR, Presiden Soeharto untuk pertama kalinya mengemukakan gagasannya untuk menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi seluruh kekuatan organisasi social dan politik di Indonesia.¹¹⁹

Penerapan kebijakan unifikasi ideologi ini mengakibatkan timbulnya penolakan-penolakan yang timbul dari berbagai organisasi Islam. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) misalnya, terjadi perdebatan sengit antara kelompok yang menolak dengan yang bersikap akomodatif terhadap kebijakan ini yang mencapai klimaks nya pada kongres XVI. Kongres akhirnya dimenangkan oleh kubu pro asas tunggal. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal dengan terpecahnya HMI menjadi dua, yaitu HMI yang diakui Negara yang menerima asas

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 131

¹¹⁹ Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hal. 160

tunggal dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi yang tetap bersikukuh menolak asas tunggal.¹²⁰

Penolakan yang serupa juga dilakukan oleh PII (Pelajar Islam Indonesia) yang tetap bersikukuh mencantumkan Islam sebagai azas hingga batas akhir pendaftaran kembali orpol ormas pada 17 Juli 1987 yang berarti memilih membubarkan diri.¹²¹

Secara umum, rencana pemberlakuan azas tunggal Pancasila telah meningkatkan suhu politik nasional ketika itu. Pokok keberatan mereka terhadap azas tunggal Pancasila umumnya sangat khawatir penunggalan azas itu menjadikan negara Indonesia sekuler, yang berarti semakin memarginalkan posisi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, banyak kalangan masyarakat muslim mencurigai penerapan Pancasila sebagai azas tunggal bagi kekuatan sosial politik sebagai sarana untuk melakukan *deislamisasi*.¹²²

Proses penggerusan ideologi Islam terus dilakukan oleh Orde Baru. Upaya selanjutnya dilakukan melalui SU MPR 1978 dengan mengajukan draft GBHN yang di dalamnya mensejajarkan status aliran kepercayaan dengan agama-agama yang diakui Negara. Hal ini secara *implicit* memberikan pengakuan kesejajaran eksistensi agama dan aliran kepercayaan. Pengakuan secara tersirat aliran agama setara dengan agama sama saja menyusutkan bobot politik kekuatan Islam, sebab dengan demikian pemimpin-pemimpin Islam tidak lagi bisa melakukan klaim kelompok abangan (Islam nominal) itu sebagai bagian integral dari umat Islam Indonesia. Hal lain yang juga diperdebatkan dalam SU MPR 1978 adalah tentang

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 163

¹²¹ *Ibid.*, hal. 163

¹²² *Ibid.*, hal. 163-164.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dalam bahasa Martin van Bruinessen dikatakan sebagai program indoktrinasi ideologi Negara, Pancasila (menurut penafsiran Orde Baru) secara massal. FPP merasa keberatan dengan rancangan ini karena dikhawatirkan konsep tersebut malah justru mengaburkan kemurnian Pancasila. Juru bicara FPP, Imam Sofyan, menyatakan bahwa penuangan P4 dalam Tap MPR akan menimbulkan masalah bagi generasi penerus di kemudian hari apakah akan memilih pedomannya atau Pancasilanya sendiri, mengingat pencantuman P4 dalam Tap.MPR berarti pula P-4 akan mempunyai kekuatan sebagai salah satu sumber hukum.¹²³

Menciptakan *Floating Mass*

Langkah stabilisasi kekuatan Orba berikutnya yaitu dengan mencipkakan *floating mass* atau massa mengambang. Artinya, individu-individu tidak memiliki ikatan tertentu dengan partai politik, kecuali pada saat Pemilihan umum. Hal ini dilakukan dengan mengizinkan partai politik hadir hanya pada tingkat kabupaten, yang merupakan sebuah distrik pemilihan. Sementara, di kecamatan, hanya ada komisariss partai, dan di desa tidak diperkenankan hadir partai politik. Alasan yang dikemukakan pada dasarnya adalah, jangan sampai masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, terkotak-kotak ke dalam ideologi dan terombang-ambing oleh permainan partai politik yang ada. Tetapi, dalam kenyataannya, kebijaksanaan ini hanya diberlakukan buat partai politik, bukan partai pemerintah. Golkar dapat dengan leluasa melakukan aktivitas dan rekrutmen sampai ke tingkat yang paling

¹²³ *Ibid.*, hal. 112-114

bawah, melalui jaringan birokrasi pemerintahan desa. Aparat pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke desa, merupakan mesin politik yang sangat efisien dan efektif dalam memobilisasi dukungan buat Golkar dalam setiap Pemilihan Umum Orde Baru. Trauma pengalaman pada pasca-kemerdekaan membuat partai politik dipersepsikan sebagai biang keladi dari semua instabilitas politik. Akibatnya, partai-partai politik non-pemerintah dilemahkan basis sosialnya, sementara partai yang mendukung pemerintah, Golkar, dijadikan partai yang hegemonik.¹²⁴

Pemapanan Golkar dilakukan melalui pemilihan umum yang dicirikan oleh adanya peran birokrasi dan militer yang besar bagi kemenangan Golkar. Birokrasi selain bertindak sebagai penyelenggara pemilu juga sebagai kekuatan politik yang tidak netral. Tentu aja, keuntungan seperti ini tidak diperoleh oleh dua kontestan pemilu lainnya yakni PPP dan PDI sehingga sangat menguntungkan Golkar. Pemapanan Golkar terus berlanjut antara lain dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 1970 pada 11 Februari 1970. Undang-undang ini memiliki implikasi sangat luas karena mengkondisikan tuntutan kesetiaan pegawai negeri untuk hanya menyalurkan aspirasi politik mereka melalui Golkar. Kebijakan inilah yang kemudian dikenal sebagai kebijakan monoloyalitas. Kebijakan lain yang menguntungkan partai Golkar adalah UU No. 3 Tahun 1975 tentang massa mengambang (*floating mass*) yang membatasi gerak partai-partai politik non Golkar hanya sampai tingkat kecamatan, sementara Golkar diidentifikasi sebagai non partai.¹²⁵

¹²⁴ Gaffar, *Op.cit.*, hal. 131-132

¹²⁵ Yusuf, Saifullah dan Salim, Fahrudin, *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi*, Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 2000, hal. 75-76.

Black Propaganda terhadap Kelompok Islam

Pada permulaan Orde Baru sampai pertengahan 1980-an, wajah Islam menjadi babak belur dan digambarkan sebagai ekstrem kanan yang selalu siap membentuk negara Islam dan menggantikan Pancasila dengan Islam sebagai ideologi atau dasar negara. Menjelang pemilihan umum 1982, gejala meningkatnya dukungan untuk PPP dengan tingkat kompetisi yang seimbang dan peluang untuk menjadi partai yang hegemonik menjadi terancam. Untuk melemahkan kekuatan politik Islam yang mulai tampak, pemerintah mencari jalan untuk mendiskreditkan Islam. Isu Komando Jihad dan segala macam yang bertalian dengan itu dimunculkan. rekayasa yang dilakukan untuk keperluan itu dimotori oleh Ali Murtopo dan pendukung-pendukungnya.¹²⁶

Beberapa minggu sebelum kampanya dimulai, Soedomo (Kopkamtib) mengumumkan adanya kelompok anti pemerintah, yaitu yang disebut sebagai "Komando Jihad". Meskipun Soedomo menyatakan gerakan itu tidak ada kaitannya dengan PPP, apara pemimpin politik santri merasa yakin pengungkapan isu oleh penguasa semacam itu semacam psywar bagi pendukung-pendukung PPP. Sebab dengantaktik semacam itu tersedia dalih bagi Kopkamtib untuk menangkap setiap politisi Islam yang dicurigai. Menurut David Jenkins, pengamat asing, nampak tidak bisa disangkal bahwa pemerintah, terutama Kopkamtibnya, bermaksud untuk memanfaatkan gerakan radikal "berjubah Islam" itu sebagai, " a desire to contain the PPP within very narrow limits" (isu untuk menekan PPP dalam batas-batas yang sangat sempit). Bentuk *black campaign* lainnya adalah

¹²⁶ Gaffar, *Op.cit.* hal.133

tuduhan terhadap PPP bahwa kampanyenya telah didanai oleh Lybia. Mashuri, menteri penerangan dalam cabinet Soeharto menghubungkan persoalan itu dengan kehadiran kapal selam asing di pantai selatan Jawa yang katanya juga mendrop senjata.¹²⁷

Tuduhan ini jelas sangat tidak berdasar. Kalaupun para pejabat pemerintah melihat maraknya kampanye PPP—padahal uang yang disediakan oleh Negara terbatas—itu karena dukungan dana dari para aktivisnya yang rela berkorban demi keberhasilan partainya. Hal ini tidak terjadi di PDI dan Golkar.

Kebijakan Kepartaian Orde Baru

Kebijakan pertama Orde Baru fusi partai politik sebagai langkah penyederhanaan. Usaha penyederhanaan ini sebenarnya ingin dilakukan sebelum pemilihan umum 1971, namun dalam kenyataan tidak dapat dituntaskan pada waktunya dan pemilihan umum 1971 diadakan dengan sembilan partai politik dan Golkar.¹²⁸

Meskipun demikian, pengelompokan partai tetap diteruskan dan pada tahun 1973 dapat dituntaskan. Jumlah partai politik yang sangat banyak diupayakan untuk mengelompokkan diri guna mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa partai politik kehilangan identitasnya. Pengelompokan ini mencakup tiga kelompok yaitu golongan nasional, golongan agama dan golongan karya. Empat partai Islam yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

¹²⁷ Aminudin. *Op.cit.* hal. 108-109

¹²⁸ Yusuf-Salim. *Op.cit.* hal. 73

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Selain itu dari lima partai yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 1977 baru diikuti oleh tiga orsospol tersebut, yaitu PPP, PDI dan Golkar. PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba difusikan menjadi satu partai Partai Demokrasi Indonesia pada 9 Maret 1970. Sementara Parmusi, NU, PSII dan Perti difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 13 Maret 1970. Dengan demikian proses penyederhanaan partai yang telah dimulai pada zaman demokrasi terpimpin, akhirnya terlaksana secara efektif pada zaman demokrasi Pancasila, yaitu tiga orsospol, ketiga-tiganya dengan asas yang sama.¹²⁹

Langkah berikut dalam menata sistem kepartaian adalah pencantuman Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal ini merupakan pelaksanaan dari gagasan Presiden Soeharto yang disampaikan dalam pidatonya di depan sidang paripurna DPR 16 Agustus 1982. Orde Baru juga melakukan politik hegemoni, di mana hanya ada satu partai yang selalu meraih suara mayoritas dalam pemilu, sementara partai lain hanya sebagai pendamping dan tidak memiliki peran-peran politik yang signifikan. Pemerintahan Orde Baru memerlukan partai politik dominant yang diharapkan mampu menjadi legitimasi dan perpanjangan tangan pemerintah. Partai tersebut adalah Golongan Karya.¹³⁰

¹²⁹ Yusuf-Salim, *Op.cit*, hal. 73

¹³⁰ *Ibid*, hal. 74

Rekayasa Tatahan Politik Orde Baru

Perlakuan rezim Orde Baru berbeda sekali terhadap orang-orang eks Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang jelas-jelas terlibat gerakan pemberontakan PRRI/Permesta dan tokoh-tokoh Murba yang pernah dinyatakan sebagai partai terlarang. Tokoh-tokoh PSI dan Murba pada awal orde baru segera diberi posisi-posisi politik yang strategis dalam penentuan kebijakan (*policy making*) oleh rezim Orde Baru. Faktor yang melatarbelakangi larangan rezim Orba terhadap berbagai upaya konsolidasi parpol Islam adalah : *pertama*, terdapat perasaan anti partai yang meluas di kalangan anggota inti koalisi Orba, terutama perwira AD dan kaum intelektual pembaharu. *Kedua*, orang-orang di lingkaran jenderal Soeharto pada kurun 1960-an dan 70-an banyak di dominasi tokoh-tokoh yang memiliki pandangan yang tidak simpatik dengan kelompok Islam.¹²⁷

Pada Bulan Mei 1967 Soeharto memberi tahu bahwa pemerintah tidak keberatan terhadap pembentukan partai yang basis massanya berasal dari organisasi-organisasi massa aliran Masyumi. Merespon hal ini, maka para tokoh Islam kemudian mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang diharapkan kalangan pendukung dan simpatisan bekas partai Bulan Bintang itu menjadi reinkarnasi dari Masyumi. Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Soeharto tidak mengizinkan masuknya tokoh-tokoh Masyumi ke dalam Parmusi padahal sebelumnya telah menjamin kebebasan peserta kongres memilih pemimpin. Pemerintah kemudian mengintervensi pengangkatan pemimpin Parmusi dengan menurunkan SK Presiden No. 70 tahun 1968 dengan H.

¹²⁷ Aminudin. *Op.cit*, hal. 86

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, sebagai pimpinan sementara hingga dilangsungkan kongres Parmusi. Untuk menjamin lumpuhnya parmusi, tak mengherankan bila pemerintah melalui tangan-tangan Opsusnya masih perlu memporak-porandakan susunan personalia pengurus untuk mendapatkan pimpinan yang benar-benar pro-pemerintah. Untuk inilah kemudian Orde Baru memunculkan John Naro sebagai boneka untuk membuat kekisruhan dengan membentuk badan eksekutif tandingan pada 17 Oktober 1970.¹²⁸

Intervensi Orde Baru juga terjadi saat umat Islam berencana membentuk sebuah forum bernama Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang didahului oleh seruan Jenderal Nasution dalam harian *Duta Masyarakat*, 15 Juni 1968 untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Islam.¹²⁹ Meskipun KUII tidak terkesan sebagai bentuk oposisi terhadap Negara—terlihat dari ketuanya, Jenderal Polisi Sutjipto yang tidak memiliki “cacat politik” sedikitpun terhadap Negara—namun demikian pada akhirnya pemerintah tetap tidak mengizinkan berdirinya KUII ini.

Langkah lain yang dilakukan oleh Orde Baru dalam mengokohkan dominasi politiknya adalah melalui rekayasa aturan main yang terkait dengan pemilu dan struktur keanggotaan parlemen. Di dalam UU Pemilu yang disahkan pada November 1960 tersebut sangat menguntungkan penguasa dengan adanya sejumlah orang yang dipilih dan ada juga yang diangkat di DPR/MPR. Hasil kompromi maksimum antara kekuatan-kekuatan politik di DPRGR menyangkut komposisi MPR/DPR dituangkan dalam pasal 10 UU No. 16 tahun 1969 yang

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 88

¹²⁹ *Ibid.*, hal.98

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

menyebutkan, “Anggota DPR berjumlah sebanyak 460 orang, 360 dipilih melalui Pemilu dan 100 orang diangkat.” Perincian dari 100 orang yang diangkat itu adalah : 75 orang dari ABRI dan 25 orang dari golongan fungsional non-ABRI.¹³⁰

Pada tahun 1969, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No.12 tahun 1969, yang dikenal dengan akronim Permen 12. Permen No. 12 itu secara tidak langsung mendorong anggota-anggota departemen untuk meninggalkan partai politik. Peraturan tersebut jelas merugikan partai politik, karena sebagian dari simpatisan mereka berada di birokrasi. Tak lama berselang, Menteri Dalam Negeri kemudian mengedarkan surat dan formulir yang mengharuskan pegawai negeri menjadi anggota Kokarmendagri—embrio Korpri—serta meninggalkan keanggotaannya di kepartaian dan keormasan. Keharusan monoloyalitas pegawai negeri kepada Golkar tersebut sama saja “menggembosi” partai-partai politik.¹³¹

Represi dan Intimidasi Politik

Selain menerapkan strategi massa mengambang, nampaknya Orde Baru juga melakukan langkah-langkah represif dalam bentuk intimidasi pada saat kampanye Pemilu. Intimidasi yang dilakukan oleh ABRI dan pemerintah ini dimaksudkan agar masyarakat memilih “partai Orde Baru”. Tekanan ini dilakukan langsung terhadap pemilih di desa-desa.¹³² Beberapa insiden kekerasan pun mewarnai Pemilu 1977. Pada masa kampanye Pemilu 1977 para jurkam PPP diancam, bahkan diserang secara fisik oleh kelompok-kelompok yang disponsori Golkar. Media massa melaporkan terjadinya penembakan terhadap dua aktivis

¹³⁰ *Ibid*, hal.91

¹³¹ *Ibid*, hal. 92

¹³² *Ibid*, hal. 94-95

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PPP di Situbondo, Jawa Timur. Intimidasi memaksa aktivis-aktivis PPP dan PDI di daerah-daerah untuk mencari perlindungan di kantor pusat; penculikan pemimpin Islam, kasus bunuh diri yang mengesankan adanya perencanaan dan penahanan beratus-ratus pemimpin dan aktivis partai (kecuali Golkar) banyak dilaporkan terjadi selama kampanye.¹³³

Korporatisme Negara

Strategi korporatisme secara umum merupakan suatu usaha melakukan reorganisasi institusional yang dirancang untuk membangun suatu mekanisme yang dapat menjamin proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan secara efektif, cepat dan efisien. Untuk menciptakan mekanisme seperti ini, salah satu strategi yang dikerjakan oleh rezim Orde Baru adalah mengendalikan perwakilan kepentingan dengan cara membuat lembaga legislatif menjadi lebih tanggap terhadap keinginan pemerintah dan memaksa kelompok-kelompok kepentingan yang ada untuk melebur ke dalam struktur korporatis yang dibangun oleh pemerintah.¹³⁴

Sasaran pertama korporatisasi ditujukan pada penggarapan strategi pengawasan sektor birokrasi dengan jalan membentuk Korp Karyawan Kementerian Dalam Negeri (kokarmendagri). Dengan didukung oleh peraturan pemerintah, perkumpulan ini mengembangkan monopoli perwakilan kepentingan korps pamong praja yang besar itu. Pembentukan organisasi korporatis itu terbukti efektif menetralsir pengaruh partai-partai non-pemerintah dalam tubuh birokrasi

¹³³ *Ibid.*, hal. 110

¹³⁴ Harindja, Denny B.C., *Birokrasi Nan Pongah Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, Yogyakarta: 1999, hal. 143.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan memobilisasi para pamong praja untuk menggunakan pengaruhnya bagi kemenangan Golkar dalam pemilu 1971.¹³⁵ Korporatisasi di jajaran birokrasi kemudian meluas ke seluruh sector birokrasi yang lain. Perluasan dari Kokarmendagri itu adalah Korps Pegawai Negeri (Korpri). Bukan hanya di sector birokrasi saja, korporatisasi kemudian menjalar kesektor lain seperti buru dengan membentuk SBSI pada tahun 1973 kemudian di sector bisnis dengan membentuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 1971, di sector pers dengan membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di sector pemuda dengan membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bahkan juga di sector agama dengan mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 21-27 Juli 1975..

Dua alasan normatif yang diajukan Soeharto mengenai perlunya pembentukan MUI adalah, *pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. *Kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan ulama

Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI itu jelas dan transparan. Campur tangan pemerintah dalam pembentukan MUI mulai dari seruan-seruan resmi, pelibatan birokrasi dalam proses penyusunan pengurus MUI dari pusat dan daerah, sampai pemberian fasilitas-fasilitas birokratis. Maka tidak heran timbul banyak kecurigaan dari tokoh-tokoh dan masyarakat Islam kalau nantinya MUI dijadikan sebagai alat untuk mengkooptasi masyarakat Muslim sekaligus sebagai alat legitimasi terhadap kepentingan Negara.

¹³⁵ Aminudin, *Op.cit.*, hal. 119

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kecurigaan itu akhirnya terbukti. Terutama pada satu setengah dekade pertama usia MUI, dalam proses pembuatan fatwa-fatwanya MUI mendapat pressure dari Negara untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah. Akibatnya, hubungan MUI dengan pemerintah terkadang tidak harmonis, karena dalam MUI sendiri terdapat elemen-elemen ulama-ulama independen yang memegang prinsip Islam dengan kuat.¹³⁶

Tetapi bagaimanapun juga, MUI tidak dapat dikatakan sebagai organisasi korporatis, agaknya MUI lebih tepat disebut sebagai organisasi quasi korporatis— seperti yang diistilahkan William Liddle. Sebab, perumusan fatwa yang merupakan tugas pokok MUI tidak seluruhnya seirama dengan kebijakan-kebijakan negara. Misalnya, fatwa masalah pengguguran kandungan, hokum vasektomi tubektomi, larangan kaum muslimin menghadiri natal.¹³⁷

Strategi Artikulasi Kelompok Islam

Bagaimana orang Islam berartikulasi dalam keadaan dimana partai politik memainkan peranan yang sangat terbatas (terutama rekrutmen untuk Pemilihan Umum), media massa sangat lemah, dan kebebasan untuk berartikulasi juga sangat terbatas? Ada beberapa pilihan untuk dilakukan. *Pertama*, melakukan akomodasi dengan sistem kekuasaan yang ada, seperti yang banyak dilakukan oleh kalangan alumni HMI yang bernaung dalam KAHMI. *Kedua*, memilih tetap bergabung dengan partai yang dianggap merepresentasikan Islam, seperti PPP. *Ketiga*, menjaga jarak sama sekali dengan sistem kekuasaan yang berlaku, bahkan

¹³⁶ *Ibid*, hal. 120-122

¹³⁷ *Ibid*, hal. 125

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan mengambil sikap kritis. *Keempat*, memilih sikap konfrontatif dengan pihak kekuasaan, seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok sempalan.¹³⁸

Berkembangnya Peran Kaum Terpelajar Islam.

Pada dasawarsa 1970-an kalangan kaum terpelajar Islam mulai terserap di berbagai posisi strategis. Mereka mulai terserap ke struktur pemerintahan dan perguruan tinggi sebagai dosen dalam patronase senior mereka. Ledakan kaum terdidik ini mendorong terjadinya mobilitas golongan muslim-santri, baik secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas horizontal ditandai dengan penyebaran profesi kaum santri di berbagai sektor, sedangkan mobilitas vertikal ditandai oleh meningkatnya peranan dari strata bawah atau menengah ke strata yang lebih tinggi, misalnya ke pemerintahan atau ke struktur lebih modern. Penyerapan besar-besaran kaum terdidik santri ke dalam badan-badan pemerintahan, lembaga akademis serta berbagai organisasi social budaya lainnya telah memberikan kesempatan-kesempatan strategis jauh lebih luas kepada mereka, yang selama dua dekade Orde Baru dan sebelumnya secara terbatas dinikmati oleh elemen non-santri.¹³⁹ Hal yang sama juga terjadi dalam bidang intelektual/kecendekiawanan. Sejak pertengahan decade 1970-an, secara gradual mantan aktivis-aktivis organisasi mahasiswa dan pelajar Islam mulai mendapatkan kesempatan mengechap pendidikan Barat di universitas-universitas Amerika dan Eropa.¹⁴⁰

Dampak dari pendidikan barat ini adalah adanya reorientasi politik ke arah yang lebih inklusif, kontekstual dan moderat. Reorientasi politik ini mendorong terjadinya saling pengertian (*mutual understanding*) yang bermuara pada

¹³⁸ Gaffar, *Op.cit.* hal. 135

¹³⁹ Aminudin, *Op.cit.* hal. 207

¹⁴⁰ *Ibid*, hal.210

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

timbulnya konvergensi antara Negara dan masyarakat politik Islam. Dengan konvergensi yang merupakan kesediaan untuk memberi dan menerima yang berakar pada kemantapan masing-masing pihak terhadap dirinya dan hilangnya kecurigaan atau kekhawatiran yang pernah muncul di antara mereka.¹⁴¹

Masa Akomodasi Politik Orde Baru terhadap Kekuatan Islam.

Sejak pertengahan 1980-an, ketika asas tunggal Pancasila merupakan sebuah konsensus bersama, sekalipun pada waktu itu menimbulkan kontroversi dengan sebagian kalangan Islam, gejala saling mengakomodasi antara pemerintah dengan Islam mulai tampak. Sejumlah langkah kebijaksanaan pemerintah dipersepsikan sebagai langkah kebijaksanaan yang tidak lagi negatif bagi umat Islam. Jilbab yang dahulunya dilarang bagi murid sekolah lanjutan, mulai diperlonggar. Presiden mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, yang menyediakan dana pembangunan masjid di seluruh Indonesia. Didirikannya Bank Muamalat sampai terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Desember 1990, yang didukung oleh kalangan birokrasi, dianggap oleh kalangan Islam sebagai isyarat kecenderungan akomodatifnya pihak pemerintah. Bersamaan dengan itu, jargon-jargon yang menyudutkan Islam sebagai ekstrem kanan, misalnya, sudah mulai berkurang pula gaungnya.¹⁴²

Namun demikian, kekuatan Islam belum berhasil sebagai faktor yang memainkan peranan yang menentukan dalam pembentukan kebijaksanaan politik di Indonesia. Memang dilihat dari banyaknya pejabat di pemerintahan,

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 213

¹⁴² Gaffar, *Op.cit.*, hal. 137

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

jawabannya barangkali positif. Tetapi, kebijaksanaan yang dikeluarkannya tidak berlandaskan visi Islam. Hal ini disebabkan, *pertama*, Presiden Soeharto masih memainkan peranan yang sangat menentukan dalam proses pembentukan kebijaksanaan publik di Indonesia. *Kedua*, konteks politik 1990-an berbeda dengan tahun 1970-an. Politik 1970-an adalah politik yang didominasi oleh pola interaksi kalangan elit, mekanisme politik pun tidak terbuka, karena proses kontrol yang dilakukan negara sangat dominan. Kebijakan mengenai Pemilu yang dilakukan Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, misalnya dengan mudah sampai ke masyarakat. Sementara, politik 1990-an sudah lebih terbuka dan transparan, sehingga setiap ada kebijaksanaan publik yang sensitif akan mendapat reaksi yang sangat tajam dari kalangan publik. Apalagi kehidupan media massa yang sudah lebih leluasa dibandingkan tahun 1970-an.¹⁴³

Peluang ini didahului oleh kemerosotan kubu Ali Murtopo yang selama ini menjadi kaki tangan Soeharto dalam mengokohkan kekuasaannya. Kemerosotan itu terkait dengan kesenjangan politik Ali Murtopo dengan Soeharto yang disebabkan oleh, *pertama*, pada decade 1970-an Ali Murtopo telah dapat mengerahkan sumber-sumber kekuasaannya sendiri yang dapat menggerogoti kedudukan Soeharto. *Kedua*, kenyataan yang mendasari krisis politik bulan Januari 1974 (Peristiwa Malari) adalah persaingan antara Ali Murtopo dengan Jenderal Soemitro.¹⁴⁴

Dengan merosotnya dominasi kelompok Ali Murtopo dalam tubuh Golkar dan pemerintahan, maka Soeharto kemudian mengganti orang kepercayaannya itu

¹⁴³ *Ibid.*, hal.139

¹⁴⁴ Aminudin, *Op.cit.*, hal. 181.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan Sudharmono. Dalam Munas Golkar III Sudharmono kemudian juga direkomendasikan oleh Soeharto untuk dipilih sebagai Ketua Umum periode 1983-1988.

Beberapa pengamat, sebagaimana disebutkan Leo Suryadinata, beranggapan bahwa Sudharmono dekat dengan faksi Islam di Golkar yang di faksi-faksi lain cenderung diasingkan. Dalam kepengurusan Sudharmono ini, Golkar banyak menampung “pembelotan” dari tokoh-tokoh muslim yang semula berada di barisan PPP. Selain mobilisasi massa NU ke Golkar, Ridwan Saidi, mantan tokoh HMI di PPP yang dikecewakan oleh Naro dalam pemilu 1987 juga menyatakan “pembelotannya” ke Golkar. Dalam SU MPR 1988 Golkar menunjuk Saiful Mujab mantan tokoh PPP, menjadi salah satu wakil Golkar di MPR, selain juga Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Majid yang menjadi Badan Pekerja MPR dari Fraksi Golkar.¹⁴⁵

Sudharmono akhirnya membuktikan kecermelangannya dengan membawa kemenangan bagi Golkar yang memperoleh lebih dari 70 % suara dalam pemilu 1987. Hal ini tentu saja menambah kepercayaan bagi Soeharto.

Dengan semakin meruncingnya konflik antara Soeharto dengan kelompok LB. Moerdani¹⁴⁶ maka langkah politik yang diperlukan Soeharto adalah mengakomodasi aspirasi riil kaum politik muslim, sekalipun. Apalagi kondisi subjektif dan objektif yang melingkupi akomodasi kekuatan politik Islam dalam

¹⁴⁵ *Ibid.* hal. 182

¹⁴⁶ LB. Moerdani adalah penerus patronase kelompok Ali Murtopo

Negara itu tidak mengkhawatirkan kelangsungan pembangunan ekonomi yang dirancang Soeharto.¹⁴⁷

Akomodasi Negara terhadap kaum muslimin memiliki spektrum luas, ada yang bersifat struktural, (legislatif), infrastruktural dan kultural. Yang *pertama*, berkaitan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para tokoh Islam untuk terintegrasi ke dalam Negara, baik melalui saluran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kasus menyolok akomodasi bersifat struktural ini adalah berkibarnya kelompok Islam di DPR/MPR-RI pada SU MPR 1993 yang dikenal dengan istilah DPR/MPR “*iji-royo-royo*”. Demikian halnya dalam penyusunan Kabinet VI ditandai dengan semakin meningkatnya menteri berlatar belakang Islam. Dan masih ada beberapa contoh yang lain.

Kedua, berhubungan dengan telah disahkannya sejumlah undang-undang yang mengakomodasi agenda aspirasi kaum muslimin. Termasuk dalam klasifikasi akomodasi legislative itu adalah disahkannya Undang-undang Pendidikan Nasional (UU PN) pada 1989; disahkannya Undang-undang Peradilan Agama (UU PA) pada 1989; kompilasi hukum Islam pada 1990; kebijakan baru jilbab pada 1991, dan kebijakan ditutupnya peredaran SDSB 1993.

Ketiga, bantuan Negara untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan kaum muslimin untuk menjalankan perintah agama. Disamping bantuan-bantuan yang dianggarkan resmi Negara (budgeting) untuk membantu sarana dan prasarana ibadah kaum muslimin. Presiden Soeharto secara pribadi memprakarsai pendirian Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP). YABMP yang

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 228

kegiatan utamanya untuk mendirikan tempat-tempat ibadah bagi kaum muslim hingga tahun 1994 sudah mendirikan 634 masjid tersebar di 206 Kabupaten dan Kotamadya.

Akomodasi infrastrukural negara terhadap kaum muslimin yang lebih fenomenal lagi adalah keterlibatannya membantu secara penuh berdirinya Bank yang mendasarkan operasinya pada Syari'at Islam, yang dinamakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Sedangkan akomodasi kultural negara terhadap umat Islam dengan menggunakan idiom-idiom Islam dalam pertemuan resmi negara seperti "Assalamu'alaikum". Akomodasi kultural yang kolosal bisa kita saksikan dari digelarnya Festival Istiqlal. Festival Istiqlal yang merupakan arena perhelatan budaya Islam bernilai milyaran rupiah itu panitianya langsung dikelola Menteri-menteri Kabinet atas persetujuan Presiden Soeharto.¹

Sikap akomodasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Islam juga terlihat saat Soeharto secara resmi mendukung kelahiran organisasi cendekiawan yang menggunakan symbol Islam yang dinamai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 7 Desember 199 di Malang. Fenomena ini menjadi sangat menarik, karena beberapa kali usaha mendirikan asosiasi intelektual muslim semacam ini tidak diizinkan oleh aparat keamanan.

Fenomena yang menimbulkan banyak pertanyaan ini setidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, melihat berdirinya ICMI dan akomodasi perpolitikan Islam lainnya dari perpektif kepentingan dan konflik elit semata. *Kedua*, mereka yang sangat mempercayai fenomena ICMI dan semakin

¹ *Ibid*, hal. 229-230

merapatnya kekuatan politik Islam dalam relasinya dengan Negara sebagai hanya dipengaruhi oleh perubahan social masyarakat Islam yang semakin menguat kelas menengahnya dan keberhasilan santrinisasi.²

Jatuhnya Soeharto dan Bergulirnya Reformasi 1998

Pada masa menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto yaitu tahun 1997 terdapat tiga fenomena primadona yang menurut Eep Saefulloh Fatah saling berhimpit dan terkait erat. *Pertama*, terjadi krisis legitimasi simbolik. *Kedua*, ada kenaikan tuntutan pertanggungjawaban public (*public accountability*). *Ketiga*, muncul agen-agen negosiasi baru bagi perubahan.³

Krisis legitimasi simbolik itu terjadi dalam bentuk perlawanan politik yang semakin kuat dan massif dalam wujud amuk massa, kerusuhan sosia, atau radikalisasi rakyat. Segmen pelaku perlawanan politik semacam itu telah makin meluas: massa kota dan desa, kalangan menengah dan bawah, isu-isu perlawanannya pun makin tersebar: ekonomi, politik, dan ideology. Kemampuan Negara untuk melacau krisis legitimasi simbolik sepanjang 1997 telah sangat dilemahkan oleh, *pertama*: terjadinya krisis mata uang, krisis moneter, dan akhirnya krisis ekonomi. Terus melorotnya nilai tukar rupiah atas dolar AS bahkan bias disebut sebagai puncak dari krisis legitimasi simbolik itu.

Kurs rupiah yang merosot terhadap dolar sempat terdepresiasi sampai 250% dari nilai tukar sebelum tahun 1997 membuat perekonomian Indonesia menjadi surut tajam. Krisis moneter ini ternyata menimbulkan dampak sangat

² *Ibid*, hal. 257

³ Fatah, Eep Saefulloh, *Bangsa Saya yang Menyebabkan Catatan tentang Kekuasaan yang Pongah*, PT. Renaja Rosdakarya Bandung, Bandung : 1998, hal. 209

serius terhadap perekonomian nasional seperti inflasi yang mencapai sekita dua digit, harga-harga membumbung tinggi dan banyak perusahaan gulung tikar. Dampak sosial yang segera nampak terlihat adalah meluasnya pengangguran akibat banyaknya dunia usaha yang bangkrut kemudian melakukan PHK missal. Ringkasnya, terjadi ledakan pengangguran pada 1998. Bila angka pengangguran terbuka pada 1996 dan 1997 tercatat sebesar 7,2 dan 9,3 % maka pada 1998 bisa mencapai 12 %.. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan pendapatan perkapita Indonesia yang pada 1996 mencapai US\$ 1.022 pada awal 1998 turun menjadi kurang dari US\$ 300.⁴

Dari balik krisis legitimasi simbolik yang muncul kemudian adalah tuntutan penegakan (kembali) prinsip pertanggungjawaban publik. Massa politik yang tadinya diam (*silent majority*) dalam lima atau tujuh tahun terakhir ternyata makin bernetamorfosis menjadi “publik”: kumpulan rakyat yang memiliki pemahaman dan kesadaran tertentu atas krisis-krisis empirik di tengah mereka. Di tahun 1997, kemunculan publik semacam itu menggejala sekalipun belum mengental dan masih perlu ditunggu konsistensinya.

Tahun 1997 juga memunculkan agen-agen negosiasi baru bagi perubahan. Ada dua nama yang layak disebut sebagai kekhasan steril 1997, yakni Mudrick Setiawan Malkan Singidu dan M. Amien Rais. Nudrick mempresentasikan diri sebagai agen negosiasi baru karena menjadikan organisasi politik formal—

⁴ Aminudin, *Op.cit*, hal. 356-357

partai—sebagai wahana gerakannya. Sedangkan Amin mempresentasikan sebagai agen yang kaya teologi pemberontakan.⁵

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah Soeharto melakukan negoisasi bantuan keuangan dengan IMF. Hasilnya adalah Indonesia memperoleh bantuan 23 milyar dollar AS. Namun konsekuensinya adalah diumumkannya likuidasi 16 bank bermasalah, disertai paket-paket kebijakan deregulasi, dalam rangka penyehatan perekonomian.⁶ Namun langkah-langkah di atas belum juga membawa perubahan yang signifikan.

Anjloknya harga minyak pada minggu ketiga Maret 1998 semakin menyusutkan sumber pendapatan Negara yang pada gilirannya memaksa Soeharto untu menaikkan harga BBM sekitar 70 % dan tariff listri 20 %. Keputusan pemerintah ini kemudian menjadi “bom waktu” yang menghasilkan ledakan ketidakpuasan di masyarakat. Kredibilitas Soeharto menuju titik nol saat berbagai kerusuhan dan demonstrasi terjadi meluas di berbagai penjuru tanah air.

Meningkatnya keresahan rakyat akibat lonjakan harga BBM pada Mei itu telah mendorong hamper seluruh kekuatan politik untuk mengambil garis oposisi dengan pemerintah sekaligus menjadi daya pompa gerakan Mahasiswa di kampus-kampus di Indonesia yang menuntut reformasi politik semenjak awal SU MPR Mei 1998.⁷ Rizal Ramli meyakini hal yang sama. Baginya adalah naif untuk mengharapkan ada perbaikan dan perubahan di Indonesia tanpa reformasi politik.

⁵ Fatah, *Op.cit*, hal. 212-213

⁶ Pareira, Andre H., *Pemerintah Bersih, Sudah Waktunya*, dalam *Opini Kompas*, Selasa, 15 Desember 1997.

⁷ Aminudin, *Op.cit*, hal.358-359

Reformasi yang dimaksudkannya adalah dalam pengertian yang luas, termasuk reformasi di bidang hukum dan administrasi.⁸

Rontoknya legitimasi politik Soeharto, semakin tampak dengan adanya gejala-gejala semakin besarnya tuntutan agar ia berhenti sebagai presiden. Setidaknya ada tiga peristiwa yang mampu mengkonfirmasi hal tersebut: *Pertama*, menderasnya aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat menuntut mundurnya Soeharto “sekarang juga”. Gerakan Mahasiswa di kampus-kampus di Indonesia yang menuntut reformasi politik mengakibatkan berkali-kali bentrokan keras antara mahasiswa dan militer yang mencapai puncaknya pada 12 Mei 1998 yang mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Tragedi ini kemudian memicu sentimen politik anti-Soeharto yang kian meluas di kalangan masyarakat dan beres-beres dengan munculnya berbagai aksi massa, mulai dari demonstrasi, perusakan toko-toko dan beberapa kantor pemerintahan, penjarahan dan pembakaran di kota-kota besar Indonesia.⁹ Di sisi lain, kelompok-kelompok politik anti Soeharto segera mengkonsolidasikan kekuatannya melalui Kelompok Pekerja Indonesia (KPI) dan Majelis Amanat Rakyat (MAR)¹⁰

Kedua, reaksi positif dari pimpinan MPR RI. Didampingi para Wakil ketua DPR-MPR RI, masing-masing Ismail Hasan Metereum (PPP), Syarwan Hamid (FABRI), Abdul Gafur (Golkar) dan Fatimah Ahmad (PDI), dan para pimpinan fraksi, Ketua Umum DPR-MPR RI Harmoko, pada tanggal 19 Mei 1998 menyatakan: “Berkenaan adanya aspirasi masyarakat yang menghendaki presiden mengundurkan diri sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Dewan

⁸ www.kompas.com, Kamis, 5 Februari 1998.

⁹ Aminudin, *Op.cit*, hal.358-359

¹⁰ *Ibid*, hal. 359

kepada presiden, fraksi-fraksi sepenuhnya dapat memahami dan sepakat untuk dilaksanakan secara konstitusional”

ketiga, meningkatnya krisis kepercayaan di kalangan elit politik formal dan informal tingkat atas.¹¹ Soeharto mencoba untuk mengulur waktu dengan membentuk tim sembilan yang terdiri dari pemimpin-pemimpin islam terkemuda dari NU, Muhammadiyah dan Masyumi. Dari pertemuan itu terdapat kompromi meliputi Pemilu yang dipercepat, reshuffle kabinet dan pembentukan komite reformasi. Namun taktik ini sia-sia saja. Soeharto mendapatkan *pressure* yang semakin kuat dari arus bawah demonstrasi mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR dan dari para menteri-menterinya yang mayoritas menolak masuk dalam cabinet Soeharto lagi, serta dari para tokoh intelektual Muslim yang tidak bersedia masuk dalam cabinet reformasi.

Gerakan Mahasiswa di kampus-kampus di Indonesia yang menuntut reformasi politik mengakibatkan berkali-kali bentrokan keras antara mahasiswa dan militer yang mencapai puncaknya pada 12 Mei 1998 yang mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Tragedi ini kemudian memicu sentimen politik anti-Soeharto yang kian meluas di kalangan masyarakat dan beresosiasi dengan munculnya berbagai aksi massa, mulai dari demonstrasi, perusakan took-toko dan beberapa kantor pemerintahan, penjarahan dan pembakaran di kota-kota besar Indonesia. Di sisi lain, kelompok-kelompok politik anti Soeharto segera mengkonsolidasikan kekuatan politiknya melalui Kelompok Pekerja Indonesia (KPI) dan Majelis Amanat Rakyat (MAR).

¹¹ Urbaningram, *Op.cit*, hal. 72-73

Soeharto mencoba untuk mengulur waktu dengan membentuk tim sembilan yang terdiri dari pemimpin-pemimpin Islam terkemuka dari NU, Muhammadiyah dan Masyumi. Dari pertemuan itu terdapat kompromi meliputi Pemilu yang dipercepat, reshuffle kabinet dan pembentukan Komite Reformasi. Namun taktik ini sia-sia saja. Soeharto mendapatkan *pressure* yang semakin kuat dari arus bawah demonstrasi mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR dan dari para menteri-menterinya yang mayoritas menolak masuk dalam kabinet Soeharto lagi, serta dari para tokoh intelektual Muslim yang tidak bersedia masuk dalam kabinet reformasi.¹² Menguatnya gerakan reformasi yang dilancarkan mahasiswa, “pembusukan politik” di tubuh pemerintahan, serta “pembelotan-pembelotan” politik yang dilakukan oleh para pembantunya akhirnya memaksa Soeharto pada 21 Mei 1998 memilih satu-satunya pilihan, yaitu mengundurkan diri sebagai Presiden RI.

III.2. Pemerintahan Habibie.

Legitimasi Pemerintahan Habibie

Naiknya Habibie sebagai Presiden secara otomatis setelah Soeharto turun memancing sikap pro-kontra. Dalam tataran wacana hukum (konstitusi), terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. *Pertama*, pihak yang yakin bahwa keputusan berhentinya Soeharto dan naiknya Habibie telah memenuhi kaidah-kaidah konstitusi. Kelompok ini diwakili oleh antara lain Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Ismail Suny, Prof. Dr. Harun Al Rasyid, dan Prof. Dr.

¹² Aminudin, *Op.cit.*, hal. 358-359.

Sri Soemantri. *Kedua*, kelompok yang melihat mekanisme tersebut tidak konstitusional. Kelompok ini diwakili antara lain oleh Prof. Dr. Dimiyati Hartono dan Bambang Widjojanto, SH.¹³

Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok pertama adalah merujuk pasal 8 UUD 1945, jika Presiden berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya. Lebih spesifik lagi terlihat dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Pasal 1 ayat 2 Tap ini berbunyi: *Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam ketetapan ini adalah magkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.* Pasal 3 ayat 2 berbunyi, *Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan DPR.* Ayat 3 berbunyi, *Apabila DPR untuk maksud tersebut tidak mungkin mengadakan rapat, maka Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden, bersumpah atau berjanji di hadapan Mahkamah Agung.*

Sementara Prof. Dr. Dimiyati melihat dari prespektif yang berbeda. Pertama, dalam pasal 8 UUD 1945 memang dinyatakan, kalau presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden yang meneruskan pekerjaannya sampai selesai. Tapi wakil presiden menjalankantugas tersebut tidak dalam kapasitas sebagai presiden. Alasannya, dalam UUD 1945 tak disebutkan wakil presiden memiliki kedudukan sebagai mantaris MPR. Kedua, pendudukan gedung MPR/DPR oleh mahasiswa, bukanlah alasan yang tepat. Asumsinya, mahasiswa

¹³ Urbaningrum, *Op.cit*, hal. 82

tidak akan mengganggu jalannya siding. Maka, karena tidak dilakukan sesuai prosedur yang lazim, pergantian itu tidak konstitusional.¹⁴

Habibie juga dianggap lemah dilihat dari segi legitasi pengangkatannya. Ketika Soeharto akan mundur terdapat lima kemungkinan suksesi yakni: *pertama*, Habibie otomatis menjadi presiden; *kedua*, Soeharto mendelegasikan kekuasaannya melalui Tap MPR (seperti model supersemar); *ketiga*, SI MPR memilih presiden baru; *keempat*, MPR membentuk presidium dan *kelima* pemilu dipercepat untuk memilih presiden baru. Pola penggantian yang terjadi adalah pola pertama di mana Habibie otomatis menjadi presiden walaupun hal ini dikombinasikan dengan pola kelima yakni percepatan Pemilu dari tahun 2003 ke 1999. Kelemahan pola pertama disebabkan karena keberadaan Habibie dianggap sebagai satu paket warisan pemerintah Soeharto. Bahkan beberapa kelompok tetap menuntut pembentukan pemerintah transisi seperti dikemukakan dalam “Manifesto Demokrasi” dari 167 organisasi non-pemerintah, mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi di Jakarta pada 17 Agustus 1998. Tuuntutan serupa dikemukakan pula oleh kelompok Petisi 50.¹⁵

Problematka Pemerintahan Habibie

Syamsuddin Haris memiliki catatan mengenai beberapa problematika Presiden Habibie. Menurut Haris, problematika terbesar Presiden Habibie tampaknya bersumber pada *performance* pemerintahan sendiri. Diantaranya

¹⁴ *Ibid*, hal. 83-84

¹⁵ Sujatmiko, Iwan Gardano dan Simanjuntak, Fritz E., *Legitimasi Pemerintahan Habibie dalam Selo Soemarjan (peny.), Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 262.

adalah, pertama, citra diri Presiden Habibie maupun kabinetnya yang tidak sepenuhnya bersih dari kerak korupsi-kolusi-nepotisme (KKN). Di satu pihak pemerintahan Habibie bertekad hendak membersihkan KKN tetapi di pihak lain tidak mencoba mengambil inisiatif untuk mengagendakannya secara konkret. *Kedua*, Presiden Habibie tampaknya cenderung memandang proses reformasi secara *taken for granted*. Artinya, Habibie terlalu percaya diri dan menganggap bahwa arus reformasi akan bergerak linear mengikuti skenario yang dibayangkannya: sidang istimewa, pemilihan umum, dan ia sendiri lengser secara damai. Padahal dengan struktur keanggotaan yang oportunistik seperti sekarang, bisa saja sidang istimewa MPR mencopot Habibie dan menunda pelaksanaan pemilu hingga lima tahun lagi.

Ketiga, Presiden Habibie terkesan terlalu banyak bicara dan memberikan pernyataan politik. Kecenderungan seperti ini tentu saja positif sepanjang Pak Habibie sungguh-sungguh “mengerti politik” dan mengalami peta pertarungan kekuasaan yang bergolak di sekitarnya. Tetapi persoalannya menjadi lain jika kecenderungan tersebut merupakan manifestasi belaka dan ketidaktahuan dan kenaiifan itu sendiri. *Keempat*, harus diakui bahwa selama sebulan terakhir Habibie memang sudah mencoba mengambil langkah-langkah awal reformasi, baik dibidang ekonomi, politik, maupun hukum. Tetapi sayangnya, langkah-langkah awal reformasi itu tidak terkoordinasi dan terbengkalai dengan jelas.¹⁶

¹⁶ Haris, Syamsuddin, *Reformasi Setengah Hati*, Jakarta: Erlangga, 1999, hal. 193-194.

Prestasi Buruk Habibie

Samsuddin Haris menyampaikan penilaiannya terhadap pemerinyahan Habibi yang berlangsung selama satu tahun lebih. Menurut Haris, Habibie relatif berhasil dalam empat soal, yaitu membuka ruang bagi kebebasan—termasuk kemerdekaan berserikat dan kebebasan pers, membebaskan para tahanan politik (tapol) rezim Orde Baru, memberi peluang berlangsungnya pemilu yang demokratis, dan membiarkan lembaga kepresidenan lebih longgar dalam menerima kritik. Dalam bidang ekonomi, betapapun rupiah relatif stabil selama dua bulan terakhir, faktor eksternal termasuk tekanan IMF lebih berpengaruh ketimbang faktor kebijakan ekonomi dan moneter Habibie.

Tetapi keberhasilan itu merosot “harganya” kalau dibandingkan dengan sejumlah kegagalan Habibie yang justru menjadi akar malapetaka kita sebagai bangsa. *Pertama*, kegagalan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli di satu pihak dan pembangunan pemerintahan yang bersih di pihak lain. Tarik ulur dan bahkan kecenderungan sandiwara politik dalam pengusutan Soeharto merupakan indikasi terpenting dalam hubungan ini. Indikasi tindakan KKN Habibie juga terlihat saat penganugerahan Mahaputera. Hal ini disebabkan karena istrinya Ainun Habibie, adiknya J.E. Habibie dan pembantu-pembantu dekatnya termasuk yang diberi bintang penghargaan itu. Dalam kasus ini publik tidak mengetahui kriteria yang jelas sehingga mengundang pertanyaan mengapa ada pihak yang layak tetapi tidak menerima.¹⁷

¹⁷ Sujatmiko-Simanjuntak, hal. 273,

Kedua, kegagalan dalam memberi hukuman bagi ABRI atau TNI yang telah menculik dan menghilangkan para aktivis, serta menembaki para mahasiswa dan membunuh rakyat yang tak berdosa secara biadab. Habibie menutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagian besar akar malapetaka yang tengah kita alami sebagai bangsa berpangkal pada peran distortif TNI dalam politik. Sebaliknya, Habibie justru membiarkan berlangsungnya peradilan sandiwara atas kasus penembakan mahasiswa Trisakti, penculikan dan penghilangan para aktivis, dan pembantaian atas rakyat Aceh.

Ketiga, supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia (HAM) yang sering didengungkan dibiarkan menjadi gincu alias penghias bibir belaka. Tak satupun kasus kerusuhan—termasuk perkosaan dan kekerasan seksual atas sejumlah warga keturunan cina—yang faktanya bisa dibuka secara telanjang melalui lembaga peradilan. Aparat hanya mengambinghitamkan provokator tanpa pernah jelas bagi publik, siapa dan untuk apa para provokator itu bekerja. Sementara itu di Timor Timur, retorika supremasi hukum dikemukakan secara bersamaan dengan “pembagian” senjata bagi kelompok-kelompok prointegrasi.

Keempat, Habibie gagal mengambil inisiatif bagi dialog dan rekonsiliasi unsur-unsur bangsa yang tercerai-berai, sehingga masyarakat saling mencurigai dan agenda reformasi tidak terarah. Habibie selalu bangga dan cepat puas dengan agenda reformasi versinya sendiri. Dalam konteks perundang-undangan misalnya, pemerintah terperangkap ke dalam orientasi kuantitas (jumlah) ketimbang kualitas

setiap undang-undang (UU) yang disepakati dengan DPR.¹⁸

Liberalisasi Politik : Pemilu 1999 dan SU MPR.

Lewat SK Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 1999, mengesahkan sebanyak 48 partai politik yang berhak menjadi peserta Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan bulan Juni 1999.¹⁹

M. Alfian Alfian M. mencatat, terdapat tiga kekuatan di tanah air yang berhadapan, atau setidaknya beririsan satu sama lain: kekuatan Islam politik formal, Islam politik informal, dan—tanpa mengesampingkan kekuatan politik non-Muslim—Nasionalisme-Sekuler. Pertama, kekuatan Islam politik formal. Kekuatan ini direpresentasikan oleh partai-partai Islam yang melakukan *Stembus accord*. Kekuatan ini berhadapan secara frontal dengan kekuatan politik nasionalisme sekuler, namun dimungkinkan akan beririsan secara politik dengan partai-partai Islam “informal”. Semacam Partai Amanat Nasional (PAN)—tapi tidak dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang condong dekat dengan kekuatan politik Nasionalisme-Sekuler.

Kedua, kekuatan Islam politik informal. Kekuatan politik ini berbasis masa politik Islam, namun memiliki platform pluralisme, semisal PAN dan PKB. Tidaklah bisa dihindari kedua partai politik ini memiliki basis masa politik kalangan Muhammadiyah dan NU. Sementara partai-partai politik berlabel Islam,

¹⁸ Haris, hal. 224-227.

¹⁹ Urbaningrum, hal. 122.

tetapi berasas Pancasila tergolong dalam kelompok ini—walaupun boleh dibilang mereka tergolong partai gurem.⁰

Kekuatan politik ini bisa beririsan dengan kekuatan politik Islam formal, sekaligus dengan kelompok Nasionalisme-Sekuler. Komunike politik jilid I antara PAN, PKB dan PDI Perjuangan, misalnya merupakan fenomena irisan politik kekuatan Islam informal dengan kekuatan politik Nasionalis-Sekuler. Sementara komunike politik jilid II antara PAN, PPP, merupakan irisan politik antara kekuatan politik Islam formal dengan informal.

Ketiga, kekuatan politik Nasionalisme-sekuler. Representasi utama dari kekuatan ini menggumpal di PDI Perjuangann pimpinan Megawati. Inilah kekuatan politik yang paling “ditakuti” oleh kelompok politik Islam formal.²⁰

Fraksi Islam dan Poros Tengah : Kekuatan Ketiga

Kemenangan PDI-P dalam Pemilu 1999 merupakan duka dan menimbulkan kegalauan di kalangan Islam. Kegalauan ini sebagai sesuatu yang wajar saja terjadi, karena kenyataannya PDI-P berbeda dengan PDI tempo dulu, dikelilingi oleh orang-orang yang “dianggap” bermasalah dengan umat Islam. Di situ ada Theo Syafii, Jacob Tobing dan caleg non Muslim yang mendominasi partai berlogo banteng tersebut.

Karena itu ketika menyaksikan kenyataan bahwa PDI-P merupakan penjelmaan Orla (Soekarno) dan Orba (didominasi kalangan Nasrani dan non Islam lainnya), maka elit politik Islam tidak ingin mengulangi kesalahan yang

²⁰ M, M Alfian Alfian, *Eksperimen Islam Politik Jilid III*, dalam Deliar Noer (et.al), *Mengapa Partai Islam Kalah ?*, Jakarta: alvabet, 1999, hal.117.

sama di era reformasi. Berbagai pertimbangan inilah yang mendorong mereka, melupakan kekalahan politik yang baru saja dideritanya dan juga melupakan konflik-konflik internal atau antar partai Islam sendiri yang terjadi ketika berebut massa Islam atau simbol bersejarah.

Langkah utama yang dicatat dalam sejarah adalah antisipasi-antisipasi dini yang dilakukan partai-partai Islam ini untuk menghadang PDI-P dan sekaligus meneguhkan eksistensinya sebagai fraksi Islam dalam parlemen. Bersatunya kembali politisi Islam akan menjadikan posisi tawar dan kekuatan alternatif di lembaga legislatif semakin tinggi.²¹

Menurut Hartono Marjono, beberapa hal positif yang telah dicapai antara lain, kesepakatan untuk bertablig akbar bersama, bahkan melakukan bentuk-bentuk kampanye bersama guna mensosialisasikan gagasan-gagasan bersama berdasarkan aspirasi umat Islam bagi kepentingan nusa dan bangsa. Hasil lain adalah kesepakatan *stembus accord* yang ternyata tidak mengecewakan, dan berhasil melahirkan sebuah "kekuatan ketiga" dari dua kubu kekuatan politik yang selama ini sudah lebih menampilkan tanda-tanda kesepihakan dalam upaya menggolkan calon presidennya masing-masing.²² Fraksi Islam tidak pernah berbicara apalagi memunculkan seorang nama calon presiden. Sebab hal ini dinilai akan memunculkan keruwetan secara internal. Hal ini pula yang kemudian membuat fraksi Islam memilih untuk mengambil jarak terhadap kekuatan politik yang sudah ada seperti PDI-P, Golkar, PKB, dan PAN maupun TNI. Namun

²¹ Suharsono, *Cemerlangnya Poros Tengah*, Jakarta : Perennial Press, 1999, hal.82-85

²² Marjono, Hartono, "*Fraksi Islam*" dan "*Poros Tengah*" dalam Deliar Noer (*et.al.*), *Mengapa Partai Islam Kalah ?*, Jakarta: ALVABET, 1999, hal. 312

begitu fraksi Islam tetap terbuka terhadap kekuatan politik lain selama bisa menerima prinsip-prinsip pemikiran fraksi Islam.

Tetapi kata “Islam” dianggap oleh Amin Rais maupun elite yang memilih partai terbuka lainnya, sangat eksklusif. Karena itu dicarikan formula baru, yang kemudian diketemukan fraksi reformasi dan akhirnya kelompok Islam ini memilih nama “poros Tengah” .

Kehadiran poros tengah sebenar turut dipicu oleh semakin berlarut-larutnya ketegangan-ketegangan antara Golkar dengan PDI-P. Ramalan berbagai pihak, bahwa SU MPR akan mengalami *deadlock* dalam pemilihan Presiden karena keduanya saling ngotot dengan jagonya masing-masing sebenarnya mulai muncul saat perhitungan suara hampir usai, dan peta kekuatan mulai dapat diraba, tidak ada satu pihak pun dari persetujuan Habibie-Megawati ini, yang bisa memastikan perolehan 50%+1 atau mayoritas sederhana. Di satu sisi kubu Megawati sebagai partai pemenang Pemilu tampak kurang proaktif, bahkan terkesan diam dalam kesombongan, menanti partai-partai lain datang kepadanya “menyerahkan diri” sehingga bisa membangun koalisi.

Sebaliknya Golkar juga tidak ingin dan terlalu yakin bahwa jagonya bisa menduduki kembali kursi presiden. Di tengah ketidakpastian politik, tanpa single majority sebagaimana biasa terjadi pada Orde Baru, massa bisa bersikap macam-macam. Massa PDI-P menggertak dengan cap jempol darah dan akan memenuhi gedung MPR di Senayan dengan puluhan atau bahkan ratusan ribu massa yang berani mati. Begitu juga sebaliknya, ada laskar putih pendukung Habibie yang siap mengamankan Sidang Umum.

Di saat kebuntuan politik inilah para elit politik Islam menunjukkan kecemerlangannya dengan membuat “terobosan brilian” yakni membangun Poros Tengah dan meminta Gus Dur untuk menjadi calon presiden.²³ Ide tentang Poros Tengah ini sendiri, menurut Zarkasih Noor, berasal dari diskusi-diskusi yang intensif antara dirinya dengan Feisal Baasir dan Husni Thamrin. Sedangkan menurut versi lain, ide ini merupakan lontaran dari Amin Rais yang dinyatakan dalam dialog partai politik yang diselenggarakan oleh LIPI dan UNICEF. Tetapi satu versi lain yang tampaknya perlu disimak bersama dituturkan Soetjipto Wirosarjono, sehubungan adanya rilis dalam forum sederhana di Hotel Arya Duta, Jakarta, tentang koalisi partai-partai Amanat Perjuangan Bangsa.²⁴

III.3. Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Kabinet Kompromis

Di awal pemerintahannya, KH. Abdurrahman Wahid ternyata belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Presiden Gus Dur terlalu mementingkan budaya politik dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat. Budaya politik kompromi ternyata tidak efektif untuk meredam gejolak politik di berbagai daerah yang menyuarakan disintegrasi bangsa.²⁵

Muhammad Chatib Bisri menunjukkan beberapa gejala awal dalam kabinet Gus Dur. *Pertama*, gejala awal –yang bisa saja salah--adalah reaksi pelaku ekonomi, masyarakat dan pers, tentang pesimisme terhadap kabinet baru. Menurutnya ada satu hal penting: ekspektasi –bagi dunia usaha--adalah sinyal

²³ *Ibid*, hal. 75-76.

²⁴ *Ibid*, hal. 86

²⁵ Kompas, Jumat, 31 Desember 1999.

awal untuk sebuah keputusan investasi. Sulitnya, informasi yang terjadi cenderung asimetris. Akibatnya, pelaku ekonomi tak tahu persis bagaimana kebijakan akan diimplementasikan.

Kedua, soal koordinasi. Diluar soal ekonomi teknis, soal koordinasi menurut Bisri, tetap akan jadi soal besar. Terutama kordinasi dengan Wapres Megawati. Dengan komposisi kabinet seperti ini bukan tidak mungkin posisi Mega akan menjadi sulit. Berdasarkan Keppres yang baru, pelaksanaan teknis pemerintahan berada di bawah tanggung jawabnya. Sayangnya ia seperti tak berperan dalam penyusunan kabinet. Bisa dibayangkan rumitnya persoalan koordinasi yang akan muncul.

Soal lain, adalah kerja sama antara Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter dan Menteri Keuangan yang mengatur fiskal. Fakta, bahwa Prijadi (Menkeu) tak lulus *fit and proper test* bukan tidak mungkin akan menimbulkan persoalan dalam proses koordinasi antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.²⁶

Kegemaran Melancong

Menurut analisa M. Dawam Raharjo, selama menjabat sebagai Presiden, Abdurrahman terhitung sudah lebih dari 20 kali bepergian ke luar negeri. Menurutnya, kunjungan kenegaraan tersebut bukan sekadar jalan-jalan tanpa tujuan dan harapan. Kunjungan tersebut memiliki segudang maksud, mulai dari kunjungan untuk memperoleh kepercayaan internasional sampai pada urusan

²⁶ Majalah TEMPO edisi 28 Agustus - 3 September 2000

Timor Timur, khususnya dalam menjelaskan kasus Atambua yang menimbulkan ancaman blokade ekonomi yang diucapkan oleh Menhan AS, Cohen. Namun, hingga saat ini masih belum terlihat hasilnya. Investor-investor masih sebatas janji-janji. AS konon cukup kecewa dengan langkah pendekatan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap Irak dan Libia yang memuat kepentingan ekonomi dan politik itu.

Kebijakan-Kebijakan Inkonstitusional

Presiden Abdurrahman Wahid juga dinilai sering mengeluarkan kebijakan yang menyalahi aturan (inkonstitusional). Salah satunya adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan Rusdihardjo dan melantik Jenderal (Pol) Bimantoro sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru tanpa persetujuan terlebih dulu dari DPR. Menurut Ketua MPR Amien Rais, keputusan itu sebenarnya tidak sah, sebab bertabrakan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, khususnya Tap MPR No VII Tahun 2000 Pasal 7 ayat 3. Tap MPR tersebut, menurutnya, merupakan peraturan yang setara dengan haluan negara. Karena itu, jika hal tersebut dilanggar, sudah sepantasnya Presiden diajukan ke SI MPR.

Unsur Kekuatan Gus Dur

Jika diamati ada lima keunikan yang membuat posisi Abdurrahman sebagai Presiden masih sangat kuat. Yang *pertama* adalah bahwa Presiden Abdurrahman Wahid dianggap mampu mengendalikan militer di Indonesia. Yang *kedua* adalah dia dianggap mampu menghambat aliran fundamentalis Islam di

Indonesia. Yang *ketiga* adalah bahwa Abdurrahman dianggap mampu melindungi kaum minoritas, khususnya Kristen/Katolik dan kelompok sekular di Indonesia. Sekarang ini di dalam kabinet orang-orang Kristen/Katolik menduduki posisi sektor riil yaitu Mentamben Purnomo, Mentan Bungaran Saragih, dan Menperindag Luhut Panjaitan. Juga tokoh-tokoh sekuler seperti Erna Witoelar, Sarwono, dan Marzuki Darusman. Yang *keempat* adalah keinginan Abdurrahman untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Hal ini tentunya bertentangan dengan politik Indonesia yang membela bangsa Arab dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Secara tidak langsung hal itu membuat Gus Dur mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat, karena kepentingan-kepentingan Yahudi di Israel itu sudah menyatu dengan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Walaupun hal itu mendapatkan tentangan dari masyarakat Indonesia, tetapi sebenarnya telah terjadi perdagangan-perdagangan tersembunyi antara Indonesia dan Israel. Yang *terakhir* adalah kenyataan bahwa Abdurrahman selama ini telah melindungi konglomerat-konglomerat di Indonesia. Misalnya adalah dengan terdengarnya kabar bahwa Abdurrahman telah meminta untuk melindungi lima pengusaha besar yang disebut "konglomerat hitam", meminjam istilah Kwik Kian Gie (mantan Menko Ekuin), dari kebangkrutan dengan memberikan bantuan restrukturisasi dan rekapitalasi. Hal ini membuat kebijaksanaan Gus Dur dianggap sebagai "*conglomerate friendly*", meminjam istilah dari Prof Mubyarto yang merupakan plesetan dari *market friendly*.

Memang pendapat di atas masih kontroversial. Ada yang memandang bahwa hal-hal tersebut di atas bukan merupakan kekuatan, melainkan merupakan

kelemahan-kelemahan dari Abdurrahman. Diskripsi di atas menjelaskan penolakan yang fundamental terhadap kepemimpinan Presiden Kiai Abdurrahman Wahid. Kiat-kiatnya di atas dikenal telah muncul pada masa Orde Baru. Di lain pihak kiat politik di atas dinilai sebagai terobosan politik yang mampu mendatangkan simpati internasional. Tetapi yang jelas umat Islam di Indonesia selain NU sangat menentang pemikiran-pemikiran Abdurrahman di atas.

Lima kiat politik di atas dianggap sangat istimewa karena justru dijalankan oleh seorang yang dianggap pemimpin Umat Islam sendiri. Ibaratnya, Abdurrahman Wahid adalah suatu predator yang "memakan " kelompoknya sendiri. Jika kiat-kiat di atas dijalankan oleh lawan-lawan politik umat Islam, maka hal itu bisa dimengerti. Tapi kiat-kiat itu justru dilakukan oleh pemimpin Islam sendiri.

Atas dasar analisis tersebut, maka kita melihat arus bawah yang secara prinsipil menolak kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Mereka itu tentu akan mencari jalan untuk bisa menjatuhkannya. Bahkan, umat Islam kini pun telah bisa menerima Megawati sebagai Presiden. Walaupun ia bukan pemimpin Islam, tetapi ia diperkirakan tidak akan "seberani" Abdurrahman Wahid dalam melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan aspirasi umat Islam.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa upaya-upaya untuk melengserkan Abdurrahman Wahid belum berhasil. Sebabnya adalah karena kaum oposan di atas belum menemukan alternatif. Megawati agaknya merasa lebih *comfortable* sebagai Wakil Presiden, mungkin menyadari kelemahannya sendiri.

Bahkan, Mega sendiri telah mencegah kalangan PDI-P untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Sementara itu Abdurrahman Wahid masih mampu bertahan karena popularitas yang selalu bisa ia dapatkan dengan memainkan isu-isu politik.²⁷

Buloggate dan Bruneigate

Pansus Bruncigate dan Bulogate dibentuk melalui rapat paripurna DPR awal September lalu, sebagai tindak lanjut penggunaan hak angket DPR dalam menyelidiki kasus penerimaan bantuan dana US\$ 2 juta dari Sultan Brunei (Bruneigate) dan penyelewengan dana Yanatera Bulog Rp 35 milyar, yang keduanya diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Bachtiar Chamzah, Ketua Pansus Bruneigate dan Bulogate DPR RI, Pansus tersebut dibentuk dalam rangka mencari klarifikasi apakah Gus Dur terlibat atau tidak dalam kedua kasus tersebut.²⁸

Setelah diskors dua kali dan diwarnai *walk out* anggota FKB, akhirnya Rapat Pleno Pansus *Buloggate-Bruneigate* pada Minggu (28 Januari 2001) malam, menyimpulkan, bahwa Gus Dur mengetahui dan terlibat dalam kasus *Buloggate* dan tak konsisten dalam memberi keterangan kasus *Bruneigate*. Rumusan inilah yang akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (29 Januari 2001) Di sinilah Pansus *Buloggate-Bruneigate* berkesimpulan, bahwa Presiden Abdurrahman Wahid mengetahui dan terlibat dalam kasus

²⁷ Lihat analisa M. Dawam Raharjo dalam *Republika*, Senin, 25 September 2000

²⁸ www.gatra.com, 30 September 2000

penyelewengan dana Yanatera Bulog senilai Rp35 milyar. Sedangkan dalam kasus dana hibah dari Kasultanan Brunei senilai 2 juta dolar AS, pansus menyatakan Presiden Abdurrahman Wahid tidak konsisten dalam memberikan keterangan sehingga diambil kesimpulan yang bersangkutan telah berbohong kepada publik. Perdebatan keras juga terjadi saat penyusunan redaksional materi kesimpulan. Semula ada empat opsi kesimpulan dengan redaksional yang berbeda-beda. Dari empat diperas menjadi dua opsi. Opsi pertama yang ditawarkan, Presiden Gus Dur dapat diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog sebesar Rp35 milyar. Sedangkan opsi kedua, ada indikasi kuat bahwa teman-teman dekat presiden menggunakan momentum kedekatannya dengan presiden untuk mencairkan dana Yanatera. Saat *voting* inilah opsi pertama menang mutlak. Dari 44 anggota Pansus yang hadir, 33 memilih opsi pertama, satu orang abstain dan 9 orang memilih opsi kedua. Sedangkan dalam rapat membahas dana sumbangan dari Sultan Brunei yang dilakukan secara tertutup pada Sabtu (27/1), keputusan diambil dengan cara *voting* juga. Dari 28 anggota yang datang, dua orang tidak setuju dan 26 setuju atas kesimpulan pansus. Pertimbangan pansus semua fakta yang diperoleh dari saksi-saksi, yang paling penting mengarah pada inkonsistensi pengakuan Gus Dur terhadap sumbangan pribadi dari Sultan Brunei yang langsung diberikan ke Gus Dur²⁹

²⁹ Detikcom, Senin, 29 Januari 2001

Interpelasi : Batu Terjal Pemerintahan Gus Dur

Rapat interpelasi digelar pada Kamis, 20 Juli 2000, dihadiri oleh 439 orang dari 488 jumlah seluruh anggota DPR. Komposisi anggota Dewan yang hadir adalah FKB 47 dari 50 orang; F Reformasi 34 dari 41; TNI/Polri 34 dari 38; FDKB 5 dari 5; FKKI 10 dari 11; F Partai Dualat Umat 9 dari 9; F PDI-P 130 dari 149; dan FPP 52 dari 55. Rapat interpelasi ini ditujukan untuk meminta keterangan kepada presiden tentang pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN serta Yusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan Susunan dan Kedudukan DPR No. 4/1999. Rapat meminta keterangan ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya telah juga dilakukan permintaan keterangan kepada presiden sehubungan dengan pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada 18 November 1999.

Sekretaris Negara Johan Effendi akhirnya ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid untuk membacakan jawaban Pemerintah atas hak interpelasi yang diajukan oleh DPR. Presiden juga menegaskan bahwa ia cukup terbuka menanggapi berbagai pertanyaan tentang kinerja pemerintahannya. Presiden mengatakan, seluruh jawaban yang akan diberikan sudah didiskusikan bersama para pembantunya, dan jawabannya berfokus hanya pada sebab Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi diberhentikan. Pada umumnya para anggota DPR menyatakan tidak puas atas jawaban Presiden yang tidak menyentuh substansinya, melainkan hanya garis besar sekali. Dan bila alasan pemberhentian itu adalah etik, seorang

anggota DPR balik menggugat Presiden, karena menurut dia, dalam beberapa hal, Presiden juga tidak etis.

Memorandum DPR Melawan Dekrit Presiden

Sebagian besar Fraksi di DPR, dalam sidang paripurna DPR Senin 30 April, mengusulkan agar DPR memberi memorandum II pada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).. Tercatat, dari 10 fraksi yang ada, dua menolak dijatuhkannya memorandum II, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Satu fraksi, yakni TNI/Polri, menyatakan abstain (mengambang). Sedangkan 7 fraksi lain (F-PDIP;F-Golkar; F-PPP; F-Reformasi; F-PDU; F-KKI; dan F-PBB) mengusulkan agar presiden dijatuhi memorandum II. Dengan jatuhnya memorandum II maka Sidang Istimewa sudah didepan mata. Prosesnya, presiden diberi waktu satu bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Setelah satu bulan, DPR kembali melakukan sidang paripurna, untuk memutuskan apakah perlu Sidang Istimewa atau stop sampai disini dengan alasan kinerja presiden menunjukkan perbaikan luar biasa. Namun agaknya sulit untuk bisa memperbaiki kinerja kabinet, karena waktunya cuma satu bulan. Kalau demikian yang terjadi, berarti diputuskan Sidang Istimewa. Penentuan hari sidang istimewa kurang lebih dua bulan. Jadi, kalau dihitung dari saat sekarang, maka untuk mencapai pada tahap Sidang Istimewa masih ada waktu sekitar tiga bulan.

Posisi Gus Dur memang lemah, karena ia hanya didukung oleh 8 persen kursi di DPR. Karena itu, kalau mau aman, Gus Dur harus bisa merangkul

kembali PDI Perjuangan dan Golkar. Cuma masalahnya apakah kini Mega mau berbulan madu lagi? Sebab beberapa kali ia merasa dikecewakan, terutama dalam hal pembagian kekuasaan yang nampaknya pelaksanaannya tersendat. Dengan Golkar? Para petinggi Golkar juga sudah patah arang. Ini gara-gara muncul aksi gerakan anti Golkar yang dimotori PRD dan Forkot. Pihak Golkar menuduh NU dan PKB main mata dengan mereka. Lebih sakit lagi tatkala sejumlah kantor Golkar dibakar massa di Jawa Timur, tatkala turun memorandum I.³⁰

Nurcholish Madjid menyesalkan jawaban Presiden Abdurrahman Wahid atas Memorandum II tidak menyentuh masalah substantif, yang mestinya dilanjutkan dengan pengambilan langkah-langkah perbaikan yang konkrit. Ia mengatakan, memorandum sebenarnya hanyalah peringatan, karena itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Menurutnya, Gus Dur bisa selamat, asal dia memberikan satu responsi secara substantif. Artinya, tidaklah semata-mata retorika untuk menghindari persoalan.³¹

Guru Besar Ilmu Sosial Politik dari Universitas Andalas Padang, Prof Dr Abdul Aziz Saleh Ph.D, berpendapat, Gus Dur benar-benar nekat, kalau sampai berani mengeluarkan jurus "*Dekrit membubarkan DPR*" sebagai balasan memorandum-II dikeluarkan DPR pada sidang 30 April 2001. "Kalau Gus Dur sempat mengeluarkan dekrit berarti dia melakukan tindakan yang tidak punya perhitungan, itu sama saja dengan bunuh diri, karena semua orang tahu dukungan

³⁰ www.gatra.com, 1 Mei 2001

³¹ www.gatra.com, 3 Mei 2001

politik baginya sangat kecil, sedangkan mengeluarkan dekrit harus mendapat dukungan besar dari rakyat," katanya.

Menurut dia, kondisi pemerintahan Gus Dur saat ini tidak sama dengan pemerintahan Soekarno yang mengeluarkan dekrit di era orde lama, karena saat itu sebagian besar kekuatan politik termasuk militer mendukung keluarnya dekrit Presiden untuk menyelamatkan bangsa. Selain itu, keluarnya dekrit harus berdasarkan konsultasi sebaliknya memorandum-II apabila dikeluarkan DPR juga memuat dasar konstitusional pula, karena itu sulit dipercaya terjadi "bentrok" konstitusi. Ia mengatakan, jika akhirnya terjadi *chaos* pasca memorandum-II maka rakyat tahu kesalahannya justru berada di pihak pendukung Gus Dur. Selain itu, rakyat juga melihat buruknya kinerja Gus Dur, apalagi akhir-akhir ini dia sering mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan seorang Presiden, seperti mengancam, atau statemen yang bisa dibantah orang serta hal-hal yang tidak benar. Menurut Abdul Aziz, dari berbagai kelemahan kebijakan dan posisinya saat ini sulit dipercaya Gus Dur berani mengeluarkan dekrit membubarkan parlemen. Kalaupun ada kekuatan yang mendukung dekrit maka tindakan tersebut sangat-sangat kurang perhitungan karena tidak memikirkan dampaknya yang sangat buruk bagi kehidupan politik dan segala yang telah ditata dan perjuangkan oleh para pelopor reformasi.³²

Langkah Gus Dur untuk mengeluarkan Dekrit Presiden mendapatkan dukungan yang besar dari para ulama kharismatik NU. Salah seorang ulama

³² www.gatra.com, 25 April 2001

kharismatik NU, KH Muhammad Ki Badar membenarkan bahwa para ulama Nahdlatul Ulama (NU) meminta kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mengeluarkan dekrit malam ini juga. Permintaan para ulama NU se-Indonesia itu merupakan hasil pertemuan para kiai NU dalam Forum Silaturahmi Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia di Pesantren As-Sidiqiyah di Jl. PAP II Kelurahan Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang.

Silaturahmi tersebut, menurut dia, menghasilkan enam keputusan yang disebut "Taushiyah". Salah satu keputusan tersebut adalah mendukung dekrit presiden dan meminta Presiden membekukan DPR/MPR. Hasil pertemuan itu adalah *pertama*, setelah mencermati perkembangan situasi di tanah air, terutama dilaksanakannya Sidang Istimewa (SI) MPR, Forum Silaturahmi menyatakan bahwa SI MPR tidak sah karena proses sejak awal cacat, baik secara prosedural maupun materi. SI MPR yang berlangsung itu, berawal dari proses kezaliman politik terhadap Gus Dur sebagai Presiden yang dilakukan oleh Orde Baru yang represif dan kolusif. SI MPR tidak sama sekali terkait dengan kepentingan negara dan bangsa.

Kedua, pemimpin yang terpilih secara demokratis melalui Pemilu adalah pemimpin yang sah, dalam hukum fikih "waliyul amr", yaitu pemimpin dengan kewenangan penuh yang wajib diakui. Oleh karena itu, upaya pemenggalan kepemimpinan di tengah jalan yang dilakukan secara konspiratif dengan keabsahan konsitutif, harus ditolak.

Ketiga, "Kita menyatakan kepedihan atas gagalnya upaya-paya kompromi antar elit politik karena langkah-langkah hukum kompromi tetap merupakan solusi yang paling kecil resikonya". Semua kegagalan itu, merupakan tanggungjawab elit yang lebih mengedepankan nafsu kekuasaan untuk kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Atas dasar itu, Forum Silaturahmi mendukung Presiden Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit dan membekukan DPR/MPR dengan segera agar bisa menentukan jalan keluar dari kebuntuan ini.

Keempat, segera mempercepat Pemilu karena masalah yang berkembang merupakan dari konflik elit politik yang juga bersumber dari kelemahan konstitusi yang masih menimbulkan banyak penafsiran. Jalan keluarnya bukan dengan mengganti kepemimpinan di tengah jalan, tapi mesti menata kembali konstitusi yang tidak merencanakan sistem presidensial dan parlementer, bangunlah suatu konstitusi yang menyeimbangkan dan terciptanya stabilitas politik.

Kelima, TNI dan Polri tetap berpijak pada jati dirinya sebagaimana diamanatkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di lapangan, TNI harus mengedepankan persuasif dan menjauhkan cara-cara represif yang melanggar HAM. Dalam keputusan yang keenam, diharapkan kepada masyarakat agar menahan diri dan tidak anarkis dan destruktif, demikian keputusan para ulama NU.³³

³³ www.gatra.com, 22 Juli 2001

Setelah mengalami pertentangan dari berbagai pihak dan dukungan penuh dari warga NU, akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid, di Istana Negara, tepat pukul 01:10 WIB Senin dinihari, memberlakukan Dekrit keadaan darurat dan membekukan MPR dan Partai Golkar. Dekrit Presiden itu dibacakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Yahya C Staquf di Istana Merdeka, pukul 01.17 WIB. Dalam dekrit itu Presiden Abdurrahman Wahid memaklumkan:

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun.
3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Selanjutnya Gus Dur memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasanya.³⁴

³⁴ www.gatra.com, 23 Juli 2001

III.4. Pemerintahan Megawati

Lemahnya Kinerja Megawati

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas di 13 kota besar 19 – 20 Juli 2004 yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah di berbagai bidang tercermin terjadinya kecenderungan kian menurunnya kepercayaan publik kepada Megawati. Penurunan secara gradual ini terus berlanjut hingga ke usia 33 bulan pemerintahannya. Namun, menariknya justru di saat hampir berakhir masa pemerintahannya, terjadi kenaikan kepercayaan cukup signifikan. Di antara berbagai bidang persoalan, masalah-masalah di bidang hukum tetap merupakan persoalan yang paling banyak dianggap belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Meski mengalami kenaikan apresiasi positif sebesar 10 persen dibandingkan dengan penilaian pada tiga bulan sebelumnya, namun apresiasi terhadap bidang hukum tetap paling rendah dibandingkan bidang-bidang lain seperti ekonomi, politik, dan keamanan (polkam), atau kesejahteraan sosial.

Bidang hukum dianggap sebagai bidang yang paling belum berhasil diatasi pemerintah. Upaya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selalu terlihat berjalan sangat lambat dan berlarut-larut. Meskipun dalam beberapa kasus pemerintah maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya memeriksa seorang gubernur sebagai tersangka kasus korupsi dan menahan ketua Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), yang juga anggota DPR, dalam kasus penyelundupan gula, namun tampaknya upaya ini belum betul-betul menunjukkan gigi pemerintahan yang tangguh dalam mengatasi

KKN. Terlebih semuanya menjadi anti klimaks saat mencuatnya pemberitaan dihentikannya penyelidikan Sjamsul Nursalim, tersangka kasus korupsi PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) oleh kejaksaan.³⁵

Di bidang ekonomi, geliatnya justru dirasakan cenderung melemah. Tanda-tanda semakin terjangkaunya harga barang kebutuhan pokok tidak juga terjadi. Persoalan stabilitas harga bahan kebutuhan pun mulai menampakkan kerapuhan. Terbukti, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tariff dasar listrik (TDL) yang lalu sudah sanggup mendongkrak berbagai harga kebutuhan pokok.³⁶

Dengan kinerja yang mengecewakan ini, Eep Saefulloh Fatah menilai Megawati tidak pantas lagi untuk menjadi Presiden Indonesia. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya bias membawa bangsa ini mengatasi krisis yang muncul. Dengan mengambil sikap berdiam diri, Megawati hanya memunculkan image seolah-olah kondisi bangsa Indonesia sedang stabil. Padahal yang dibutuhkan adalah komitmen yang jelas dan jalannya fungsi komunikasi yang baik. Memang komunikasi tidak bisa menyelesaikan masalah, namun dengan adanya komunikasi yang baik akan mampu mengkoordinasikan apa yang ingin dikerjakan. Mitologi Megawati sebagai pembela wong cilik akan jauh memudahkan dalam pemilihan umum mendatang. Persoalannya, masyarakat sudah melihat sendiri bahwa ternyata mitologi pembela *wong cilik* itu tidak berbuat banyak dalam mengatasi persoalan yang dihadapi *wong cilik*.³⁷

³⁵ www.kompas.com, Senin, 26 Juli 2004.

³⁶ www.kompas.com, Senin, 28 Januari 2002

³⁷ www.kompas.com, Jumat, 4 Juli 2003

Muncul satu pendapat serius. Pemerintah tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan karena masih tetap terpasung oleh koalisi partai-partai yang mandul, yang mengganggu, tetapi juga tidak membantu. Masing-masing anggota koalisi mempunyai agenda masing-masing. Juga masih ditelikung oleh tali temali sejumlah kelompok bisnis besar bermasalah, tetapi tetap jaya dan kuat koneksi serta interaksinya dengan lingkungan kekuasaan. Lubang-lubang pemasung lainnya adalah gurita KKN. Bukan saja KKN kemarin tidak bias disentuh dan ditindak secara adil dan secara efektif. Orang amat cemas, jangan-jangan KKN berkecamuk terus.³⁸

Pemilu Presiden 2004 : Kontestasi Elit Politik

Pemilu Presiden 2004 tidak ubahnya sebagai ajang kontestasi para elit politik Indonesia. Pasalnya semua pasangan calon Presiden-Wakil Presiden adalah wajah-wajah lama perpolitikan Indonesia. Masing-masing calon memang mewakili segemn pemilih tertentu kecuali NU yang terancam terpecah suaranya disebabkan terdapat tiga tokoh NU yang berpengaruh yang masing-masing mencalonkan diri dalam pasangan calon yang berbeda. Kecuali Susilo Bambang Yudoyono, semua calon presiden dan wakil presiden adalah muka lama meskipun selama ini tidak berada di puncak elit partai politik. Sebut saja Marwah daud Ibrahim, Siswono Yudhohusodo, dan Hasyim Muzadi. Untuk memahami peta kekuatan masing-masing capres perhatikan tabel 1.

³⁸ Kompas, Selasa, 29 Nopember 2001

Tabel 1

Peta Calon Presiden

Faktor	Mega-Hasyim	Wiranto-Sholahuddin	Susilo-Kalla	Amin-Siswono	Hamzah-Agung	Gus Dur-Marwah	Undecided
Impresario	Mega Center (para pentero dan konglomerat)	Wiranto Circle (Menteri Golkar dan konglomerat)	Konglomerat	The Amin Rais Centre	Wapres Centre	Masyarakat Antidiskriminasi dan Iramasuka)	Tidak ada
Internasional	Dukungan IMF / WB	Tekanan PBB/ UNTAET	Dukungan AS	Barat "wait and see"	Tekanan AS/isu terorisme	King Maker	Tidak Ada
Think Tank	Rizal Mallarangeng Sri Mulyani	Fahrul Rozi, Suaidi Merasabessy, Rizal Ramli	Rahmat Witoclar, Irzan Tanjung, Sri Soemantri	Bambang Soedibyo, Rizal Sukma	Ali Marwan Hanan, Laode Kamaluddin	Tidak ada	Tidak adMahmud MD dan Tim Sembilana
Operator	Hermawan Sulistyo,Ratna Sarumpaet	Tito Sulistio, Hariman Siregar,Rambe Kamarulzaman	Usmah Hisyam, Yaniwahid	Hatta Rajasa, Jumhur Hidayat	Lukman Hakim S, Endin J Soefihara	Khofifah Indar Parawansa, Iman Nachrawi	Tidak ada
Masis Massa	Tim Mega, Presiden/struktural, promeg/FKR/WKR/ BMI	AMPG, KIMPG, API	Pro SBY, KIP SBY, Fans Club SBY	KAMAR, GENBI	GPK	Garda Bangsa, GMNU	Tak ada
Isu/Citra	Sukses ekonomi,	Pemerintahan kuat,	Kecamatan,	Reformasi, Anti	Aspirasi umat,	Kebchasan sipil,	Tak ada

	kebijakan populis, anti militerisme	Nasionalisme	Kesejahteraan	Korupsi	stabilitas Nasional	persamaan hak	
Isu negatif	Status Quo	Militerisme	Antek Asing	Fundamentalisme	Oportunisme	Anarkisme	Tak ada
Pendukung	PDIP, PDS, sebagian NU	PG, PPNUJ, PDK, PKPB, Patriot, PPD, sekaligus PKB	PD, PBB, PKPI, PPDI, sebagian PG	PAN, PSI, PBR, PNI, PNBK, PBSB, Merdeka	PPP	PKB	PKS, PIB, Pelopor, Golput
Kan suara	PDIP: 18,53%, PDS: 2,13 %, sebagian NU: ? Total: 20,66%	PG: 21%,PPNUJ: 0,79%, PDK: 1,16%, PKPB: 2,11%, Patriot: 0,95 %, PPD: 0,58 %, Sebagian PKB: ? Total: 27,17%	PD: 7,45%, PBB: 2,62%, PKPI: 1,26 , PPDI: 0,75%, Sebagian PG: ?, Total: 12,08 %	PAN: 6,44%,PSI:0,60%,PB R:2,44%,PNI:0,81%, PNBK:1,08%, PBSB:0,56%, Merdeka: 0,74%, Total: 12,67%	PPP: 9,15% Total: 9,15%	PKB: 10,57% Total:10,57%	PKS: 7,34%, PIB: 0,59%.Pelopor: 0,77%,Golput: 23,34%, pendukung Gus Dur (jika gagal melaju): ?, Total:32,04%

Sumber: Saksi, No. 16 Tahun VI, 9 Juni 2004

Gerakan Anti Politisi Busuk

Sejak diluncurkan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin 29 Desember 2003, Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk mendapat sambutan hangat dari kalangan akademisi, budayawan, seniman, dan mahasiswa. Gerakan yang dipicu oleh meluasnya praktik korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat produk Pemilu 1999. Latar belakang gerakan ini, masyarakat diimbau untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) di parlemen, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta calon presiden-wakil presiden yang dinilai bermasalah.

Mereka yang masuk kategori politisi bermasalah, menurut Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk (GNJPPB), adalah mereka yang terlibat korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, perusakan lingkungan, kejahatan terhadap perempuan, dan terlibat kasus narkoba. Sebanyak 14 partai politik (parpol) yang memiliki kepentingan langsung terhadap isu politisi bermasalah pun ikut mendukung. Mereka adalah PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Islam Indonesia (PII), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Partai Merdeka, Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Pelopor, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Sarikat Indonesia (PSI). Pada 19 Januari lalu, di Jakarta, sejumlah caleg muda delapan parpol di bawah usia 30 tahun mendeklarasikan Aliansi Caleg Muda Hadang Politisi Busuk. Mereka mewakili

PNBK, Partai Merdeka, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, PKB, Partai PDK, dan Partai Damai Sejahtera.

Istilah dan pengertian politisi bermasalah pun berkembang seiring dengan penambahan atau perubahan kriteria tentang politisi bermasalah seperti disodorkan GNJPPB. Bola bergulir. Mereka mulai menyebut politisi dan parpol bermasalah. BEM Universitas Indonesia (UI) membuat daftar 100 caleg terburuk dan 5 parpol bermasalah-di antaranya Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) mencatat 35 politisi bermasalah, seperti Akbar Tandjung, Nurdin Halid, dan Wiranto, sementara mantan Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja masih diperdebatkan. Munir dari Lembaga Monitoring HAM, Imparsial, menyebut Arifin Panigoro, Nurdin Halid, Akbar Tandjung, dan Muchtar Pakpahan. Di Makassar, Koalisi Masyarakat Sulawesi Selatan Menolak Politikus Busuk menyebut Nurdin Halid, Andi Ghalib, Akbar Tandjung, Wiranto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana, dan Taufik Kiemas masuk barisan politisi bermasalah. Nama Akbar Tandjung, Wiranto, dan Nurdin Halid kian populer di antara gerakan antipolitisi bermasalah. Ini tentu saja membuat Partai Golkar merasa kampanye ini ditujukan terutama kepada mereka. Tak heran ketika terjadi bentrokan antara polisi dan para pengunjung rasa antipolitisi busuk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 12 Januari lalu, kalangan LSM dan aktivis mahasiswa menuding polisi memihak partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun, tampaknya peristiwa ini tidak membuat jera gerakan. Partai Rakyat Demokratik (PRD), 26 Januari lalu, kembali

mengumumkan 15 nama politisi dan 9 parpol bermasalah, sementara GNJPPB masih memilih menunggu reaksi publik terhadap daftar caleg yang diumumkan KPU.³⁹

Sedangkan elemen mahasiswa yang bergabung dalam Forum Mahasiswa Indonesia mematok delapan kriteria sebagai politisi busuk (Tabel 1). Mereka bersama dengan LSM kemudian menyebut beberapa politisi yang dianggap masuk dalam kriteria politisi busuk. (Tabel 2)⁴⁰

Tabel 1.

Kriteria Politikus Busuk Versi Forum Mahasiswa Indonesia	
1	Terlibat Korupsi
2	Melakukan Kejahatan HAM
3	Tidak Peduli Lingkungan
4	Tidak Memiliki Moral dan Intelektual
5	Tidak Peduli Terhadap Nasib Pendidikan Nasional
6	Tidak Peduli Nasib Pekerja dan Rakyat Miskin
7	Menjual Aset-aset Kekayaan Bangsa
8	Bermental Orba dan Berselingkuh dengan Orba.

³⁹ www.kompas.com, Kamis, 29 Januari 2004

⁴⁰ Saksi, No. 7 Tahun VI, 4 Februari 2004

Tabel 2.

Politikus Busuk Versi Mahasiswa dan LSM

NO	NAMA POLITIKUS	KETERANGAN
1	Megawati Soekarnoputri	Presiden RI dan Ketua Umum PDIP Perjuangan
2	Akbar Tanjung	Ketua DPR-RI dan Ketua Umum Partai Golkar
3	Siti Hardiyanti Rukmana	Mantan Menteri Sosial di jaman Orba
4	Wiranto	Mantan Menteri Pertahanan di jaman Orba
5	Prabowo Subianto	Mantan Danjen Kopassus
6	Yunus Yosfiah	Mantan Menteri Penerangan di Jaman Orba
7	Sutiyoso	Gubernur DKI Jakarta

Poros Penyelamat Bangsa: Manuver Amin-Hidayat

Kedigjayaan politik yang terbangun melalui koalisi PPB ini ternyata tidak terlalu membesarkan hati, berdasar dua pertimbangan pokok. *Pertama*, dari segi perolehan suara, total suara pemilih yang telah dihitung melampaui tonggak 50 persen. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bergabungnya parpol Islam teman lama dalam Poros Tengah tahun 2000. Jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB) bergabung atas dasar persaudaraan sesama Muslim, maka terbuka kemungkinan membangun suatu *green and grand coalition*, koalisi Muslim berbasis luas.

Kedua, kemungkinan besar harapan ini tidak terwujud. Alasannya, selain PBB, dua parpol berbasis Muslim lainnya, PKB dan PPP, masing-masing sudah menyiapkan pasangan presidensial. Apalagi perolehan suara dua parpol terakhir ini lebih besar daripada PKS maupun Partai Amanat Nasional (PAN). Kalaupun harapan ini terwujud, koalisi hasil kutak-katik elite Muslim ini belum tentu diamini pemilih Muslim terdidik kota. Sebagian Muslim pemilih di pedesaan bisa saja digiring untuk mendukung pasangan presidensial poros PPB. Jika PKB yang berbasis *wong cilik* pedesaan tidak ikut bergabung, kecil sekali proporsi pendukung yang dapat diharapkan Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid. Penggalangan poros-porosan seperti ini hanya efektif dalam sistem pemilihan pasangan presidensial secara tak langsung. Ada beberapa kerentanan politik yang menimpa PKS begitu berkoalisi dengan PAN. *Pertama*, tererosinya citra PKS sebagai parpol alternatif pembawa perubahan atas status quo. Bersama PBB, PPP, PDI-P, dan PAN adalah parpol status quo. Sejumlah tokoh PAN ikut dalam kabinet Abdurrahman Wahid (Gus Dur) maupun Megawati Soekarnoputri. *Kedua*, dalam koalisi Poros Tengah, PAN yang dinakhodai Amien Rais, yang paling bertanggung jawab atas macetnya reformasi. Koalisi parpol berbasis Muslim inilah yang mendongkrak Gus Dur ke kursi kepresidenan untuk dijatuhkan dua tahun kemudian. Hampir tiga tahun momentum emas reformasi terbuang percuma, disia-siakan *cowboy* Senayan. Jika kesalahan petualangan itu terulang lagi, bukan tidak mungkin koalisi PPB akan tercatat dalam sejarah Indonesia modern sebagai "Poros Penjerumus Bangsa".

Ketiga, koalisi PKS-PAN hampir pasti akan menuai protes dari Muslim terdidik di kota-kota di Jawa dan Sumatera yang melarikan suaranya ke PKS karena kecewa terhadap PAN yang memeragakan politik *mencla-mencla*. PAN dianggap tidak konsekuen, jauh dari karakter politisi demokrat sejati karena tersandung dua batu ujian. *Pertama*, saat berbalik melawan presiden usungannya sendiri. *Kedua*, saat surut dari gagasan federalisme yang sempat dilontarkan ke publik oleh Amien Rais. Pimpinan PKS dapat dianggap mengkhianati amanat yang baru saja diserahkan 10 hari lalu. Pada 5 Juli, para pemilih PKS bisa saja melarikan suaranya kepada pasangan presidensial yang lebih teguh dalam memegang amanat. Sayang, bila satu dari dua kuda hitam 5 Juli 2004 sampai mulai diragukan karena melakukan *unforced error*.

Keempat, kerentanan koalisi PKS-PAN amat mungkin datang dari kekhawatiran kelompok non-Muslim dalam negeri, khususnya Indonesia timur, dan memperkuat kesan Islam garis-keras di kalangan pemerintah negara-negara Barat. Kecuali dalam kasus bencana alam di Papua Barat, umumnya Pos Keadilan, yang digalang Partai Keadilan semasa konflik komunal dengan kekerasan di Maluku, Maluku Utara, dan Poso, hanya membantu kelompok korban Muslim. Keadilan yang tampil adalah keadilan partisan, bukan keadilan kemanusiaan lintas batas. Kenyataan, baik PKS maupun Partai Damai Sejahtera (PDS) meraih suara signifikan di Maluku 5 April lalu cukup memprihatinkan sekaligus mengindikasikan bagaimana segregasi sosial menampilkan diri dalam wujud segregasi politik yang kian mengemuka. Penegasan Hidayat Nur Wahid (Kompas, 10/4/2004): semakin Islami berarti semakin menciptakan rasa aman

nyaman bagi semua orang termasuk warga non-Muslim, harus didukung amal nyata di masa datang.

Begitu pula PAN, khususnya Amien Rais, yang amat kuat dihubungkan dengan keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kehadiran ICMI memacu tumbuhnya ikatan cendekiawan serupa di kalangan non-Muslim. Juga sempat membuat khawatir para pengusaha etnis Tionghoa. Berbagai konfrontasi terbuka Amien Rais dengan Dubes AS sebelumnya tidak mudah pupus dari benak penguasa Barat. Singkatnya, koalisi PPB dapat dipersepsikan sebagai koalisi yang membangun tembok sosial pemisah dan bukan kekuatan yang pluralis-inklusif.

Dengan terkonsolidasinya koalisi PPB antara PKS dan PAN-yang hampir pasti mengajukan pasangan presidensial Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid-maka terbuka kemungkinan pembangunan koalisi antarpol lengkap dengan pasangan presidensial masing-masing. *Pertama*, Golkar mempunyai dua opsi, berkoalisi dengan PPP, seperti marak dilakukan di beberapa daerah seperti Banten dan beberapa provinsi di Sulawesi, atau merangkul Partai Demokrat yang mempunyai kandidat potensial, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Koalisi dengan PPP besar kemungkinan akan direstui para pemilih Muslim, baik di perkotaan dan pedesaan di Jawa dan luar Jawa. Batu sandungan koalisi ini, siapa kandidat yang mau disandingkan? Bila sosok bermasalah dari Golkar yang dicalonkan untuk RI-1 berpasangan dengan siapa pun dari PPP, kecil peluang pasangan ini lolos ke grand final, 20 September 2004 sekaligus memperbesar

peluang pasangan Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid dari koalisi PPP. Hal yang sama berlaku bila figur bermasalah Golkar berpasangan dengan SBY dari Partai Demokrat. Pasangan paling ideal hasil koalisi Golkar dengan Partai Demokrat adalah SBY dengan Jusuf Kalla (JK) masing-masing sebagai kandidat RI-1 dan RI-2. Sudah waktunya Golkar membalas budi SBY yang berperan besar baik dalam kesuksesan Akbar Tandjung atas rivalnya dalam Golkar maupun dalam kemenangan Golkar dalam Pemilu 2004.

Kedua, opsi bagi PDI-P amat terbatas. Bila tidak berhasil merayu PPP dengan Hamzah Haz untuk berkoalisi, Megawati harus bisa menggaet tokoh jemaah NU atau tokoh Muhammadiyah, seperti Buya Syafii Maarif lebih menjanjikan. Yang disebut terakhir merupakan representasi Indonesia bagian barat, khususnya Sumatera Barat. Dengan menggandeng Prof Syafii Maarif, Megawati sekaligus dapat meraup suara kalangan Muhammadiyah secara nasional. Berpasangan dengan salah satu tokoh Golkar yang bermasalah, tetap mengandung risiko menyusutkan perolehan suara. Satu-satunya kandidat Golkar yang tidak bermasalah dan besar kemungkinan mau berperan sebagai RI-2 adalah Jusuf Kalla. Terlihat di sini, pada tingkat parpol, PPP amat diminati ketiga parpol kaya suara, sedangkan pada tingkat kandidat, SBY dan JK akan diperebutkan banyak peminat.

Terakhir, opsi yang tersedia bagi PKB juga terbatas, terutama karena ngototnya Abdurrahman Wahid untuk kembali tinggal di Istana Merdeka. Kecuali PPP, semua partai kaya suara seperti Golkar, PDI-P, dan partai kuda

hitam Partai Demokrat, jelas ogah untuk menerima kursi RI-2. Pantang mundurnya Gus Dur saat ini lebih merupakan *political liability* (beban politik) yang menyusahkan PKB dan kancah perpolitikan Indonesia daripada suatu aset politik. Apalagi setelah dengan beberapa tokoh mencoba menolak suara Tuhan yang berbicara melalui suara rakyat. Penolakan itu, sama jenis kesalahannya dengan lompatan kuda hitam PKS bergabung dengan PAN, adalah wujud lain *unforced error*.⁴¹

Kontroversi UU Parpol dan RUU Pemilu

Partai Keadilan (PK) bersama dengan 14 partai politik lainnya menyampaikan resolusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) politik, yakni RUU Parpol dan RUU Pemilu yang masih memiliki banyak kekurangan. Ke-15 parpol itu adalah PK, Partai Masyumi, Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Nahdlatul Umat (PNU), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Katolik Demokrat (PKD), Partai Daulat Rakyat (PDR), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Persatuan (PP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), PNI Massa Marhaen, PNI Front Marhaenis, dan Partai Kebangkitan Umat (PKU).

Keseluruh partai ini juga mendesak Mahkamah Agung segera menyelesaikan masalah partai politik yang melanggar aturan Pemilihan Umum

⁴¹ Lihat opini Tamrin Amal Tomagola, *Berpacu dalam Koalisi*, dalam Kompas, Kamis, 15 April 2004

(pemilu). Begitu pula mereka tidak setuju dengan pembatasan administrasi yang membatasi peserta pemilu dengan ketentuan harus berada di duapertiga provinsi dan duapertiga kabupaten di setiap provinsi. Ketentuan itu dianggap tidak sesuai dengan cita-cita otonomi dari sudut pandang politik.

Namun dalam perkembangannya, hanya lima partai berbasis Islam saja yaitu PII Masyumi, Partai Nahdlatul Umat, Partai Kebangkitan Umat, Partai Islam Indonesia, dan Partai Al Islam Sejahtera Indonesia pada Kamis 27 Maret 2003 kemarin, mendaftarkan permohonan hak uji UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Agung. yang dimintakan hak uji ke MA meliputi 10 pasal di UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ia mencontohkan Pasal 7, 9, 142, dan 143 UU Pemilu yang mengatur persyaratan ikut pemilu bertentangan dengan Pasal 22E dan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kesetaraan dan keadilan. Sementara Partai Keadilan yang semula akan bergabung membatalkan niatnya.⁴²

III.4. Pemerintahan SBY

Koalisi kerakyatan Vs Koalisi Kebangsaan

Koalisi Kebangsaan plus Partai Kebangkitan Bangsa pada 28 Oktober 2004 telah menguasai 10 komisi di DPR. Dalam sidang-sidang yang tidak dihadiri lima fraksi pro-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "pemilihan" ketua komisi berjalan tanpa hambatan. Hanya satu komisi, yakni Komisi VIII, yang

⁴² www.kompas.com, Jumat, 28 Maret 2003

membidangi agama, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan, belum ditentukan kepemimpinannya.

Penentuan pemimpin komisi ini merupakan langkah lanjutan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera) plus PKB yang "meninggalkan" fraksi-fraksi lainnya. Kubu ini telah lebih dulu mengubah ketentuan kuorum persidangan, yang mensyaratkan ketentuan jumlah fraksi yang hadir. Berbagai langkah itu leluasa dilakukan karena anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi—dikenal dengan Koalisi Kerakyatan—tetap memboikot persidangan.

Alhasil, Golkar mendapatkan lima kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua. PDIP memperoleh empat kursi ketua komisi dan sembilan wakil ketua. Adapun PKB memperoleh satu kursi ketua dan sembilan wakil ketua. Sementara itu, PBR dan PDS memperoleh masing-masing satu wakil ketua. Dua anggota Fraksi PAN yang hadir sebagai pribadi dalam sidang pun "dihadiah" dua kursi wakil ketua, yakni Alvin Lie (Komisi VII) dan Sujud Surojudin (Komisi IV).⁴³

Koalisi Kebangsaan di atas kertas memiliki suara mayoritas. Mereka setidaknya terdiri dari Partai Golkar (127 kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109), Partai Persatuan Pembangunan (58), Partai Damai Sejahtera (13). Kekuatan lainnya, antara lain, Partai Demokrat (56), Partai Amanat Nasional

⁴³ Tempo, Jum'at, 29 Oktober 2004

membidangi agama, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan, belum ditentukan kepemimpinannya.

Penentuan pemimpin komisi ini merupakan langkah lanjutan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera) plus PKB yang "meninggalkan" fraksi-fraksi lainnya. Kubu ini telah lebih dulu mengubah ketentuan kuorum persidangan, yang mensyaratkan ketentuan jumlah fraksi yang hadir. Berbagai langkah itu leluasa dilakukan karena anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi--dikenal dengan Koalisi Kerakyatan—tetap memboikot persidangan.

Alhasil, Golkar mendapatkan lima kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua. PDIP memperoleh empat kursi ketua komisi dan sembilan wakil ketua. Adapun PKB memperoleh satu kursi ketua dan sembilan wakil ketua. Sementara itu, PBR dan PDS memperoleh masing-masing satu wakil ketua. Dua anggota Fraksi PAN yang hadir sebagai pribadi dalam sidang pun "dihadiah" dua kursi wakil ketua, yakni Alvin Lie (Komisi VII) dan Sujud Surojudin (Komisi IV).⁴³

Koalisi Kebangsaan di atas kertas memiliki suara mayoritas. Mereka setidaknya terdiri dari Partai Golkar (127 kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109), Partai Persatuan Pembangunan (58), Partai Damai Sejahtera (13). Kekuatan lainnya, antara lain, Partai Demokrat (56). Partai Amanat Nasional

⁴³ Tempo, Jum'at, 29 Oktober 2004

(53), Partai Keadilan Sejahtera (45), Partai Kebangkitan Bangsa (52), Partai Bulan Bintang (11), dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (1).⁴⁴

Lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan menyatakan, segala keputusan yang diambil dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya dihadiri oleh lima fraksi tidak sah karena sesuai tata tertib DPR rapat tersebut tidak memenuhi kuorum untuk dapat mengambil keputusan. Siang tadi, koalisi kerakyatan yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, kembali memboikot sidang paripurna DPR. Sidang dihadiri oleh 309 anggota 547 anggota dari unsur lima fraksi. Lima fraksi yang hadir adalah Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS), dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR).⁴⁵

Perebutan Pimpinan MPR

Koalisi Kerakyatan akhirnya bisa mematahkan dominasi partai-partai besar yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan. Melalui voting, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berhasil mengungguli pesaingnya, Sutjipto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan selisih hanya dua suara, sehingga terpilih menjadi Ketua MPR periode 2004-2009. Hidayat Nur

⁴⁴ Kompas, Selasa, 28 September 2004

⁴⁵ Kompas, Rabu, 27 Oktober 2004

Wahid mendapat dukungan 326 suara, sedangkan Sutjipto 324 suara. Adapun suara abstain sebanyak 13 dan suara tidak sah 10. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang hadir dalam rapat paripurna tersebut berjumlah 673 orang. Dua anggota tidak hadir. Sidang dipimpin pimpinan sementara MPR, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita. Pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan sistem paket.

Berdasarkan usulan fraksi- fraksi terdapat dua paket calon. Paket A terdiri atas ketua Sutjipto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan tiga wakil ketua, yakni Theo L Sambuaga (Fraksi Partai Golkar/PG), Sarwono Kusumaatmadja (DPD DKI Jakarta) dan Aida Ismeth (DPD Kepulauan Riau). Paket B adalah Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan tiga wakil ketua, yaitu AM Fatwa (Fraksi Partai Amanat Nasional), Aksa Mahmud (DPD Sulawesi Selatan), dan Mooryati Soedibyo (DPD DKI Jakarta). Paket A diusulkan dua fraksi, yaitu F-PG (Partai Golkar, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Karya Peduli Bangsa) dan F-PDIP (PDI-P dan Partai Damai Sejahtera). Mereka adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan. Paket B diusulkan enam fraksi yang sering menamakan diri Koalisi Kerakyatan, yaitu Fraksi Partai Demokrat (Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme, Partai

Penegak Demokrasi Indonesia). Kelompok DPD sesungguhnya mengusulkan enam anggotanya untuk dipilih fraksi-fraksi. Namun, hanya empat yang dipilih sebagai calon pimpinan MPR. Dua nama yang tidak terpilih adalah Ichsan Loulembah (DPD Sulawesi Tengah) dan Yopie Sangkot Batubara (DPD Sumatera Utara). Ketika kertas suara tinggal sepuluh, Sutjipto masih memimpin dengan 324 suara. Namun setelah itu, suara Sutjipto terkunci dan akhirnya disalip Hidayat hingga 326 suara.⁴⁶

Kebijakan Tidak Populis

Menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, fraksi-fraksi di DPR mendesak pimpinan Dewan segera menggelar rapat paripurna untuk menyikapi hal tersebut. Sebagian fraksi berencana akan menggunakan hak-hak DPR, seperti angket dan interpelasi, untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat. Ribuan mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota di Tanah Air juga menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dinilai semakin mencekik kehidupan perekonomian rakyat. Sementara itu, ribuan sopir di berbagai kota melakukan aksi mogok sehingga warga kesulitan mendapatkan angkutan umum. Di Jakarta mahasiswa dan berbagai elemen lainnya, yang berunjuk rasa, dalam orasi-orasinya menilai kebijakan pemerintah itu tidak prorakyat.⁴⁷

⁴⁶ Kompas, Kamis, 7 Oktober 2004

⁴⁷ Kompas, Rabu, 02 Maret 2005

Lima fraksi di DPR, mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kenaikan harga BBM. Kelima fraksi juga mengingatkan, dalam rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan presiden yang rencananya digelar Senin ini pukul 19.00, DPR tidak mengambil keputusan apa-apa. Kenaikan harga BBM, menurut Dradjad, tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli masyarakat.

Anggota FPAN sekaligus Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo mengatakan,

“Akibatnya akan menimpa rakyat yang berada di atas garis kemiskinan namun sangat rentan untuk menjadi miskin. Masyarakat golongan ini lebih besar dari masyarakat miskin. Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan mereka yang rentan akan benar-benar menjadi miskin. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin malah bertambah, bukan berkurang, dengan kenaikan harga BBM,”⁴⁸

Desakan terhadap pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak semakin kuat. Selain mendapat penolakan keras dari masyarakat, mayoritas fraksi di DPR secara resmi menolak kebijakan yang tidak populis itu. Meski demikian, secara kelembagaan DPR belum mengambil keputusan atas kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga BBM per 1 Maret 2005.

Dalam rapat paripurna 15 Maret 2005, enam dari 10 fraksi yang ada di DPR meminta pemerintah mencabut, membatalkan, atau meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dua fraksi memahami kebijakan pemerintah, dan dua fraksi

⁴⁸ Kompas, Senin, 14 Maret 2005

mengambang. Enam fraksi yang menolak kenaikan harga BBM adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS). Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR) menggunakan istilah meninjau kembali.⁴⁹

Setelah mengalami perdebatan sengit Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005 melalui voting karena terlalu banyak perbedaan pendapat. Dengan keputusan itu, berarti DPR menyetujui subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 89,2 triliun, yang otomatis berimplikasi pada naiknya harga BBM.

Hasilnya, 273 suara setuju menjadikan RUU Perubahan Kedua APBN 2005 menjadi UU, 83 suara tidak setuju, dan 31 suara lainnya abstain. Sebagian besar suara setuju berasal dari Partai Golkar (118 suara) dan Partai Demokrat, sedangkan suara tidak setuju berasal dari Fraksi PDI-P (80 suara).

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan, dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, enam fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Bintang Reformasi, Fraksi Damai Sejahtera, dan Fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU APBN Perubahan Kedua Tahun 2005, sekaligus rencana pemerintah menaikkan harga BBM guna menutupi defisit anggaran.

⁴⁹ Kompas, Rabu, 16 Maret 2005

Hanya Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang secara tegas menentang kenaikan harga BBM, tetapi PPP setuju RUU dijadikan UU. Fraksi Partai Amanat Nasional meminta pengesahan RUU APBN ditunda sampai 30 September setelah pemerintah menyampaikan skema penyesuaian harga BBM. Fraksi Kebangkitan Bangsa memilih tidak bersikap dengan mengatakan, akan mencermati keadaan lebih lanjut.⁵⁰

Kebijakan tidak populis pemerintahan SBY-JK yang lain adalah impor beras. Kebijakan ini membuat anggota DPR mengusulkan hak angket. Bisa dipahami karena kebijakan ini cukup kontroversial ditengah kesimpangsiuran data stok beras nasional yang berbeda versi antara Badan Ketahanan Pangan Nasional dan data dari Bulog. Dalam rapat paripurna DPR 17 Januari 2005, penjelasan pengusul hak angket dan hak interpelasi akhirnya dibacakan setelah disetujui melalui proses voting. Sebanyak 207 suara berasal dari F-PDIP (83 suara), F-PAN (41), F-PKS (33), F-PPP (29), F-PDS (9), F-KB (8), dan F-BPD (4) setuju usul itu dibacakan. Sementara, tidak setuju berjumlah 167 suara berasal dari F-PG (111 suara), F-PD (45), F-BPD (6), dan F-PBR (5). Hasil ini tentu mengecewakan fraksi pendukung pemerintah, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Partai Golkar (F-PG).

Anggota F-PG Priyo Budisantoso menyebut PKS dan PPP tidak mengerti fatsun politik. Menurutnya, sebagai partai yang ada wakilnya di pemerintahan semestinya PKS dan PPP ikut mengawal kebijakan pemerintah. Pendapat ini

⁵⁰ Kompas, Rabu, 28 September 2005

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dibantah anggota F-PKS Suryama. Dia menilai pernyataan Priyo terlalu mengada-ada. Suryama balik menuding Priyo sedang mencari kambing hitam dengan menyalahkan Menteri Pertanian Anton Apriantono yang berasal dari PKS.⁵¹



⁵¹ Kompas, Rabu 25 Januari 2005

BAB IV**PRAKSIS POLITIK PKS****IV.1. Periode Gerakan Ekstraparlementer : Dari Gerakan Bawah Tanah
menuju Formalisasi Gerakan****Bertahan di Bawah Represi Rezim Soeharto**

Dari awal kemunculannya, pola gerakan Tarbiyah menggabungkan antara kecenderungan purifikasi dan akomodasi. Gerakan ini juga menjadi titik pertemuan antara kelompok tradisional yang menginginkan penyempurnaan praktik-praktik agama yang lebih ortodok dan kelompok pendukung purifikasi yang mulai memandang pentingnya gaya yang lebih akomodatif dan fleksibel dalam praktiknya.⁵² Dengan peran tersebut, maka disukai atau tidak gerakan Tarbiyah harus memerankan diri dalam bentuk yang lebih akomodatif sebagai usaha mempromosikan ide-ide Islamnya agar bisa diterima, baik di level masyarakat maupun negara.⁵³

Berusaha mengklasifikasikan gerakan Tarbiyah dalam dua kutub yang bertolak belakang seperti halnya kultural-struktural atau legal formalis-subsansialisasi menemui kesulitan karena pada dasarnya gerakan Tarbiyah berusaha memainkan dua peran itu sekaligus. Di sinilah kemudian realitas politik memaksa untuk melakukan pendekatan yang lebih realistis, dalam arti tetap memperjuangkan cita-cita politik tapi tampilan dan warna Islam disesuaikan

⁵² Machmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung : Harakatuna Publishing, 2005, hal. 33

⁵³ *Ibid*, hal.35

dengan kondisi yang ada. Pendekatan yang kadang dibaca 'pragmatis' ini dilakukan karena merupakan pilihan rasional dalam realitas politik Indonesia.⁵⁴

Dalam menghadapi represi pemerintah Orde Baru, para aktivis gerakan Tarbiyah memilih strategi perlawanan dari dalam; represi rezim tidak perlu disikapi secara frontal tetapi dilawan melalui pembinaan diri. Perlawanan gerakan Tarbiyah yang dilakukan dari dalam ini memiliki dua tujuan, melawan hegemoni ideologi rezim dan radikalisasi gerakan. Dalam pembinaan yang dilakukan dengan model tarbiyah ketidaksetujuan terhadap hegemoni rezim dimanifestasikan dalam bentuk pendalaman prinsip-prinsip Islam pada diri para kader yang secara tidak langsung telah melemahkan kebijakan Asas Tunggal itu tanpa harus menentang dengan kekuatan frontal. Bahkan pada isu-isu lain, para aktifis Tarbiyah ini sengaja menghindari metode konfrontasi itu.

Di sisi lain, pendekatan yang mengedepankan pembentukan dan penguatan diri dari dalam ini ternyata juga mampu meredam sifat konfrontatif dalam diri kader dan sekaligus menjauhkan mereka dari gerakan-gerakan lain yang lebih radikal.⁵⁵ Dua hal inilah yang kemudian membangun imunitas dalam diri para aktivis Tarbiyah. Salah satu pionir gerakan Tarbiyah, Rahmat Abdullah menjelaskan latar belakang sikap ini:

"Kelompok kita (Tarbiyah, *pen*) imun dari hal-hal yang demikian (radikal) karena kita berusaha untuk tidak memiliki titik sentuh dengan mereka. Kalau nyaris-nyaris ketemu mungkin secara personal. Akan tetapi, lama-lama kan mengkristal di mana masing-masing mencari lahan sendiri. Kadang saling komunikasi, tetapi kemudian kita tinggalkan karena ternyata rezim itu menggaruk tanpa alasan. Dari pengalaman yang ada hampir tidak pernah ada yang menimpa kita bahkan ketika awal 90-an terjadi

⁵⁴ *Ibid.* hal. 39

⁵⁵ *Ibid.* hal.43-45

penggerebakan di Puncak, massa kita tidak pernah mengalami. Karena ada semacam penjagaan diri dari titik sentuh mereka. Daripada kita mengambil kader-kader yang nantinya bermasalah di lain hari, lebih baik mengambil yang *blank* yang dapat kita isi”

Tekanan yang sangat kuat dari rezim pada akhirnya membuat model perlawanan frontal yang dikembangkan beberapa kelompok Islam seperti DI (Darul Islam) mengalami kegagalan yang berdampak buruk terhadap dakwah Islam. Pemerintah dengan keras berusaha menghancurkan tiap potensi oposisi yang dianggap mengancam keberadaannya. Kelompok-kelompok Islam *mainstream* lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah, dianggap terlalu tunduk pada keinginan pemerintah. Lahirnya pendekatan baru sebagai upaya menyelesaikan problematika umat Islam dengan pola yang lebih terstruktur mendapat sambutan besar terutama di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini kemudian menarik banyak pihak dalam menyalurkan kekecewaan terhadap pemerintah secara lebih konstruktif.

Disinilah kemudian model tarbiyah menjadi salah satu alternatif di antara kebekuan sarana dan aktifitas organisasi-organisasi Islam yang ada pada waktu itu. Memang strategi menarik diri (*withdrawal*) dari hiruk pikuk politik lokal pada akhirnya menjadi pilihan yang harus diambil.⁵⁶

Menuju Keterbukaan Dakwah

Momen keterbukaan politik yang diawali sejak dekade 1990-an telah menjadikan dakwah model tarbiyah ini semakin luas. Di sisi lain, proses tarbiyah yang berjalan dalam kurun waktu tertentu telah melahirkan dua kesadaran penting.

⁵⁶ *Ibid.* hal. 53

Pertama, kesadaran menyangkut apa yang harus dilakukan untuk dirinya, untuk memperbaiki mental, spiritual, akhlak dan keseluruhan dirinya. *Kedua*, muncul kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk entitas yang lebih luas.⁵⁷

Dua kesadaran diatas ditambah lagi mekanisme amal jama'i yang terbangun dalam kelompok mereka menghasilkan beberapa *wajah aam* (penampakan umum) yang berbentuk lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Berbagai lembaga yang dibuat ini memiliki semangat yang sama: menjadikan nilai-nilai Islam sebagaimana dikonstruksi dalam pemahaman mereka sebagai semangat nilainya dan mempublikasikannya dengan cara masing-masing.

Berbagai lembaga itu antara lain Nurul Fikri (lembaga bimbingan belajar yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam integral), Sabili (majalah Islam), Khairul Ummah (lembaga dakwah), Al Hikmah (lembaga pendidikan Islam—Ma'had), SIDIK (lembaga pengkajian dan pemikiran), Penerbit buku *harakah* (Gema Insani Press, Pustaka al Kautsar, Robbani Press, ddi), *Nasyid* (kesenian alternatif Islam).⁵⁸

Keterbukaan politik yang diawali pemerintah ini, ditambah dengan kecenderungannya mengakomodasi kepentingan umat Islam juga membawa angin segar bagi dakwah-dakwah di kampus. Bagi gerakan Tarbiyah, era keterbukaan ini membawa berkah yang luar biasa untuk ekspansi gerakan di kampus-kampus. Pola *withdrawal* yang dimulai pertengahan era 1980-an tidak lagi dilakukan. Sebaliknya, usaha-usaha untuk kembali (*return*) berpartisipasi dalam dinamika

⁵⁷ Damanik, Ali Said, *Partai Keadulan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hal. 150

⁵⁸ *Ibid.* hal.153-175.

politik dan sosial Indonesia semakin terbuka. Aktifis-aktifis gerakan ini pun mulai meluaskan sayapnya dengan menguasai puncak kepemimpinan organisasi senat mahasiswa. Satu persatu organisasi eksekutif mahasiswa pun dikuasai oleh komunitas Tarbiyah ini. Dimulai dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM), kemudian meluas sampai ke kampus-kampus lainnya di Jawa dan luar Jawa.⁵⁹

IV.2. Periode Intraparlementer : Menjadi Kekuatan Politik Islam Formal

Terbukanya kran partisipasi politik bersamaan dengan bergulirnya reformasi pada 21 Mei 1998 telah memberikan peluang yang lebih besar bagi aktivis gerakan Tarbiyah. Para aktivis gerakan ini memaknai proses reformasi yang terjadi sebagai *Harakatul Ishlah* (gerakan perbaikan) yang merumuskan buah dari komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan. Karena partisipasi mereka dalam gerakan reformasi ada dalam konteks implementasi dari komitmen dan cita-cita dakwah mereka, yang telah menemuk jalan panjang dan berliku.

Karena itu, mendirikan partai untuk para aktivis dakwah ini ada dalam kerangka mengembangkan komitmen dan meraih cita-cita dakwah itu dalam tahap lanjut. Di satu sisi, disadari ada momentum yang harus dimanfaatkan sebagai salah satu karunia Allah Swt. Dan di sisi lain ada kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang ada, dan menatannya dalam sebuah barisan

⁵⁹ Mahmudi, *Op.cit.* hal. 55-56

yang lebih teratur dan sistematis, untuk melakukan akselerasi dalam proses dakwah itu sendiri.

Atas dasar pemahaman itulah mereka lebih memilih mengkonsolidasi kekuatan riil mereka sendiri dan menghimpunnya dalam satu wadah, ketimbang mereka berhimpun dengan banyak kelompok lain dalam satu partai—seperti dalam Partai Bulan Bintang—yang boleh jadi tarik-menarik kepentingannya yang terlalu kuat, membuat misi dan akselerasi dakwah yang mereka inginkan justru terhambat.⁶⁰

Proses pendirian PK dijelaskan secara resmi oleh DPP PK sebagai berikut,

“ Partai Keadilan didirikan bukan atas inisiatif seseorang atau beberapa orang aktivisnya, namun merupakan perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif dan demokratis. Sebuah survei yang melengkapi cakupan luas dari para aktivis dakwah, terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di Indonesia dilakukan beberapa bulan sebelumnya untuk melihat respon umum dari kondisi politik yang berkembang di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar mereka menyatakan bahwa saat itulah waktu yang tepat untuk meneguhkan aktivitas dakwah dalam bentuk kepartaian dalam konteks formalitas politik yang ada sekarang. Survei ini mencerminkan tumbuhnya kesamaan sikap di kalangan sebagian besar aktivis dakwah yang dapat menjadi sebuah pola dinamis bagi pengendalian partai di kemudian hari. Terbukti setelah tekad mendirikan sebuah partai diputuskan maka kesatuan sikap secara menyeluruh menjadi kenyataan.⁶¹

Konsistensi Terhadap Asas Islam

Pada 19 September 1998 PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi

⁶⁰ Damanik, *Op.cit.* hal. 221-222.

⁶¹ *Sekilas Partai Keadilan*. Diterbitkan oleh Sekretariat DPP Partai Keadilan. 1998. hal. 19

Isma'il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY.⁶² Langkah ini tentu saja merupakan tindakan yang cukup berani, di saat Negara bahkan umat Islam sendiri masih mengidap *islamophobia* yang akut. Keputusan membuat partai berbasis Islam ini sebenarnya turut dipicu oleh kekecewaan para tokoh Tarbiyah atas kelahiran Partai Bulan Bintang yang dibidani Dewan Dakwah yang mengambil Pancasila—bukan Islam sebagaimana yang diharapkan—sebagai asas⁶³.

Presiden Partai Keadilan, Nur Mahmudi Ismail dalam sebuah wawancara menjelaskan alasan mengapa Partai Keadilan mengambil asas Islam,

“ Kami jelas mengambil Islam sebagai asas partai. Tapi juga perlu dijelaskan, itu adalah asas kami dalam berparpol dan berormas dalam negara yang berlandaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Perjuangan kami menggunakan asas Islam, sama dengan perjuangan kami untuk meminta agar agama lain juga menggunakan agamanya sebagai asas partai. Ini bukti proses demokratisasi yang kami perjuangkan. Bukan berarti kami memperjuangkan asas Islam, *tok*. Kita kan punya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, tiap insan mempunyai tanggung jawab rabbaniyah. Baik Kristen, Budha, Hindu, maupun Protestan. Bukan menjadi orang yang *split personality*. Menjadi masyarakat yang oportulis dan pragmatis.”

Konsekuensi dari pengambilan asas Islam ini sangat mudah ditebak. PK akan dengan sangat mudah distigma sebagai kelompok Islam radikal. Namun stigma ini ternyata tidak membuat PK merubah asasnya. Mengenai stigma sebagai kelompok Islam radikal, Nur Mahmudi memiliki sebuah argumentasi. Ia mengatakan,

“ Justru inilah yang harus kita perjuangkan. Perjuangan kita membuktikan bahwa orang Islam itu tidak pernah berbuat sesuatu yang merusak. Hanya karena desakan orang-orang tertentu yang membuat umat Islam apatis. Sedangkan ajaran agamanya, jelas *rahmatan lil alamin*. Selama ini Partai

⁶² www.pk-sejahtera.or.id

⁶³ Furkon, *Op.cit*, hal.150

Keadilan mampu menunjukkan massanya tidak berbuat radikal. Massanya juga tidak berbuat keributan.”

Menurut Nur Mahmudi tidak ada alasan sedikitpun untuk menakuti Islam saat partai Islam berkuasa di Indonesia. Untuk menangkis anggapan itu dia mencoba memberikan bukti-bukti sejarah.

“ Betulkah ajaran Islam itu mendiskreditkan agama lain? Saat ini yang terjadi adalah, di kala umat Islam minoritas, mereka malah dikejar-kejar. Kalau non-muslim minoritas, mereka *adem ayem* dan damai. Justru itu yang menjadi tantangan kita, umat Islam harus mampu membuktikan bahwa radikalisme dan ekstrimisme bukan ajaran Islam.”⁶⁴

Koalisi Partai Islam : Bukan Pilihan Politik

Banyaknya partai Islam yang ada mengundang pertanyaan mengapa partai-partai itu tidak *merger* saja dalam satu partai. Bagi PK terbentuknya persatuan umat adalah salah satu visinya. Nur Mahmudi mengatakan,

“ Saya kira, kalau dengan PKB, bukan, karena mereka menggunakan asas Pancasila. PAN juga Pancasila. Kalau PUI berdasar Islam. Kami dengan PUI akrab. Kami membentuk forum komunikasi partai-partai Islam. Saat ini berbicara tentang nasib bangsa.Itu (koalisi, *pen*) sedang kita diskusikan, Memang ada satu partai yang belum ingin mengembangkan sayapnya, ada juga yang berpendapat lain. Pokoknya saat ini sedang tahap penjajakan. Kalau koalisi, itu adalah visi kami. Terpentuknya persatuan umat Islam, adalah salah satu visi utama PK.

Terkait dengan format koalisi, Nur Mahmudi menjelaskan bahwa PK tidak terpaku dalam persamaan asas saja namun lebih luas lagi mendasarkannya pada persamaan visi dan misi yang dimilikinya. Hal ini tentu saja mengakibatkan terbukanya peluang terbentuknya koalisi dengan partai berdasar selain Islam bahkan berdasar agama non-Islam.

⁶⁴ Lihat wawancara Nur Mahmudi Ismail dalam *Radikalisme dan Ekstrimisme Bukan Ajaran Islam* dalam Deliar Noer, *Mengapa Partai Islam, Mengapa Kalah*, Jakarta : ALVABET, 1999, hal. 138-139

“.....Koalisi kami berdasarkan persamaan visi dan misi. Dengan siapa saja bisa, selama menegakkan keadilan, kejujuran, dan punya sikap amanah dalam kebirokrasian. Kalau kami mengatakan niscaya asas Islam, asas Kristen, dan asas lainnya, apakah partai asas Pancasila itu berbeda dengan PK dalam konteks kenegaraan? Kita harus melihat tidak berbeda. Justru yang sulit bagi kita apakah partai itu berjuang untuk kekuasaan atau berjuang untuk nilai? Dalam hal ini PK berjuang untuk menegakkan nilai. Jadi, akan terbuka terhadap partai mana pun, asal perjuangannya untuk menegakkan nilai, bukan kekuasaan.”

***Stembus Accord* dengan Partai Islam.**

Keterlibatan PK dalam forum delapan partai Islam yang salah satu butir kesepakatannya adalah *stembus accord* (menggabungkan sisa) di dasari oleh beberapa arti penting yang dipahaminya. Beberapa arti penting *stembus accord* partai-partai Islam dijelaskan Nur Mahmudi sebagai berikut,

“ Arti penting pertama, ini menunjukkan bahwa di antara kedelapan parpol Islam ternyata telah memiliki kelapangan dada dalam sikap ukhuwah islamiyah. Proses pelimpahan sisa suara ini jelas mengarah kepada pengentalan sikap ini sekaligus membantah perkiraan pendapat masyarakat seolah-olah di antara partai-partai Islam kondisinya berpecah-pecah. Ternyata kedelapan parpol ini tetap bersatu. Hal ini yang menggembirakan, saya melihat kedelapan parpol Islam ini bersama-sama bergerak untukmenyukseskan arah reformasi. Bukan hanya untuk kepentingan untung rugi sasaran politik sesaat. Tidak mustahil, ini bisa menjadi potensi awal untuk bisa berbicara dalam konteks lebih luas lagi. Artinya SA, tida hanya berfungsi untuk pelimpahan sisa suara agar tidak mubadzir. Kedelapan parpol ingin membuktikan bahwa mereka bisa bicara lebih jauh lagi dalam maslahe reformasi. Ini penting sebab saat ini kata reformasi memang ada gejala mengalami deviasi arti.....SA pada prinsipnya menghindari kemubadziran sisa-sisa suara. Secara prinsip, tidak ada partai yang akan mengalami kerugian akibat SA ini. Bahkan, partai-partai yang tanpa SA tidak dapat kursi akan mendapat kursi karena proses ini....”

Bagi PK forum delapan partai Islam ini tidak dimaksudkan untuk menghadang *common enemy* umat Islam, tapi lebih berorientasi meluruskan arah reformasi sebagaimana dijelaskan oleh Nur Mahmudi berikut,

“ Saya tidak melihat ke arah *situ* tapi lebih ke arah meluruskan arah reformasi. Kita tidak ingin kembali terjebak ke arah sektarian. Walau programnya diarahkan ke situ saya kira kita tidak akan pernah menjadi lebih dewasa dan rasional sebab kita hanya memikirkan masalah sentimen tertentu. Semua parpol dari mana pun akan kita dukung asal menunjukkan kemiripan ke arah reformasi.”⁶⁵

Membentuk Fraksi Reformasi : Konsistensi Asas dan Koalisi Taktis

Perolehan suara Partai Keadilan pada pemilu 1999 yang tidak signifikan— di hanya meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten)⁶⁶ disamping juga gagal mengusung calon presidennya KH Didien Hafidhudin mengharuskan PK bergabung dengan partai lain untuk membentuk fraksi di DPR. PK kemudian memilih Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai mitra koalisi yang kemudian membentuk Fraksi Reformasi.

Ada empat alasan mengapa PK berkoalisi dengan PAN. *Pertama*, kursi yang diperoleh Partai Keadilan di DPR memang tidak mencukupi untuk membuat fraksi sendiri karena berada di electoral threshold.

Kedua, pembahasan-pembahasan yang mengarah kepada koalisi Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Amanat Nasional dalam wadah fraksi telah dilakukan semenjak pembahasan Poros Tengah dilakukan terutama dalam rangka mendudukkan unsur umat dalam posisi Wakil Ketua DPR (sebelum ditambah kursi Partai Keadilan Sejahtera jumlah kursi Partai Amanat Nasional di bawah jumlah jatah kursi ABRI dan Polri).

⁶⁵ *Ibid*, hal. 140-143.

⁶⁶ www.pk-sejahtera.or.id

Ketiga, Partai Amanat Nasional adalah partai yang secara intensif mengadakan penjangjangan untuk melakukan koalisi fraksi dengan Partai Keadilan. Dari partai Islam lain tidak ada yang secara resmi mau mengadakan pembahasan ini kepada Partai Keadilan.

Keempat, meskipun Partai Amanat Nasional tidak berasaskan Islam namun secara kultur kesamaan para anggota legislatifnya memiliki banyak kesamaan karena latar belakang mereka yang HMI, Muhammadiyah, Al Irsyad dan lainnya. Hanya satu orang dari 34 anggota legislatifnya yang tidak beragama Islam dan itupun secara umum tidak mengganggu hubungan-hubungan.⁶⁷

Koalisi ini kemudian memancing berbagai reaksi. Salah satu reaksi negatif yang ditimbulkan adalah pernyataan bahwa tidak layak bagi partai Islam, seperti PK untuk berkoalisi dengan partai sekuler. Koalisi ini dianggap sebagai penghianatan PK terhadap partai-partai Islam.⁶⁸ Di sisi lain, koalisi ini juga mengesankan inkonsistensi PK terhadap perjuangan kelompok Islam di DPR. Menyikapi reaksi ini, DPP PK kemudian menyampaikan penjelasan sebagai berikut,

“Partai Keadilan juga memandang koalisi dalam bentuk fraksi Reformasi bukanlah sebuah koalisi ideologis atau strategis, tetapi hanya sebuah koalisi taktis yang dimainkan Partai Keadilan bersama dengan partai-partai lain.”⁶⁹

Terkait dengan pemilihan nama fraksi Reformasi, PK memiliki pertimbangan praktis. Hidayat Nurwahid menjelaskan,

⁶⁷ Wahono, Untung, *Penegakan Syari'at Islam dan Koalisi Islam Menjawab Tuduhan Terhadap PK Sejahtera*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003, hal 36

⁶⁸ *Ibid*, , hal. 25

⁶⁹ *Ibid*, hal. 39. Yang dimaksudkan PK dengan koalisi taktis adalah koalisi dalam arti menggalang kesamaan langkah bersama partai-partai lain dalam mencapai tujuan-tujuan memenangkan kepentingan Islam dan umat Islam.

"...ada satu hal yang menjadi perhitungan praktis dari PK. Ketika itu partai-partai sudah mendaftarkan diri sebagai fraksi-fraksi di DPR. Partai Golkar mendaftarkan diri dengan nama Fraksi Golkar Reformasi. Kami berfikir ketika itu kalau dibiarkan, maka nama dan sejarah reformasi akan hancur dan centang perenang. Melawannya bagaimana? ya dengan menggabungkan diri dengan PAN, karena pak Amien Rais waktu itu dikenal sebagai lokomotifnya reformasi. Itulah karenanya kami menggabungkan diridengan PAN dan saya mengusulkan namanya bukan Fraksi Amanat Keadilan, tetapi fraksi Reformasi untuk menggusur Golkar itu, dan untuk mengembalikan cita-cita reformasi yang bagaimanapun lekat dengan pak Amien, dan dengan kawan-kawan mahasiswa yang dulu mendukung pak Amien."⁷⁰

Menolak Pencalonan Habibie

Diajukannya kembali Habibie sebagai calon presiden oleh Partai Golkar dalam pemilu 1999 ditanggapi serius oleh PK. Bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan sepakat tidak mendukung pencalonan BJ. Habibie sebagai Presiden RI 1999-2004. Kesepakatan ini menjadi batu pijakan bersama untuk menggalang kekuatan proreformasi. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam pernyataan bersama PPP, PAN, dan PK yang berbunyi :

1. Kami bertekad mengemban amanat tanggung jawab bersama untuk memelihara persatuan nasional dan mewujudkan Pemilu 7 Juni 1999 yang demokratis, jujur, adil, aman, tanpa kekerasan dan kerusuhan.
2. Kami bertekad mendesak agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Pemilu 7 Juni 1999, dengan didahului dengan peresmian anggota DPR/MPR terpilih hasil pemilu tersebut.

⁷⁰ Damanik, *Op.cit.*, 283-284

3. Kami bertekad untuk mendorong pembentukan koalisi dengan kekuatan-kekuatan politik reformis yang memiliki agenda dan prestasi reformasi yang jelas, transparan, dan dapat berfungsi mewujudkan Indonesia Baru yang maju, sejahtera, adil dan damai, serta mendapat ridha Allah SWT.
4. Kami bertekad mendorong pembentukan sebuah pemerintahan baru yang baik (*good governance*) hasil pemilu yang dapat dipercaya oleh rakyat (*legitimate*), dan yang mampu memacu agenda reformasi dalam tatanan kehidupan kebangsaan yang demokratis dan bebas KKN.
5. Kami bertekad menggalang semua kekuatan nasional untuk menghalau dan menyingkirkan segala bentuk halangan, dan gangguan oleh kekuatan-kekuatan anti reformasi yang hingga saat ini masih aktif. Kekuatan anti reformasi tersebut tega menjalankan agenda-agenda yang mengorbankan kepentingan masyarakat masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
6. Kami menyerukan kepada segenap jajaran PPP, PAN, dan PK pada semua tingkatan di seluruh penjuru Tanah Air, dan seluruh kekuatan reformasi nasional untuk menyukseskan Pemilu 7 Juni 1999 ini dengan cara memantau, mengawasi, mencegah segala bentuk kecurangan dan kekerasan dalam pelaksanaannya.⁷¹

Inilah manifestasi perlawanan PK terhadap rekonsolidasi kekuatan Orde Baru yang tetap dilakukan dalam kerangka legal dan formal tanpa konfrontasi dan kekerasan.

⁷¹ www.kompas.com, sabtu, 22 Mei 1999.

Sikap Politik Utama PK

Nurmahmudi Ismail dalam wawancaranya di majalah UMMAT dan Harian Republika menjelaskan bahwa sikap politik yang paling utama PK pada tahun 1999 adalah tiga paket UU yang diusulkan pemerintah: UU Politik, UU Pemilu dan Susunan DPR/MPR, Nurmahmudi mengatakan,

“Kalau UU ini tak mampu mencerminkan suasana yang menyenangkan rakyat saya kira pemilu yang akan datang juga menjadi *nonsen*. Dalam artian tak akan menumbuhkan pemerintahan yang *legitimate*. Rancangan undang-undangnya tampak terlalu ilmiah. Dari sisi pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik-proporsional. Itu indah memang: secarademokratis bisa dipertanggungjawabkan, secara ilmiah bisa diperdebatkan. Kenyataan sekarang—seperti yang telah kami sampaikan ke F-KP dan F-PP DPR RI—saya tegaskan, lebih baik kita mengambil sistem proporsional saja. Ada yang menambahkan dengan dinuansai oleh distrik. Tetapi, betul-betul proporsional. Yang dimaksud dengan dinuansai distrik, calon-calonnya itu memangmewujudkan tokoh-tokoh daerah. Walaupun, tidak 100 persen. Agar apa? Otonomi ini akan muncul. Orang semakin bangga dengan wakil-wakilnya betul-betul dari daerahnya. Masalah proporsional ini hanya untuk sekarang (Pemilu 1999, *pen*). Kami memesan, di Sidang Umum MPR 1999/2000 nanti segera dibahas kemungkinan sistem distrik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sejak 1971 sampai 1997 tidak satu pun, termasuk SLTP, yang merasa puas dengan pelaksanaan pemilu. Kalau saat ini kita menumbuhkan sistem distrik, yang terjadi adalah harusnya muncul tokoh-tokoh. Tetapi yang terjadi selama 30 tahun, kita tidak dididik untuk memunculkan tokoh-tokoh. Idealnya (untuk jangka panjang, *pen*) tentunya distrik. Menurut saya, memang harus dilihat benar. Jadi, tidak langsung distrik. Kenapa kami *concern* dengan sistem proporsional pada pemilu sekarang ? Karena kami memperjuangkan tagaknya kejujuran dalam pelaksanaan pemilu itu. Karena itu, yang kami tekankan adalah infrastruktur dan mekanisme sistem kepanitiaan pemilu berjalan dengan baik: menggambarkan sistem demokratisasi dan jaminan adanya kejujuran serta keadilan”⁷²

Poros Tengah : Debut Pertama yang Cemerlang

Di tengah persaingan yang sengit antara dua kekuatan dominan di DPR yaitu Partai Golkar dan PDIP, PK terlibat langsung dalam sebuah manuver yang

⁷² Wawancara Nur Mahmudi Ismail, *Ibid*, hal.136-138.

cukup mengesankan bersama beberapa partai berbasis massa Islam seperti PKB, PAN, PPP dan PBB dengan menggalang kekuatan membentuk Poros Tengah dalam Sidang Umum MPR 1999. Poros Tengah kemudian secara bulat mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai calon presiden.⁷³ Langkah ini diambil untuk menghadang laju Megawati—setelah Habibie yang dicalonkan Partai Golkar mengundurkan diri—yang dicalonkan kubu nasionalis yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai pemenang Pemilu 1999.

Meski pada praktiknya Poros Tengah merupakan kekuatan politik baru di parlemen, yang diperhitungkan, namun secara objektif, Partai Keadilan memiliki beberapa catatan penting tentangnya, antara lain,

1. Poros Tengah terdiri dari beberapa partai yang boleh jadi memiliki visi dan tujuan yang berbeda-beda baik dalam skala partai atau tokoh-tokohnya.
2. Di kalangan internal partai-partai pendukung Poros Tengah belum ada kesepakatan tentang calon presiden alternatif.
3. Tokoh penting dalam tubuh PKB, yaitu Gus Dur adalah orang yang memiliki kepribadian yang unik dan sering melontarkan hal-hal yang sensitif dan menyinggung perasaan umat.

⁷³ Bagi PK, sosok Abdurrahman Wahid dinilai cukup kontroversial. Selain pernyataannya yang sering memancing kontroversi, Abdurrahman Wahid selama ini juga dikenal sebagai tokoh gerakan liberalisme Islam di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan PK yang—oleh banyak pengamat disebut—fundamentalis dari sisi pemahaman. Namun di saat harus memilih antara Abdurrahman Wahid atau Megawati, akhirnya PK memilih untuk mendukung Abdurrahman Wahid. Selain atas pertimbangan syariah, Megawati—atau lebih tepatnya kelompok Nasionalis—memiliki *track record* yang cukup buruk di mata kelompok Islam. Abdurrahman Wahid juga diharapkan mampu menyatukan aspirasi Islam.

4. masing-masing partai pendukung Poros Tengah memiliki hidden agenda (agenda tersembunyi) dan melakukan manuver-manuver politik tersendiri dan belum ada kesepakatan resmi yang dapat dijadikan acuan bersama.

Akhirnya secara gemilang, poros tengah memenangkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden baru, sedangkan Megawati harus puas dengan menduduki kursi wakil presiden.

Amandemen UUD 1945 : Menguji Pluralisme Politik PKS

Pada 3 Agustus 2000 bersama dengan tujuh partai Islam (PPP, PBB, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) PK menggelar acara Saraschan dan Silaturahmi Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Usulan ini memantik perdebatan yang cukup panas di DPR. Dalam perjalanannya PK kemudian menawarkan opsi lain yaitu Piagam Jakarta Berwawasan Piagam Madinah. PK menganggap rumusan ini lebih mencerminkan suasana masyarakat Islam masa Madinah⁷⁴ yang menjadi acuan bagi PK.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Untung Wahono mengatakan bahwa dalam proses amandemen UUD 1945, posisi PKS amat jelas. Sejak pembahasan Pasal 29 Ayat (1) dilakukan, berkembang tiga alternatif amandemen. *Pertama*, mereka yang menginginkan pasal itu tetap dan tidak berubah. *Kedua*, ada yang mengusulkan perubahan sehingga menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. *Ketiga*, ada yang

⁷⁴ Pada awalnya PK tidak tertarik untuk mewacanakan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. PK lebih memprioritaskan konsolidasi kekuatan umat dan mengaplikasikan ajaran Islam sebagai bentuk teladan bagi masyarakat.

mengusulkan perubahan sehingga menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi para pemeluknya.

Pengusul kedua, yang rumusannya dikenal sebagai Piagam Jakarta, adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Jadi tidak benar jika PKS didudukkan sebagai motor atau pelopor Piagam Jakarta dalam momentum amandemen UUD pasca-Soeharto. Sebagai sebuah fakta sejarah, hal ini harus diungkap karena sikap politik PKS yang ditampilkan saat itu adalah hasil sebuah musyawarah panjang dan dalam dari lembaga-lembaga tinggi partai. Partai Keadilan/PK (saat itu belum menjadi PKS) sejak pembahasan pasal itu sudah pada posisi pilihan ketiga bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat itu tergabung dalam Fraksi Reformasi.

Saat itu PKS telah menyatakan dasar sikap politiknya. *Pertama*, menjunjung nilai-nilai agama sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, memberi penekanan pada keadilan posisi agama-agama di Indonesia. Dalam penjelasan (*bayanat*) partai yang diedarkan saat itu, PKS mengilustrasikan betapa pada masa hidup Rasulullah SAW di Madinah hukum-hukum Taurat dan Injil juga diberlakukan kepada para ahli kitab (lihat sebab turun Surat Al Maaidah Ayat 40-45). Dengan rumusan "kewajiban menjalankan ajaran agama bagi para pemeluknya"-lalu rumusan ini dikaitkan dengan Piagam Madinah-PKS memandang kehidupan spiritualitas keagamaan akan dihargai di Indonesia.

Dalam sejarah pertumbuhan negara-negara di dunia, pencarian dan pemilihan referensi politik amat wajar terjadi. Karena itu, wajar pula PKS menjadikan Piagam Madinah sebagai referensi politik meski berbagai perkembangan penafsiran telah muncul dari dokumen yang disepakati kaum Muslimin dan non-Muslimin saat Nabi Muhammad SAW hidup di Madinah. Dalam konteks Indonesia, hal terpenting yang harus dihayati adalah penggunaan referensi politik bukan saja merupakan kewajaran proses, tetapi juga merupakan hak politik yang dihormati dan dijamin konstitusi.

Menurut Untung, demokratisasi referensi adalah produk proses reformasi Indonesia tahun 1998 yang ditandai dengan dihapusnya pakem asas tunggal Pancasila dan diberlakukannya undang-undang politik yang baru tahun 1999. Tradisi lama dalam politik yang diwarnai "penyeragaman total" dan sikap-sikap apriori terhadap perbedaan pemikiran dan cara memperjuangkan kepentingan telah ditinggalkan. PKS telah tampil dalam panggung demokrasi Indonesia dengan kesiapan untuk berinteraksi dengan semua pihak dalam berbagai bentuk.⁷⁵

Fraksi Reformasi : Membangun Kultur Baru

Untuk membangun kultur bersahaja dan terhindar dari kesan menghambur-hamburkan fasilitas negara, seluruh anggota Fraksi Reformasi (FR) MPR, kecuali yang datang dari daerah, keluar dan tidak akan menginap di Hotel Mulia yang disediakan panitia Sidang Tahunan (ST) MPR 2003. Mereka

⁷⁵ Lihat opini Untung Wahono, *Piagam Jakarta, PKS, dan Demokratisasi Referensi*, dalam Kompas, Selasa, 14 Desember 2004

memutuskan untuk tinggal di rumah kediaman masing-masing, di kompleks perumahan DPR RI Kalibata, Jakarta. Keputusan ini, dibuat dalam rapat FR MPR yang anggotanya terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK), serta anggota partai lainnya.

FR juga mengusulkan agar ST MPR 2003 yang dibuka hari ini oleh Ketua MPR Amien Rais, diperpendek masa sidangnya, mengingat agenda sidang diperkirakan dapat diselesaikan lebih cepat dari 10 hari yang dijadwalkan. FR sepakat untuk tidak menggunakan fasilitas hotel dan memperpendek jadwal sidang, agar dapat menghemat biaya ST MPR 2003 sehingga dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam kaitan itu, FR meminta kepada Setjen MPR untuk merevisi pengeluaran dana sewa hotel dimaksud. Pada ST MPR 2002 FR sudah mengusulkan agar para anggota Majelis yang berasal dari DPR RI tidak menginap di hotel untuk penghematan biaya ST MPR.⁷⁶

Pasang Surut Hubungan dengan Gus Dur

Dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid, Nurmahmudi Ismail sebagai Presiden Partai Keadilan diangkat menjadi Menteri Perhutanan dan Perkebunan. Sebagai konsekuensinya Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden PKS dan selanjutnya berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan. Meski PK terlibat dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid bukan

⁷⁶ www.gatra.com, 1 Agustus 2003

berarti sikap kritis terhadap pemerintah menjadi lemah, yang terjadi malah sebaliknya semakin kritis.⁷⁷

Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid, paling tidak ada tiga persoalan yang dengan aktif dikritik Partai Keadilan. *Pertama*, mengenai pencabutan Ketetapan Nomor XXV/MPRS/1966, *kedua*, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, *ketiga*, kasus Buloggate dan Bruneigate.⁷⁸ Selain tiga hal tersebut, kebiasaan Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan kontroversial seringkali kontraproduktif dan cenderung memperkeruh keadaan. Pada 20 Januari 2001 PK menggelar Silaturahmi dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.

Presiden Partai Keadilan (PK), Hidayat Nur Wahid mengatakan, Presiden Abdurrahman Wahid telah menyia-nyiakan tiga kesempatan emas selama ini yang menyebabkan dirinya semakin sulit dimaafkan. Itulah kesalahan terbesar Gus Dur selama ini. Menurut Hidayat, ketiga kesempatan emas tersebut, yang *pertama*, Gus Dur telah memperoleh kesempatan untuk menjadi presiden secara "cuma-cuma", tidak harus dengan kampanye. Pada tiga bulan pertama, semuanya kelihatan oke. Tetapi setelah Gus Dur mulai mencopot menteri-menterinya, itu berarti ia telah menyia-nyiakan kesempatan emas pertamanya. Selain memecat menteri yang berasal dari partai pilar pendukungnya, seperti Hamzah Haz dari PPP, Laksamana Sukardi dari PDI-P, Gus Dur juga banyak sekali melukai

⁷⁷ Furkon, *Op.cit.*, hal 162

⁷⁸ *Ibid.*, hal.163

perasaan ummat Islam Indonesia. Hal tersebut, menurut Hidayat, terjadi ketika Gus Dur menggelar pernyataan untuk mengusulkan hubungan dagang dengan Isreal, berikut mengusulkan pencabutan TAP MPR No.25 tentang larangan partai komunis berada di Indonesia. Saat itu, menurut Hidayat, Gus Dur masih dimaafkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan untuk itu ia masih diberi kesempatan meneruskan kepemimpinannya.

Kedua, ketika Sidang Tahunan MPR 2000. Waktu itu Gus Dur lagi-lagi memperoleh kesempatan emas, dimaafkan dan diberikan kesempatan lagi. Namun Gus Dur ternyata kemudian kembali menyalahgunakan kesempatan emas kedua tersebut. *Ketiga*, yakni dengan jatuhnya Memorandum I DPR sebagai peringatan agar Gus Dur mengubah dan memperbaiki perilakunya. Menurut Hidayat, dengan Memorandum I tersebut bukannya Gus Dur harus datang ke DPR memberikan jawaban verbal, tetapi esensinya adalah perbaikan kinerja secara konkret dan tidak lagi mengulangi perbuatan seperti yang lalu-lalu. Namun, kata Hidayat, hal itu ternyata tidak pula dilakukan. Karena itu, Hidayat memandang Gus Dur kini sudah berada pada tingkat yang paling sulit untuk tetap dipertahankan sebagai Presiden RI. Setidaknya, Hidayat menyebut ungkapan, "Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya".⁷⁹

Semakin lemahnya legitimasi pemerintahan Gus Dur dan mumburuknya kinerja pemerintahannya mengantarkannya ke Sidang Istimewa (SI). Fraksi Reformasi MPR-RI berpendapat, pelaksanaan SI MPR sudah tepat karena itu

⁷⁹ www.gatra.com, 9 April 2001

agenda SI MPR sebaiknya hanya meminta pertanggungjawaban Presiden. Fraksi Reformasi berpendapat bahwa Presiden secara sadar memosisikan diri sebagai kekuatan diktatorial yang otoriter, dan melecehkan konstitusi serta mengingkari kewenangan lembaga tinggi negara. Menurut Fraksi Reformasi, kebijakan dan tindakan Presiden pada prinsipnya telah menciptakan ketidakpastian dari hari ke hari, dan hal itu juga dirasakan masyarakat ekonomi.

Mengenai proses penggantian Kapolri Jenderal Pol Bimantoro, Fraksi Reformasi menilai kebijakan tersebut melanggar haluan negara khususnya TAP MPR No7/MPR/2000 Pasal 7 ayat 3 tentang Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Fraksi Reformasi juga berpendapat keputusan tersebut tidak mengikuti konstitusi dan tidak konsisten, serta telah menimbulkan kemelut di Polri mulai dari tingkat perwira hingga paling bawah. Mereka juga berpendapat Presiden dengan sengaja menciptakan dualisme kepemimpinan di Polri, karena proses pemberhentian Bimantoro belum diproses secara prosedural konstitusi melalui persetujuan DPR. Fraksi Reformasi khawatir hal tersebut juga menjadi pemicu perpecahan dan menyebabkan konflik terbuka di tubuh Polri. Hal ini harus segera diatasi, sebab kalau tidak maka tingkat Kamtibmas akan semakin rawan.

Fraksi Reformasi juga berpendapat, setelah keluarnya Memorandum I dan Memorandum II maupun permintaan DPR untuk melakukan SI, yang dilakukan Presiden hanyalah berupa perlawanan, pelanggaran konstitusi dan provokasi

terhadap keadaan yang sudah tidak menentu.⁸⁰ Bahkan kemudian Fraksi Reformasi dengan tegas menarik dukungannya pada Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu, F-Reformasi juga menuntut Gus Dur agar lengser dari jabatan presiden. Agaknya inilah sikap paling keras dibanding fraksi lainnya, yang terbatas pada 'peringatan' pada presiden. Sikap F-Reformasi itu disampaikan oleh juru bicaranya, Farhan Hamid di hadapan sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara V, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.. Jika Gus Dur tidak mau mundur, menurut Farhan, fraksinya akan minta DPR untuk menyampaikan pada MPR untuk menggelar Sidang Istimewa. Pencabutan mandat perlu ditegaskan, karena F-Reformasi, ketika Sidang Umum MPR lalu adalah pelopor menggalang suara untuk mendukung Gus Dur sebagai presiden. Fraksi Reformasi juga menilai, Pansus Buloggate-Bruneigate telah bekerja dengan baik, dan berhasil mengungkap kebenaran di balik kasus dana Yanatera Bulog (Buloggate) dan dana bantuan Sultan Brunei (Bruneigate). Karena itu Fraksi Reformasi menerima sepenuhnya hasil kerja Pansus DPR.⁸¹

Fraksi Reformasi MPR secara tegas meminta majelis untuk mempercepat pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR sebelum 20 Juli 2001..F-Reformasi menilai, pada Senin telah terjadi perkembangan politik yang meresahkan masyarakat, yaitu di tubuh Polri mulai terjadi perpecahan manakala Perwira Menengah telah "berhadapan" dengan Perwira Tinggi Polri, yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan konflik internal. Perkembangan lainnya, menurut F-Reformasi,

⁸⁰ www.gatra.com, 21 Juli 2001

⁸¹ www.gatra.com, 1 Pebruari 2001

adalah pernyataan Presiden Senin (9 Juli 2001) siang di Istana Bogor, setelah gagalnya pertemuan dengan pimpinan parpol, bahwa paling lambat 20 Juli 2001 Presiden akan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, membekukan DPR/MPR dan mempercepat Pemilu. Tindakan pembekuan DPR/MPR seperti yang direncanakan Presiden jelas merupakan tindakan makar terhadap bangsa Indonesia. Ini bukan saja merupakan langkah anti konstitusional, tetapi hakikatnya merupakan kejahatan politik yang merugikan rakyat. F-Reformasi berpendapat SI hanya dapat dilaksanakan sebelum 1 Agustus hanya jika antara lain terjadi hal-hal seperti Presiden mengeluarkan dekrit pembubaran DPR/MPR dan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden menetapkan Kapolri baru, apabila keadaan ekonomi semakin terpuruk yang ditandai dengan melemahnya nilai rupiah, Presiden melakukan penangkapan politik terhadap lawan-lawan politiknya serta terus membuat pernyataan provokatif.⁸²

IV.3. Periode Pengokohan Eksistensi : *Sira' Baina al Haq wa al Bathil*

Naiknya Megawati menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid membawa permasalahan tersendiri bagi PK. Hal ini disebabkan di awal pemilihan presiden 1999 melalui Sidang Umum (SU) PK dengan tegas menolak Megawati dilatarbelakangi berbagai pertimbangan politis, normatif maupun ideologis. Namun dalam realitas politik yang ada nampaknya PK mau tidak mau harus menerima kepemimpinan Megawati yang dibenarkan secara konstitusi.

⁸² www.gatra.com, 9 Juli 2001

Bisa jadi hal di atas menjadi penyebab mengapa PK menolak ikut serta dalam pemerintahan Megawati. Menurut Hidayat Nurwahid, penolakan tersebut adalah dalam kerangka profesionalisme partai. Menurutnya, PK adalah partai baru yang tengah menjajaki penerimaan di dalam masyarakat. Alangkah baiknya kalau penerimaan tersebut diperluas. Dan untuk memperluas penerimaan itu, dalam logika pengurus PK adalah dengan menangani partai itu secara sungguh-sungguh dan profesional.⁸³

Dalam perjalannya, kinerja pemerintahan Megawati ternyata menuai banyak kritikan. Selain lamban dalam merespon permasalahan bangsa, Megawati juga seringkali melontarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya. Salah satu contohnya, Megawati menganjurkan kepada seluruh rakyat untuk “menggencangkan ikat pinggang” dalam rangka menyasati krisis ekonomi bangsa, namun tidak lama setelah itu ia justru menggelar pesta keluarga yang besar-besaran di pulau Bali. Oleh sebab itu banyak kalangan mengecap Megawati tidak memiliki *sense of crisis*. Sikap “pendiam”nya juga menimbulkan masalah yang tidak kalah seriusnya. *Statement* Megawati berkaitan dengan berbagai masalah bangsa yang sangat ditunggu rakyat justru sangat jarang dikeluarkan. Nampaknya *silent is gold* tidak berlaku bagi kasus Megawati.

Di antara berbagai kesalahan pemerintah Megawati, kesalahan terburuk adalah kebijakan untuk melakukan divestasi aset-aset strategis Negara, salah satunya adalah PT. Indosat Tbk. Dalam divestasi yang belum pernah disetujui

⁸³ Damanik, *op.cit.*, hal.305

DPR⁸⁴ itu ternyata terdapat pejabat Negara yang terindikasi terlibat dalam proses divestasi tersebut.⁸⁵ Para pejabat itu antara lain Megawati sendiri. Megawati—sebagai Presiden RI—yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2002, tanggal 16 Mei 2002, tidak berbuat apa-apa dalam pelaksanaan proses divestasi walaupun terjadi protes sangat keras dari Serikat Pekerja, para tokoh masyarakat, anggota DPR/MPR dan bahkan terlihat dan terkesan melindungi aparat/pejabat pelaksananya.⁸⁶ Selain Megawati terindikasi terlibat pula Laksmana Sukardi (Menteri Negara BUMN), Yusril Ihza Marhendra (Menteri Kehakiman dan HAM), Agum Gumelar (Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi) serta beberapa pejabat lainnya.⁸⁷

Untuk menghadang divestasi PT. Indosat ini 137 anggota DPR dari beberapa fraksi telah menggalang usul penggunaan hak angket. Namun dalam rapat pleno yang berlangsung pada tanggal 5 Maret 2004 usul penggunaan hak angket ditolak. Hanya tiga fraksi yang mendukung usul penggunaan hak angket tersebut yaitu F-Reformasi, F-PKB dan F-PDU. Fraksi yang sangat menolak usul adalah F-PDIP.⁸⁸

Walaupun upaya PK—bersama partai-partai lain—menganjal divestasi PT. Indosat gagal, PK terus bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Megawati. Kebijakan-kebijakan tidak populis lainnya yang ditolak adalah kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani serta kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM,

⁸⁴ Batubara, Marwan, *Divestasi Indosat Kebutuhan Sebuah Rezim*, Jakarta : Iluni, 2004, hal. 4

⁸⁵ *Ibid.* hal. 51.

⁸⁶ *Ibid.* hal. 54.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.* hal. 46

TDL dan tarif telepon secara bersamaan. Kontan kebijakan yang terakhir ini memancing reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan wacana yang berkembang dalam gerakan mahasiswa sudah mengarah pada penurunan Megawati dari kursi Presiden.

Resolusi RUU Politik

Partai Keadilan (PK) bersama dengan 14 partai politik lainnya menyampaikan resolusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) politik, yakni RUU Parpol dan RUU Pemilu yang masih memiliki banyak kekurangan. Presiden PK Hidayat Nurwahid menilai RUU Politik itu masih banyak cacat. Kalau ingin konsisten, pemerintah dalam hal ini Depdagri (Departemen Dalam Negeri) jangan mengubah puluhan pasal. Mengubah puluhan pasal berarti mencerminkan tidak konsisten.

Hidayat menegaskan, pimpinan ke-15 parpol itu ingin mengkritisi RUU Parpol dan RUU Pemilu agar muncul sebuah perundang-undangan yang sungguh-sungguh adil dan mewartakan semangat demokrasi, sehingga dapat menyiapkan pemilu yang jujur dan adil dan mementingkan kepentingan nasional agar bangsa ini bisa keluar dari krisis politik dan ekonomi.

Hidayat mengatakan,

“Resolusi ini bukan sebagai bentuk *bargaining* atau tawar menawar politik, kalau pemerintah memberlakukan *electoral threshold* dan tidak membolehkan kami ikut pemilu 2004, maka kepada partai besar yang melanggar pendanaan pemilu juga harus dikenai sanksi tegas. Sanksi jangan hanya dikenakan pada parpol kecil, tetapi juga pada parpol besar. Dengan

perpecahan parpol yang ada di PKB dan PBB misalnya, juga telah membuat partai ini sesungguhnya tidak melampaui *electoral trashold*. Misalnya, PKB-nya Matori, hanya ada empat orang di DPR, yang berarti hanya 0,5 persen jauh di bawah *electoral trashold*.⁸⁹....PK menghargai hasil yang dicapai dalam UU Pemilu sekaligus kecewa karena sejumlah pasal tidak memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil dan baru untuk berkembang. UU Pemilu sarat dengan kepentingan partai-partai politik besar. Kita akan melakukan *judicial review* karena ada kontradiksi baik secara teknis maupun substansinya. Kita sedang mengkonsolidasikan ini dengan kawan-kawan seide”

Anggota FR, Mutamimul U’la menjelaskan, meski dalam UU menyebut secara eksplisit sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, namun pada praktiknya menyiratkan sistem proporsional tertutup. Pasal 92 UU Pemilu, jelasnya, menyebutkan bahwa kertas suara dianggap sah bila hanya dicoblos tanda gambar partai saja, tanpa mencoblos tanda gambar calon anggota legislatif yang terdapat dibawahnya. Sementara Pasal 107 ayat 2b, menurut anggota DPR ini, penetapan calon terpilih tidak berdasarkan rangking, tetapi berdasarkan nomor urut pemilihan. Menurutnya, hal itu membuka peluang bagi partai melakukan intervensi penetapan calon legislatif.⁹⁰

Dalam perjalanannya, Partai Keadilan kemudian membatalkan niat mengajukan hak uji UU Pemilu bersama lima partai Islam lain (PII Masyumi, Partai Nahdlatul Umat, Partai Kebangkitan Umat, Partai Islam Indonesia, dan Partai Al Islam Sejahtera Indonesia. Menurut Presiden Partai Keadilan Hidayat Nurwahid, etelah dikaji mendalam dan melihat tata cara pengajuan, kami melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurutnya, dalam *judicial review* ke MA, tuntutananya adalah pembatalan UU. Implikasinya, DPR dan pemerintah harus

⁸⁹ www.kompas.com, Senin, 17 Juni 2002

⁹⁰ www.kompas.com, Rabu, 19 Februari 2003

membuat UU baru. Padahal, PK tidak ingin merombak total. Apalagi waktunya sangat mendesak. Hidayat khawatir, jika judicial review disetujui, DPR dan pemerintah akan mengerjakan UU baru dengan sikap lebih tidak demokratis. Sebab kalau ada perbedaan, DPR cenderung memilih voting tanpa peduli keragaman argumentasi.⁹¹

Membangun Citra Positif

Dalam periode ini PK telah mengantongi modal politik yang cukup penting untuk berlaga dalam Pemilu 2004 yaitu citra—yang relatif—bersih para alegnya dari perilaku korupsi. Ini terbukti dengan hasil riset yang dilakukan oleh Husin al Banjari yang menyatakan bahwa anggota legislatif PK yang berjumlah 7 orang (di DPR RI), 23 orang (DPRR I), dan 158 (DPR II) telah menyelamatkan uang negara senilai total Rp. 739,6 miliar sepanjang empat tahun berkiprah (1999-2003). Selain itu, dengan segala keluguanannya kader PK juga rela mengembalikan uang suap dari sogok sedikitnya total RP. 5,3 miliar.⁹² Berkenaan dengan hal ini, Eep Saefullah Fatah berkomentar bahwa PK adalah satu-satunya partai yang menolak mekanisme suap dan korupsi dalam praktek pemerintahan setelah pemilu lewat.⁹³

Fusi PK – PKS : Siasat Politik PK

Pada 8 Juni 2002, 15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3

⁹¹ www.kompas.com, Jumat, 28 Maret 2003

⁹² 15 Tokoh Bicara PK Sejahtera, Jakarta : Pustaka Saksi, 2003, hal.9.

⁹³ Majalah Saksi, No. 23 Tahun V, 26 Agustus 2003.

Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikuti lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.⁹⁴

Walaupun begitu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan (DPP PK) juga menyiapkan partai alternatif untuk mengantisipasi ganjalan yang muncul dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Partai Politik (Parpol). Partai baru bernama Partai Keadilan (PK) Sejahtera itu, sejak tiga bulan lalu terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM (Depkeh HAM) dan tercatat dalam Lembaran Negara. Menurut Presiden PK HM Hidayat Nur Wahid, pihaknya masih akan mengkaji terlebih dahulu UU Pemilu maupun UU Parpol yang dinilai mengandung banyak jebakan bagi partai-partai baru. DPP PK sedang memikirkan upaya *judicial review* terhadap undang-undang tersebut. Hidayat merasa sangat kecewa, karena begitu banyak pasal yang justru tidak

⁹⁴ www.pk-sejahtera.or.id

mencerminkan semangat demokratisasi yang adil dan fair. Padahal, UU itu akan menjadi landasan yang menentukan jalannya pemilu yang diharapkan adil dan fair.

Hidayat Nurwahid berpendapat,

“Salah satu hal yang tidak konsisten dalam UU Pemilu, yakni ketentuan jumlah kepengurusan bagi partai-partai baru. Pasal 7 UU Pemilu mengatur, partai peserta pemilu harus memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi, di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi, serta memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Anehnya, persyaratan ini tidak diberlakukan terhadap partai-partai yang pada pemilu lalu sudah mencapai electoral threshold dua persen.”⁹⁵

Agar masyarakat memahami ketersambungan sejarah PKS terhadap PK kedua partai itu beberapa kali mengadakan aksi bersama seperti aksi damai menentang serangan AS ke Irak (20 Maret 2003), aksi demonstrasi mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI (10 Juni 2003), serta mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) (26 Mei 2003). Setelah DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkeham, pada 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.⁹⁶ Jadi, perubahan nama PK menjadi PKS disiasati dengan strategi fusi antara kedua partai tersebut

Presiden Partai Keadilan (PK) Hidayat Nurwahid menyatakan bahwa Partai Keadilan saat ini sudah resmi bergabung ke Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera). Penggabungan yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional

⁹⁵ www.kompas.com, Kamis, 20 Februari 2003

⁹⁶ *Ibid*

Istimewa selama dua hari, mulai Jumat (18/4)-ini mampu membuat PK Sejahtera bisa melampaui batas perolehan suara minimum (*electoral threshold-ET*) pada Pemilu 2004 mendatang. Menurut Hidayat, PK memilih PK Sejahtera sebagai wadah berpolitik untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang sudah diperjuangkan oleh PK. Selain itu, PK berharap tradisi citra parpol yang bersih dan peduli bisa diteruskan dalam PK Sejahtera.⁹⁷

Menghadang Politisi Busuk

Menanggapi semakin kencangnya wacana tolak politikus busuk, Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa krisis yang terjadi di negara ini sesungguhnya akibat ulah Orde Baru yang tidak menjalankan Pancasila, sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi besar-besaran. Hidayat sangat menyayangkan kalau rakyat ditarik kembali ke masa Orba, itu sangat tidak rasional. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera bersama parpol-parpol reformis lainnya harus bisa menyadarkan rakyat bahwa sesungguhnya kedaulatan ada di tangan rakyat dan jangan lagi mau kembali pada rezim lama. Ketika kedaulatan kembali ke tangan rakyat, maka rakyatlah yang akan menjatuhkan hukuman karena selama ini mereka disengsarakan oleh Orba, serta tidak mendapatkan pemberdayaan dari pemerintahan Megawati.

Hidayat menilai masa pemerintahan Orba tidak pernah memberikan solusi bagi bangsa ini untuk menyelesaikan masalah. Hidayat berharap agar masyarakat semakin kritis dalam memilih karena masih banyak parpol yang dapat

⁹⁷ Kompas, Jum'at, 18 April 2003

memberikan harapan, dan sekarang sudah saatnya rakyat mengucapkan selamat tinggal kepada Orde Lama, Orde Baru, dan pemerintahan Megawati.⁹⁸

Tanpa menyebut sosok tokoh tertentu, Hidayat Nurwahid juga menandakan bahwa sebaiknya calon presiden yang diajukan oleh partai politik tidak berstatus terdakwa.

“Calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik pada Pemilihan Umum 2004 sebaiknya tidak berstatus terdakwa. Meskipun Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengizinkannya.... Presiden adalah sosok yang harus dipercaya masyarakat dan harus bisa menuntaskan masalah utama bangsa ini yaitu korupsi. Kalau calon presidennya terdakwa bagaimana bisa menuntaskan kejahatan?..

Adalah suatu cacat politik jika calon presiden dan wakilnya berstatus terdakwa, apalagi terdakwa kasus korupsi, karena tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Rakyat pasti menginginkan pemimpin yang bersih. Yang masih dalam status sebagai terdakwa kasus korupsi pasti akan cenderung membela diri dan memikirkan keselamatannya sendiri sehingga tidak akan ada usaha-usaha mengatasi korupsi dalam program kerjanya.

Agar partai-partai yang nantinya boleh mengajukan calon presiden dan wakilnya untuk mengabaikan pasal dalam RUU yang mengizinkan terdakwa menjadi calon presiden atau wakilnya itu. Dengan demikian, yang dicalonkan oleh partai sebagai presiden dan wakilnya merupakan calon yang terbaik. Para tokoh yang masih berstatus terdakwa sebaiknya menolak jika ada partai yang mencalonkan dirinya sebagai calon presiden maupun wakilnya. Mundurnya calon presiden berstatus terdakwa ini akan menunjukkan kebesaran hati mereka untuk menjunjung kepentingan negara di atas kepentingan partai.”⁹⁹

Pemilu 2004 : Mengokohkan Eksistensi

PK Sejahtera pada Pemilu 2004 berusaha mengejar electoral threshold untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai partai politik. Presiden PK Sejahtera Hidayat Nurwahid mengatakan, hasil perjuangan kader PK Sejahtera untuk

⁹⁸ Saksi, No. 7 Tahun VI, 4 Februari 2004

⁹⁹ www.kompas.com, Minggu, 13 Juli 2003.

pemilu mendatang akan terlihat pada hasil pemilu nanti. Pemilu bagi partai politik merupakan ajang pembuktian kuantitatif dari keseluruhan kekuatan internal. Pasalnya, hanya proses kuantifikasi politik seperti itulah yang dapat dipahami dalam logika demokrasi. Itulah sebabnya, momentum pemilu harus dijadikan sebagai puncak pencapaian kuantitatif dari setiap kepengurusan. Untuk itu, program populis banyak dilakukan untuk meraih dukungan maksimal. Program itu seperti pemberantasan korupsi, bantuan kemanusiaan untuk wilayah konflik, sekolah rakyat, advokasi buruh, pelayanan kesehatan nasional, seni budaya nasional, dan pendampingan petani, nelayan, dan pengusaha kecil, serta melakukan bimbingan moral remaja dan pelajar.¹⁰⁰

Tema kampanye PKS kemudian menyesuaikan dengan tujuan di atas. Maka dipilihlah tema kampanye BERSIH dan PEDULI. Tema kampanye ini dijelaskan Hidayat Nurwahid sebagai berikut,

“Menciptakan pemerintahan yang bersih dan peduli pada persoalan yang dihadapi rakyat. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kualitas dalam berbangsa dan bernegara. Dan kepedulian pemimpin pada rakyat, akan mampu menyejahterakan kehidupan rakyat. Itu sebabnya, bersih dan peduli juga menjadi tema kampanye dalam iklan PK Sejahtera. Sebagai orang beriman, maka bersih menjadi syarat untuk mendapat dukungan Allah SWT. Dan peduli, menjadi prasyarat mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Semakin peduli pada sesama, semakin besar dukungan yang akan diberikan oleh masyarakat.”¹⁰¹

Agenda pemenangan Pemilu 2004 bagi PKS bukanlah hal yang main-main. Untuk melegitimasi agenda ini, Dewan Syari'ah Pusat DPP PKS mengeluarkan Bayan (penjelasan) tentang jihad siyasi. Dalam Bayan Dewan

¹⁰⁰ www.kompas.com, Rabu, 24 Maret 2004

¹⁰¹ www.kompas.com, Rabu, 24 Maret 2004

Syariah Pusat PKS No: 01/B/K/DS/V/1424 tentang jihad siyasi dijelaskan bahwa ketujuh sasaran¹⁰² dakwah secara keseluruhan meniscayakan perjuangan politik, tetapi empat sasaran yang terakhir menuntut perjuangan jihad siyasi. Sebab kekuatan Islam sebagai ajaran hanya dapat ditegakkan dalam kehidupan dengan kekuatan leadership di tangan Islam. Dan sebagai konsekuensi dari dicanangkannya jihad siyasi untuk sukses partai dalam pemilu 2004, maka ada kewajiban untuk berkomitmen terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap kader berkewajiban menunaikan peran-peran siyasi secara proaktif dan terorganisir.
2. memastikan bahwa setiap kegiatan politik telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
3. setiap kegiatan politik senantiasa dijalankan dengan cara-cara yang "hikmah" (bijaksana, *pen*).
4. melaksanakan prinsip "sam'an wa tha'atan" pada setiap tugas yang diberikan oleh partai dalam rangka taat kepada Allah dan RasulNya.
5. Setiap kader wajib untuk bertadlhiyah (berkorban, *pen*) dengan tenaganya, harta, waktu dan fasilitas lain yang dimilikinya.
6. Semua jajaran partai wajib untuk melakukan mobilisasi potensi dari kekuatan yang ada.

¹⁰² Tujuh sasaran yang dimaksud adalah membina pribadi-pribadi muslim, keluarga yang islami, masyarakat yang islami, pemerintah yang islami, negara yang islami pembebasan negeri kita dari hegemoni asing, dan mengembalikan ummat Islam ke posisi sebagai guru dunia..

7. Setiap kader yang mendapat tugas dari partai wajib melakukan melakukan "murabathah", siap siaga, untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
8. Apapun yang terjadi dalam melaksanakan tugas wajib dilaporkan / dipertanggungjawabkan kepada qiyadah (pemimpin, *pen*) masing-masing.

Seruan jihad siyasi diharapkan dapat memompa *spirit* para aktivis PK untuk memenangkan partainya dalam Pemilu 2004.

Poros Penyelamat Bangsa

Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Rakyat (PAN) sepakat untuk membentuk Poros Penyelamat Bangsa yang bertujuan menyelamatkan hasil pemilu legislatif, menyusul munculnya sejumlah kekecewan terhadap hasil perhitungan suara. Menurut Hidayat Nur Wahid, pertemuan membahas situasi yang sedang terjadi di tengah bangsa Indonesia, terlebih adanya situasi yang memprihatinkan, sehingga perlu dicari solusinya. Hidayat juga menandakan bahwa pihaknya tidak menolak hasil Pemilu sampai detik ini, tetapi akan terus mengkritisi untuk menyelamatkan agenda Pemilu. Oleh karena itu, PKS menuntut KPU untuk segera memerintahkan KPUD di daerah untuk membuka dan mempublikasikan setiap hasil perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik di media lokal maupun nasional¹⁰³

¹⁰³ www.gatra.com, 13 April 2004

IV.4. Periode *Musyarakah* : Menjadi *The Rulling Party*

Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPP PK Sejahtera, Almuzammil Yusuf menjelaskan bahwa ada tiga keputusan penting Majelis Syuro IV PK Sejahtera tanggal 24-25 April 2004, yakni :

1. Mengukuhkan keputusan Musyawarah Majelis Syuro untuk tidak mengajukan calon Presiden dan atau calon wakil presiden dari kader PK Sejahtera.
2. Melaksanakan amanah konstituennya dengan berkonsentrasi pada perjuangan politik di lembaga legislatif secara kritis dan konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Musyawarah Majelis syuro IV PK Sejahtera menugaskan syuro Lembaga lembaga Tertinggi Partai mencermati dan mengevaluasi dinamika politik untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada kader dan simpatisan PK Sejahtera serta masyarakat tentang pemilihan presiden RI pada putaran pertama dan putaran kedua.

Kata “kritis” dan “konstruktif” yang digunakan dalam keputusan MS ini menurut Almuzammil dimaksudkan untuk menghindari konotasi “miring” kata “oposisi”. Dua kata tersebut dapat dipahami dengan sederhana sebagai kewajiban “amar ma’ruf nahi munkar (memerintah yang baik dan mencegah yang buruk) (QS.3: 110) yang lebih menjelaskan makna sikap “kritis” PKS terhadap pihak penguasa. Yang kedua, sebagai kewajiban “wata’awanu ‘alal birri wattaqwa (salin

tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) yang lebih menjelaskan sikap “konstruktif” terhadap kebijakan penguasa yang positif.

Almuzammil menegaskan bahwa peran oposisi “kritis dan konstruktif” di atas, baik dalam konteks keislaman dan kebangsaan, bukan hanya boleh, bisa dan harus dilakukan oleh Partai. Tapi juga boleh, bisa dan harus menjadi peran dan perhatian seluruh komponen masyarakat dan bangsa, tanpa terkecuali. Maka yang urgen dilakukan adalah menjadikan gerakan oposisi menjadi gerakan yang simultan. Gerakan struktural di tingkat elit dan pelebagaan politik. Serat gerakan struktural yang melibatkan masyarakat luas.¹⁰⁴

Pilpres Putaran 1 : Mendukung Amin-Siswono

Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPP PK Sejahtera, Almuzammil Yusuf menjelaskan bahwa ada tida keputusan penting Majelis Syuro IV PK Sejahtera tanggal 24-25 April 2004, yakni :

4. Mengukuhkan keputusan Musyawarah Majelis Syuro untuk tidak mengajukan calon Presiden dan atau calon wakil presiden dari kader PK Sejahtera.
5. Melaksanakan amanah konstituennya dengan berkonsentrasi pada perjuangan politik di lembaga legislatif secara kritis dan konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.

¹⁰⁴ Saksi, No, 15 Tahun VI, 26 Mei 2004

6. Musyawarah Majelis syuro IV PK Sejahtera menugaskan syuro Lembaga-lembaga Tertinggi Partai mencermati dan mengevaluasi dinamika politik untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada kader dan simpatisan PK Sejahtera serta masyarakat tentang pemilihan presiden RI pada putaran pertama dan putaran kedua.

Kata “kritis” dan “konstruktif” yang digunakan dalam keputusan MS ini menurut Almuzammil dimaksudkan untuk menghindari konotasi “miring” kata “oposisi”. Dua kata tersebut dapat dipahami dengan sederhana sebagai kewajiban “amar ma’ruf nahi munkar (memerintah yang baik dan mencegah yang buruk) (QS.3: 110) yang lebih menjelaskan makna sikap “kritis” PKS terhadap pihak penguasa. Yang kedua, sebagai kewajiban “wata’awanu ‘alal birri wattaqwa (salin tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) yang lebih menjelaskan sikap “konstruktif” terhadap kebijakan penguasa yang positif.

Almuzammil menegaskan bahwa peran oposisi “kritis dan konstruktif” di atas, baik dalam konteks keislaman dan kebangsaan, bukan hanya boleh, bisa dan harus dilakukan oleh Partai. Tapi juga boleh, bisa dan harus menjadi peran dan perhatian seluruh komponen masyarakat dan bangsa, tanpa terkecuali. Maka yang urgen dilakukan adalah menjadikan gerakan oposisi menjadi gerakan yang simultan. Gerakan struktural di tingkat elit dan pelembagaan politik serta gerakan struktural yang melibatkan masyarakat luas.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Saksi, No, 15 Tahun VI, 26 Mei 2004

Sebagai konsekuensi dari keputusan MMS IV di atas maka Partai Keadilan Sejahtera tidak mengajukan calon presiden maupun calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004. PKS memilih menjadi partai oposisi. Hidayat menegaskan bahwa PKS akan memperkuat diri di parlemen. Kalaupun dikatakan oposisi, maka oposisi yang kritis, konstruktif, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN.

Selain tidak mau mencalonkan presiden maupun wakil presiden (wapres), PKS juga tidak mau mendukung calon dari partai lain. Namun, MMS PKS tetap menugaskan partai mencermati dinamika politik sebagai bahan rekomendasi bagi kader dan simpatisan PKS. Menurut Hidayat, rekomendasi bagi warga dan simpatisan PKS sangat bergantung pada perkembangan politik. PKS akan membahas apakah akan menganjurkan memilih yang terbaik dari yang terburuk, memilih orang yang dekat dengan kriteria calon presiden (capres) PKS, memilih sesuai dengan hati nurani, atau malah meminta agar tidak memilih.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, kata Hidayat, telah berupaya membangun koalisi keumatan antara partai-partai Islam dan berbasis umat Islam serta kalangan nasionalis, demokratis, dan reformis lainnya. Sayangnya, upaya membangun koalisi itu belum membuahkan hasil yang menggembirakan untuk mengajukan satu pasangan capres dan calon wapres.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) PKS Rahmat Abdullah, dari upaya menjaring capres lewat mekanisme internal partai yang disebut Jaring Capres PKS, Hidayat Nur Wahid memperoleh suara terbesar.

Namun, karena total perolehan suara PKS tidak sampai 20 persen, maka sesuai dengan hasil keputusan MMS III, PKS tidak dapat mengajukan Hidayat sebagai capres atau calon wapres. Dari hasil jaring capres itu, Hidayat meraih 197 suara, diikuti Amien Rais (83 suara), dan Hasyim Muzadi (80 suara).¹⁰⁶

Sebelumnya PKS menjaring nama-nama capres melalui kegiatan yang disebut "Jaring Capres Emas (Elemen Masyarakat)", sekadar untuk mengetahui aspirasi konstituennya. Melalui seleksi itu, terjaring 10 nama. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid, Wiranto, Amien Rais, Nurcholish Madjid, Susilo Bambang Yudhoyono, Hasyim Muzadi, Syafi'i Ma'arif, B.J. Habibie, Salahuddin Wahid, dan KH Abdullah Gymnastiar.

Alasan untuk tidak mengajukan kader partai sebagai capres atau pun cawapres menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta, Ahmad Heryawan, dikarenakan ada unsur-unsur umat yang lain yang juga harus diperhatikan. Dia mengkhawatirkan, jika PK Sejahtera maju sendiri malah tidak dapat apa-apa, sementara umat justru tersakiti. Sementara target PKS adalah mempersatukan umat. Karena itu, PK Sejahtera merintis koalisi umat untuk menghasilkan capres dan cawapres dari umat yang akan didukung bersama secara "all out". Berdasar pada kepentingan bersama itulah maka PK Sejahtera memutuskan untuk tidak mengajukan kader terbaik partai sebagai capres atau cawapres, sebagai politik bernegaranya partai.

¹⁰⁶ www.kompas.com, Senin, 26 April 2004

Di sisi lain Ketua Departemen Politik dan Hukum DPP PKS Untung Wahono menilai kelompok Islam menyia-nyiakan kesempatan. Untung mengatakan,

“ Saya menilai kelompok-kelompok Islam ini menyia-nyiakan kesempatan . Sebab jika hasil pemilu digabung antara PKB, PPP, PKS, PAN, PBB, PBR dan PPNUI, itu suara bisa mencapai 38%. Ini merupakan suatu peluang, minimal untuk bisa maju ke babak kedua. Sekarang saya khawatir suara umat akan terpecah-pecah. Ada PKB dengan koalisinya, PAN dengan koalisinya, dan PPP juga. Dan yang membantu, PKS dengan tidak mengajukan calon presidennya. Tetapi dengan pilihan itu pun sangat sulit untuk menolong partai-partai yang kita anggap partai Islam atau berbasis umat Islam.”¹⁰⁷

Namun begitu, sesuai dengan poin keempat Musyawarah Majelis Syuro (MMS) IV, bahwa MMS IV PK Sejahtera menugaskan syuro Lembaga-lembaga Tertinggi Partai mencermati dan mengevaluasi dinamika politik untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada kader dan simpatisan PK Sejahtera serta masyarakat tentang pemilihan presiden RI pada putaran pertama dan putaran kedua maka, lembaga-lembaga tinggi partai seperti Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Partai dan Dewan Syuro akan terus melakukan rapat gabungan untuk menyikapi perkembangan yang ada dan tentang adanya kemungkinan pasangan capres dan cawapres yang pantas didukung¹⁰⁸.

Keputusan yang menentukan perihal rekomendasi PKS yang dikeluarkan dalam menyikapi Pilpres tahap pertama dibahas dalam MMS V pada 29 Juni 2004. Setelah melewati pembahasan yang cukup alot dan panjang, dalam pernyataan pers bertajuk "Rekomendasi PKS tentang Pemilihan Capres-Cawapres", PKS, akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan Amien Rais-

¹⁰⁷ Lihat wawancara dengan Untung Wahono dalam Saksi, No. 16 Tahun VI, 9 Juni 2004

¹⁰⁸ Kompas, Minggu, 25 April 2004.

Siswono Yudohusodo. Presiden PKS, Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa keputusan memilih Amien Rais diperoleh Selasa malam 29 Juni 2004, dalam sidang yang diikuti 44 anggota Majelis Syura PKS. Dari 44 anggota Majelis Syura, kata Hidayat, 70% memilih Amien Rais. Sisanya mendukung Wiranto-Salahuddin Wahid, Hamzah Haz-Agum Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi sama sekali tidak mendapat suara.

Keputusan PKS memilih capres-cawapres tertunda beberapa pekan, menurut Hidayat, karena partainya ingin mencermati pelaksanaan kampanye tiap capres. Dari proses kampanye itu, menurutnya, terlihat siapa calon yang konsisten dengan komitmennya. Dan siapa pula yang cuma *lips service*. Setelah dievaluasi, Amien-Siswono disimpulkan sebagai yang terbaik. Pasangan itu dianggap paling mendekati tiga kriteria yang ditetapkan sidang Majelis Syura PKS: reformis, demokratis, dan Islami. Amien dianggapnya tidak sekadar berwacana, melainkan juga konsekuen. Amien antara lain berani menandatangani kontrak politik dengan mahasiswa..

Kontrak politik yang dimaksudnya adalah "kesepakatan" Amien Rais dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), 9 Juni 2004, yang berisi tujuh poin. Yakni: akan mengadili Soeharto dan kroninya, menegakkan hukum, menolak militerisme, memerangi korupsi, memperbaiki pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengendalikan harga bahan pokok, memperbaiki nasib buruh, nelayan, dan petani, serta mewujudkan kemandirian bangsa.

Yang jelas, dengan keluarnya rekomendasi ini, Hidayat menyatakan tak ada lagi polemik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di tubuh PKS memang sempat terjadi tarik-menarik antara kelompok yang mendukung Amien Rais dan Wiranto. Disebut-sebut, kelompok muda yang dimotori Anis Matta cenderung menyokong Wiranto, sedangkan tokoh tua memilih Amien.

Pada kesempatan itu, Anis Matta mengaku terus terang sebagai pendukung Wiranto. Ia menegaskan sikapnya sebagai pendapat pribadi. Setelah Majelis Syura memutuskan mendukung pasangan Amien-Siswono, maka Anis pun mengoreksi pendapat pribadinya. Ia menaati keputusan Majelis Syura. Ia yakin, rekomendasi Majelis Syura tak akan menimbulkan perpecahan di antara kader partai.¹⁰⁹

Pilpres Putaran 2 : *Musyarakah* Bermodal Nota Kesepahaman

Pilihan sulit menunggu PKS di Pilpres putaran kedua. Ini terjadi setelah Pilpres putaran pertama menyisakan dua kandidat yang dianggap kurang menjanjikan perbaikan kehidupan bangsa. Yaitu pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Yusuf Kalla. PKS dihadapkan dalam dua tiga pilihan yang sangat sulit. Memilih Mega-Hasyim, SBY-Kalla atau tidak memilih (golput).

Untuk pilihan golput, PKS secara tegas menolak. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua Dewan Syari'ah DPP PKS Salim Segaf Al Jufri. Salim mengatakan,

¹⁰⁹ www.gatra.com, 2 Juli 2004

“ Golput itu tidak menyelesaikan masalah. Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah selalu melakukan perubahan. Dan jika perubahan tersebut belum dilakukan secara maksimal, kita melakukan perubahan yang minimal...Semestinya ia (umat, *pen*) punya beberapa alternatif. Dan harus memilih alternatif terbaik untuk bangsa dan uma. Saya yakin kalau dilakukan komparatif atau suatu *muhazanah* pasti akan ada satu solusi yang ada manfaatnya untuk umat. Contohnya, kalau golput dampaknya ini, kalau memilih si A salah satu dampaknya akan begini, kalau memilih si B umpamanya dampaknya ada tapi lebih ringan. Dan kalau menurutnya golput yang paling ringan, mungkin bisa dijelaskan kenapa itu yang paling ringan dari semua yang buruk”.¹¹⁰

Dengan pemahaman demikian maka PKS mengintensifkan pembahasan alternatif-alternatif tersebut. Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta hari Rabu, 18 Agustus 2004 mulai melakukan rapat tertutup guna menentukan sikap pada Pemilu Presiden putaran kedua 20 September 2004. menurut Almuzzamil, sebuah tim telah dibentuk untuk mengkaji tiga pilihan yakni apakah PKS akan mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, atau menyerahkan pilihan kepada hati nurani dari seluruh anggota dan simpatisan PKS. Tim tersebut akan memaparkan hasil kajiannya dalam Musyawarah Majelis Syuro, untuk ditanggapi.

Sejumlah aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan capres itu antara lain kemampuan dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, sikap terhadap militerisme, independensi terhadap pengaruh asing, perhatian terhadap ekonomi kerakyatan, serta sikap proporsional terhadap isu terorisme. Dari hal-hal tersebut, akan dikaji pasangan mana yang paling

¹¹⁰ Lihat wawancara dengan Salim Segaf Al Jufri dalam Saksi, No.21 Tahun VI, 18 Agustus 2004.

mungkin sukses melakukannya. PKS tidak mempertimbangkan isu gender maupun militer non-militer, tetapi sikap militerisme.¹¹¹

Dukungan PKS di Pilpres putaran kedua ini tentu saja tidak diberikan begitu saja. Seperti halnya dukungan pada Pilpres putaran pertama, dukungan PKS di putaran kedua ini dilandasi oleh beberapa tujuan. Dukungan yang akhirnya mengakibatkan PKS terlibat (*musyarakah*) dalam Pilpres atau kemudian dalam pemerintahan dilandasi oleh beberapa pemikiran. Salim mengatakan,

“Umat seharusnya memiliki sikap bersama. Apalagi sebagai sebuah kekuatan mayoritas di negeri ini. Dan salah satunya harus ada kontrak politik dengan kekuatan yang ingin di *endorse*. Bisa juga misalnya kedua-duanya (Mega-Hasyim dan SBY-Kalla, *pen*) nilainya sama, mungkin ini berat. Dan bisa jadi tidak meng-*endorse* kedua-duanya. Atu kita concern di parlemen untuk mengkritisi pemerintah, itu juga salah satu pilihan. Jadi tidak musti memilih. Kalau terjadi dukungan kepada salah satunya jelas umat akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat itu sendiri. Misalnya memberikan syarat agar tidak melakukan hubungan diplomasi dengan Israel. Ini salah satu kontrak politik atau salah satu syarat dukungan tersebut, karena Yahudi telah mengambil hak-hak orang-orang palestina dan itu bertentangan dengan undang-undang dasar kita, dan banyak lagi konsiderannya. Syarat berikutnya misalnya melaksanakan agenda reformasi. Artinya pemerintah tidak main-main lagi untuk tidak serius dalam melaksanakan agenda reformasi...”¹¹²

Akhirnya, setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang MMS VI memutuskan sikap politiknya untuk mendukung pasangan SBY-JK. Dukungan ini tertuang dalam melalui Bayan DPP PKS Nomor : 02/BYN/DPP-PKS/VII/1425

Adapun keputusan MMS VI diantaranya :

¹¹¹ www.kompas.com, Rabu, 18 Agustus 2004

¹¹² Wawancara dengan Salim Segaf Al Jufri. *Op.cit*

1. PK Sejahtera mengukuhkan untuk melakukan musyarakah dalam pemerintahan sehingga akan menentukan pilihan pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada putaran kedua.
2. PK Sejahtera mendukung dan siap memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Yusuf Kala (SBY – JK).
3. Dukungan diberikan apabila yang bersangkutan siap menandatangani kesepahaman bersama sebagaimana arahan Majelis Syura.
4. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka keputusan selanjutnya ditentukan oleh Rapat Gabungan Terbatas Lembaga Tinggi Partai
Dalam bayan tersebut dijelaskan pula beberapa alasan terkait dengan pemilihan tersebut, antara lain,
 1. Dari pemilihan internal terhadap calon presiden yang akan didukung oleh para kader PK Sejahtera (Jaring Capres Emas), tinggal nama SBY yang dapat diusung.
 2. SBY dinilai lebih mendekati kriteria calon presiden pilihan PK Sejahtera sebagaimana yang diputuskan dalam MMS III.
 3. SBY dalam lima tahun ke depan diperkirakan dapat melakukan kerjasama politik dengan PK Sejahtera dengan platform dan agenda yang disepakati dalam kerangka kepemimpinan nasional dan perubahan.
 4. Survey-survey secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana yang dilakukan oleh partai dan lembaga-lembaga survey memperlihatkan bahwa

pemilih PK Sejahtera mempunyai kecenderungan besar untuk memilih pasangan SBY – JK baik pada putaran pertama maupun kedua.

5. Dengan sikap politik yang telah dideklarasikan PK Sejahtera efektivitas dukungan terhadap SBY – JK diyakini semakin meningkat, dan dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan lain baik partai politik, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok rakyat PK Sejahtera memperkirakan pasangan SBY – JK akan memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua ini.
6. Terklarifikasinya beragam fitnah yang ditujukan pada pasangan SBY – JK.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat PKS Hidayat Nur Wahid menandakan bahwa keputusan ini bersifat mengikat kepada seluruh pengurus dan kader PKS serta menjadi pedoman bagi simpatisan dan konstituen yang bertekad untuk melakukan perubahan bersama PKS. Kepada seluruh jajaran struktur, fungsionaris, dan kader PKS, ia meminta agar berusaha menyukseskan keputusan ini sebaik dan seoptimal mungkin dan bekerja sama dengan seluruh komponen rakyat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang properubahan.

Dukungan penuh PKS didasari pada nota kesepahaman dengan Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk menjalin kebersamaan dalam melaksanakan perubahan menuju Indonesia madani yang adil, aman, dan sejahtera.

Kesepahaman PKS dan Yudhoyono-Jusuf terdiri atas lima pokok. *Pertama*, konsisten melakukan perubahan untuk membangun pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional. Hal itu antara lain dibuktikan dengan keteladanan

dan kesiapan memberhentikan anggota kabinet yang melakukan korupsi, tidak mengulangi kesalahan pengelola negara yang sebelumnya, dan tidak menjadikan kekuasaan untuk menzalimi umat dan bangsa Indonesia.

Kedua, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan dan pergaulan dunia internasional. *Ketiga*, melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi dalam rangka terbentuknya masyarakat madani, mengedepankan supremasi sipil, dan tidak menghadirkan pemerintahan militeristik dan atau police state.

Keempat, meningkatkan moralitas bangsa, kualitas masyarakat dan kesejahteraan rakyat, dan mengedepankan penegakan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. *Kelima*, mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina dalam mencapai kemerdekaannya dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Perubahan yang diperjuangkan PKS bersama Yudhoyono-Jusuf tidak hanya pergantian penguasa, tetapi juga perubahan agar kondisi bangsa makin mendekati cita-cita kemerdekaan. Secara konkret, perubahan akan diwujudkan dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, melanjutkan reformasi, pendidikan yang murah, meningkatkan kesejahteraan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan membuka iklim investasi.¹¹³

¹¹³ www.kompas.com, Jumat, 27 Agustus 2004

Penyusunan Kabinet

Naiknya pasangan SBY-Kalla sebagai presiden terpilih hasil Polpres 2004 putaran kedua tidak serta merta membuat semua nota kesepahaman yang telah disetujui dengan PKS dilaksanakan. Salah satunya adalah jatah menteri yang tidak sesuai janji. Semula SBY-Kalla menjanjikan empat menteri kepada PKS, namun akhirnya hanya tiga menteri saja yang diambil. Itupun pada kementerian yang tidak strategis. PKS yang semula menyatakan diri sebagai *The Rulling Party*, pada faktanya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Hal inilah yang membuat jajaran PKS kecewa. Seperti yang dikatan oleh Presiden PKS, Tifatul Sembiring,

“The ruling party itu artinya partai pemerintah. Itu kan ada di nota kesepahaman? Realitanya ia tidak mengajak kita dalam penyusunan kabinet di pemerintahan, itu masalah SBY-JK sendiri. Kita sudah buat nota kesepahaman. Kalau ternyata seperti sekarang, kita memang bukan the rulling party. Kita seperti orang yang diawal diajak. Lalu kita menggerakkan mesin politik dan mereka menang. Sekarang kita dikasih 3 kursi menteri. Bagi kita itu bukan the ruling party. Kayak ngasih kue, tapi tidak strategis!”¹¹⁴

Pluralisme Politik PKS dalam Pilkada

Walaupun tidak akan mengikuti semua pilkada yang diselenggarakan tahun ini, PKS bertekad untuk memenangkan kadernya di 40 daerah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKS Muhammad Razikun, di antara 40 wilayah itu, sebanyak 32 daerah sudah selesai menunjuk nama kader yang disiapkan untuk bertarung dalam pilkada.

¹¹⁴ Lihat wawancara dengan Tifatul Sembiring dalam Saksi, No. 5 Tahun VII, 8 Desember 2004.

Target optimis ini ditetapkan karena PKS sudah memperhitungkan basis kekuatan partai dan partai lain yang menjadi pasangan dalam pilkada, serta sudah mempersiapkan jaringan pemenangan. Kesiapan itu dilakukan dengan memperkuat jaringan di DPD, DPC, dan terutama mengaktifkan di tingkat ranting di kelurahan. Selain itu, sebagai partai, PKS memiliki modal karena tidak ada konflik internal di tubuh partai. Karena itu, PKS diharapkan mampu untuk terus mengkapitalisasi modal politik yang dimilikinya guna meraih kemenangan.¹¹⁵

Muhammad Razikun mengatakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi PKS dalam pilkada. *Pertama*, seberapa besar potensi dukungan masyarakat dan bagaimana kualitas figur yang diajukan saat harus berkoalisi. Menurut dia, kekuatan dan daya tarik pada pilkada terletak pada figur calon pemimpin daerah yang diajukan dan partai lebih berfungsi sebagai sebagai pintu gerbang.

Kedua, mempertimbangkan kesamaan platform kedaerahan. Maksudnya banyak tokoh-tokoh partai lain di tingkat lokal yang ternyata memiliki "kesamaan" platform kedaerahan dengan PKS. Itulah alasan mengapa PKS di beberapa daerah melakukan koalisi dengan partai seperti Golkar, PDIP, PPP dan PAN. Ia menyebutkan hal seperti itu jangan dilihat bahwa PKS telah "berubah" karena bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki platform berseberangan. Dia menjelaskan, banyak terjadi bahwa tokoh-tokoh lokal yang bekerja sama dengan PKS ternyata platformnya sejalan dengan PKS. Para tokoh itu justru

¹¹⁵ www.kompas.com, Senin, 16 Mei 2005

memiliki pemikiran yang agak berbeda dengan kebijakan partai mereka jika dilihat dari lingkup kebijakan pusat..

Ia juga menambahkan bahwa momen pilkada akan menjadi kesempatan bagi PKS untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat di luar PKS untuk saling bekerja sama konstruktif. Ia kemudian mencontohkan bahwa di Depok, calon walikota PKS Nur Mahmudi Ismail telah mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh umat Katolik dari enam paroki di bawah keuskupan Bogor Utara. hal semacam itu sangat didukung.¹¹⁶

Partai Keadilan Sejahtera juga mengembangkan praktik pluralisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam pilkada tersebut, PKS berkoalisi dengan sejumlah partai, termasuk dengan partai Kristen. Dari 48 koalisi yang dibangun PKS, 40 pilkada dimenangi kader PKS yang didukung partai lain. Parpol koalisi PKS itu di antaranya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Menurut Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Awaluddin dalam sambutannya pada acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) I PKS, koalisi dengan sejumlah partai, termasuk partai Kristen, merupakan bentuk dari pelaksanaan praktik pluralisme yang bukan cuma teori belaka. Menurutnya, untuk memelihara dan menjaga pluralisme bangsa ini, PKS mengembangkan pluralisme tersebut melalui pilkada. Ada 48 koalisi pilkada dengan aneka ragam partai politik. Dari 48 pilkada itu, 40 pilkada dimenangkan PKS dengan rekan-rekan koalisinya.¹¹⁷

¹¹⁶ www.kompas.com, Minggu, 15 Mei 2005

¹¹⁷ www.kkompas.com, Senin, 01 Agustus 2005

Sikap PKS terhadap Kebijakan Tidak Populis Pemerintah

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyesalkan kenaikan harga BBM. F-PKS memahami perlunya pengurangan subsidi BBM, tetapi sekarang ini dirasakan belum tepat karena pemerintah belum memenuhi sejumlah syarat, seperti melakukan audit terhadap Pertamina maupun menindak para koruptor¹¹⁸. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Untung Wahono menyatakan, pihaknya tetap akan mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM secara sepihak, yaitu tidak mengadakan pembicaraan dengan DPR terlebih dahulu. Ia juga mengatakan, kenaikan harga BBM ini hanya didasari pertimbangan ekonomi tanpa kebijakan politik, seperti mengantisipasi situasi masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM.¹¹⁹ Dalam pandangan umumnya, F-PKS menegaskan kembali sikap fraksi yang telah disampaikan sebelumnya kepada pemerintah.¹²⁰ Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Mustafa Kamal menegaskan, fraksinya akan menolak setiap upaya politisasi kenaikan harga BBM untuk kepentingan politik tertentu, seperti menunggangi isu tersebut demi meraih popularitas. Ditegaskannya bahwa pihaknya telah melihat adanya upaya-upaya mempolitisasi masalah kenaikan harga BBM tersebut dengan gagalnya rapat paripurna DPR pada 15 Maret 2005 dan pembahasan masalah yang sama semakin berlarut-larut. Menurutnya, isu kenaikan harga BBM ini jangan dijadikan panggung politik atau sandiwara demi mencari popularitas. Kita harus mengarah pada substansi penyelesaian masalah kenaikan harga BBM ini. Dikatakannya pula

¹¹⁸ www.kompas.com, Rabu, 2 Maret 2005

¹¹⁹ www.kompas.com, Senin, 14 Maret 2005

¹²⁰ www.kompas.com, Senin, 14 Maret 2005

bahwa DPR seharusnya segera merespon aspirasi rakyat dan tidak membuat permasalahan kenaikan harga BBM itu berlarut-larut dengan segera mengambil keputusannya.¹²¹

Sikap kritis PKS juga ditunjukkan pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras. Langkah ini dinilai sangat merugikan petani dalam negeri di samping juga prosedur dan prosesnya yang banyak terdapat kejanggalan. Setelah sejumlah fraksi DPR gagal mengajukan hak angket dan interpelasi impor beras, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) membentuk tim independen untuk melakukan investigasi pelaksanaan impor beras sebanyak 110 ribu ton. Pembentukan tim independen ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam praktik impor beras yang dilakukan pemerintah.¹²²

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring mengatakan investigasi beras impor yang dilakukan Fraksi PKS (FPKS) bukanlah untuk menjatuhkan pemerintah melainkan untuk membantu pemerintah. Menurutnya, investigasi beras impor tersebut merupakan tugas legislatif yang bertindak sebagai kontrol dari kebijakan atau program pemerintah. Hasilnya sendiri akan diberikan kepada presiden guna membantu beliau dalam membersihkan aparatnya. Sinyalemen permainan impor beras itu, kata dia, sudah berlangsung bertahun-tahun yang melibatkan pemain beras Internasional sehingga Tim Investigasi PKS ingin memastikan apakah impor beras itu murni untuk kepentingan nasional atau sebaliknya hanya untuk kepentingan bisnis. Dari hasil

¹²¹ www.gatra.com, 16 Maret 2005

¹²² www.kompas.com, Kamis, 26 Januari 2006

investigasi ini diperoleh data bahwa terdapat selisih harga sebesar 0.5 US \$ per ton. Menurut anggota tim investigasi, Tamsil Linrung, selisih harga terjadi karena 'double insurance' (asuransi ganda), setelah masuk Indonesia wajib bayar asuransi lagi, padahal pihak Vietnam sudah bayar asuransi. Tamsil mengatakan, selisih sekitar 40 ribu dolar itu menurut pihak Vietnam adalah *payment service fee* pada perusahaan Singapura. Total pembayarannya sebesar 427 juta dolar AS.¹²³

Meninjau Koalisi

Koalisi dalam tubuh pemerintahan yang dibangun ternyata berjalan diluar yang diharapkan. Berbagai kebijakan yang tidak populis, tidak efektifnya kinerja pemerintahan yang disebabkan terlalu luasnya koalisi yang dibangun Presiden SBY. Tidak diperhatikannya masukan atau bahkan diikutsertakannya PKS dalam membuat kebijakan-kebijakan krusial membuat PKS merasa perlu meninjau kembali koalisi yang dibangunnya dengan pemerintahan SBY-JK.

Tifatul Sembiring mengungkapkan fenomena di atas,

"Kita selalu bertemu, konsultasi, dan memberi saran kepada presiden maupun wakil presiden, namun memang harus diakui, banyak yang tidak ada efeknya"¹²⁴

Menyikapi kondisi ini Sekjen DPP PKS, Anis Matta bahkan menyampaikan pernyataan yang lebih keras lagi. Dia mengatakan,

"Koalisi PKS dengan pemerintah adalah untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Saat ini harapan akan perubahan melalui pemerintahan ini semakin menipis. Peluang sukses pemerintahan saat ini untuk mewujudkan perubahan nyaris tidak ada lagi. Karena itu, PKS tengah mempertimbangkan kemungkinan menarik diri dari koalisi dengan

¹²³ www.kompas.com, Sabtu, 18 Februari 2006

¹²⁴ www.kompas.com, Selasa, 21 Desember 2004

pemerintah. Desakan dari daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk menarik dukungan dari koalisi dengan pemerintah sudah meluas dan merata. Tidak hanya pada tingkat akar rumput yang lebih nyata mengalami dampak kesulitan ekonomi, tetapi juga dari para pengurus dan pimpinan.

Selain merata dan luasnya desakan dari daerah, langkah untuk penarikan diri dari koalisi dengan pemerintah adalah nota kesepahaman yang ketika kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden ditandatangani. Saat itu PKS mendukung dan bergabung dalam koalisi lantaran mengharapkan adanya perubahan. Saat ini potensi kegagalan pemerintah untuk mewujudkan perubahan lebih besar. Kalau PKS tetap bertahan, selain tidak sesuai dengan nota kesepahaman koalisi, PKS akan seperti lilin. Berfungsi menerangi saja, tetapi kemudian habis meleleh di tangan. Pertimbangan lain yang menjadi dasar penarikan dukungan pada koalisi dengan pemerintah adalah tidak dilibatkannya PKS dalam pengambilan keputusan mendasar yang berdampak besar kepada rakyat. Misalnya, kebijakan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jadi kenapa PKS harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan pemerintah kalau PKS tidak terlibat dalam pengambilan keputusan?¹²⁵

Sebagai partai yang terlibat dalam koalisi pemerintahan SBY, tetap menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan pemerintah seperti impor beras. Dalam kasus impor beras ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk tetap mendukung hak angket soal impor beras. F-PKS bahkan mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menarik para menteri PKS dari kabinetnya apabila merasa terganggu atas kehadiran mereka. Bahkan Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, tidak masalah bagi PKS bila terjadi pencoretan menteri dari partai pendukung pemerintah yang mendukung hak angket ini. Mahfudz mengatakan, F-PKS mengakui dalam sistem politik saat ini ada abnormalitas, tetapi Presiden pun ikut andil menciptakan abnormalitas itu dengan terus memperluas koalisi tanpa kerangka jelas, bukan didasarkan pada kesamaan visi dan platform.

¹²⁵ www.kompas.com, Senin, 31 Oktober 2005

Guna menentukan kelanjutan koalisinya, menyelenggarakan Sidang Majelis Syuro III yang berlangsung sejak tanggal 26 November 2005. Dalam delapan butir pernyataan sikap PKS terhadap koalisi dengan SBY-JK, yang dihasilkan Sidang Majelis Syuro III, disebutkan bahwa selama satu tahun terakhir pencapaian kontrak politik PKS dengan SBY-JK belum mencapai titik optimal. Menurut kesimpulan Majelis Syuro, kontrak politik PKS dengan SBY-JK belum optimal dalam hal memenuhi harapan masyarakat, namun masih dalam batas-batas toleransi karena situasi bangsa masih dalam masa transisi. Dalam rangka mengawal perbaikan kinerja pemerintah, PKS akan memosisikan diri sebagai mitra kritis konstruktif bagi pemerintah.¹²⁶

Dalam sidang itu akhirnya diputuskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak akan menarik dukungan dari Kabinet Indonesia Bersatu. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa dalam kerangka mengawal perbaikan kinerja pemerintah, PKS memosisikan diri sebagai mitra kritis konstruktif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan segala persoalan nasional yang sedang dihadapi, maka PKS akan meningkatkan efektivitas kontribusinya dalam koalisi. Menurut Tifatul, evaluasi poin demi poin kontrak politik PKS dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla selama satu tahun pertama memang masih belum optimal memenuhi harapan masyarakat,

¹²⁶ www.kompas.com, Minggu, 27 Nopember 2005

tetapi masih dalam batas-batas toleransi karena situasi Indonesia masih dalam transisi. Tifatul menambahkan, keputusan Majelis Syuro PKS bukanlah ke arah nuansa minta-minta jabatan di pemerintahan atau menteri, tetapi lebih menekankan bagaimana kualitas Kabinet Indonesia Bersatu bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Hal yang terkait dengan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, PKS menekankan reshuffle kabinet harus berorientasi kepada kemaslahatan bangsa dan negara.¹²⁷

Walaupun begitu, Tifatul tetap mengusulkan reshuffle kabinet terutama tim ekonomi,

"PKS meminta agar perombakan kabinet dilakukan khususnya di tim ekonomi. Tanpa menyebutkan nama-nama menteri yang kami maksud, PKS akan menyampaikan permintaan perombakan kabinet ini kepada pemerintah, sehingga kalau pun tim ekonomi tidak jadi dirombak maka orang yang dimaksud tidak dirugikan."¹²⁸

Pemberantasan korupsi

Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam hitungan hari jika tidak terlihat adanya perubahan dalam kinerja Kejaksaan Agung yang dinilai tidak mempunyai nyali memberantas korupsi. Ia hanya punya nyali untuk memberikan *dissenting opinion* dalam kasus Akbar Tandjung, tetapi tidak punya nyali untuk memberantas korupsi.

¹²⁷ www.kompas.com, Senin, 28 Nopember 2006

¹²⁸ www.kompas.com, Minggu, 27 Januari 2005

Dalam dukungannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebelum menjabat sebagai presiden, PKS pernah meminta posisi Jaksa Agung. Diakuinya, saat itu PKS menyodorkan kadernya, Suropto, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Staf Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), dan kini anggota Komisi I DPR. Suropto adalah orang yang pernah mencoba memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bidang kehutanan. Sebagian di antaranya telah diadukan ke Kejaksaan Agung dan menyangkut kroni dan keluarga mantan Presiden Soeharto. Di antaranya, korupsi Rp 50 miliar yang melibatkan Probosutedjo, manipulasi foto udara PT Mapindo Parama milik Bob Hasan, dan Gatari Utama Air Service milik Tommy Soeharto.¹²⁹

Adapun usaha pemberantasan korupsi, menurut Tifatul, PKS mendukung kerja keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Upaya ini harus terus ditingkatkan, baik terkait dengan kualitas perkara, kecepatan penanganan maupun jumlah kasusnya, sehingga masyarakat merasa upaya-upaya tersebut bukan hanya sekadar pemanis bibir belaka," paparnya. Khusus pemberantasan korupsi, menurut Tifatul, PKS akan terus mendorong dan membantu upaya pemberantasan. Karena itu, PKS juga siap melakukan perlawanan jika orang-orang yang terlibat korupsi mulai melakukan perlawanan.¹³⁰

¹²⁹ www.kompas.com, Sabtu, 26 Februari 2005

¹³⁰ www.kompas.com, Minggu, 31 Juli 2005

Setelah menilai buruk kinerja Jaksa Agung, pada Jumat 18 November 2005 PKS mengusulkan untuk dilakukan penggantian Jaksa Agung dalam *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu. PKS mengusulkan dua calon yaitu Ketua Dewan Pakar PKS sekaligus anggota Komisi I DPR Suripto dan anggota Dewan Pakar PKS Arief T Surowidjojo yang juga Ketua Dewan Pengawas Transparency International Indonesia.¹³¹



¹³¹ www.gatra.com, 20 November 2005

BAB V**ANALISA DATA**

Setelah pada bab III dan bab IV penulis memaparkan struktur politik dan bentuk-bentuk praksis politik PKS sejak tahun 1970-2006, pada bab V ini akan dipaparkan analisa terhadap periodeisasi praksis politik PKS serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tiga hal yang akan dianalisa dalam bab ini, *pertama*, kemunculan dan perubahan bentuk praksis politik dari periode satu ke periode selanjutnya. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk praksis politik dan perubahannya dari periode satu ke periode selanjutnya. *Ketiga*, kesesuaian bentuk praktik politik PKS dengan prinsip dan strategi politik yang dimiliki PKS.

V.1. Kemunculan dan Perubahan Bentuk Praksis Politik

Dari data-data yang penulis peroleh terkait dengan praksis politik PKS sepanjang kurun waktu tahun 1970-2006, Penulis klasifikasikan dalam bentuk-bentuk praksis politik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Tabel.5)

Kelahiran gerakan Tarbiyah—dan kemudian bertransformasi menjadi PK dan PKS-- identik dengan proses kelahiran berbagai gerakan kebangkitan (revivalis) Islam lainnya yaitu ditandai dengan semakin tingginya kesadaran dalam berpartisipasi dalam wilayah politik¹.

¹ Esposito, *Op.cit*, hal. 1

Namun di sisi lain faktor krisis politik umat Islam di era Orde Baru juga sangat mempengaruhi kelahirannya. Negara saat itu menurut William Liddle memiliki kekuasaan yang amat besar terhadap masyarakatnya dalam pola-pola kooptasi dan represi.² Dalam format politik Orde Baru, sejak 1968 sampai pertengahan 1980-an, Islam berada dalam posisi pinggiran, bahkan menjadi kekuatan di luar sistem pemerintahan Presiden Soeharto yang berkoalisi dengan kekuatan non-Islam. Bahkan dalam tubuh Golkar yang merupakan mesin politik yang sangat dominan pada waktu itu Islam tidak mendapat tempat.³

Ditambah lagi kebijakan unifikasi ideologi terhadap seluruh ormas, OKP ataupun parpol adalah sebuah bentuk *deislamisasi*⁴ yang menjadikan kondisi tidak kondusif bagi gerakan Islam. Apalagi berbagai bentuk *black propaganda* pemerintah dilancarkan kepada kelompok Islam. Seperti yang diungkapkan pengamat asing David Jenkins tentang tindakan pemerintah terhadap PPP, bahwa nampak tidak bisa disangkal bahwa pemerintah, terutama Kopkamtibnya, bermaksud untuk memanfaatkan gerakan radikal “berjubah Islam” itu sebagai, “ *a desire to contain the PPP within very narrow limits*” (isu untuk menekan PPP dalam batas-batas yang sangat sempit).⁵

Sesuai dengan analisa Dekmejian bahwa hubungan kausal antara krisis sosial dan kebangkitan keagamaan memiliki validitas yang substansial dalam latar belakang budaya yang beraneka ragam.⁶ Ia menyebutkan bahwa kondisi-kondisi krisis yang melatarbelakangi gerakan kebangkitan Islam adalah konflik identitas,

² Ibid, hal. 36-37.

³ Gaffar, hal. 132-133.

⁴ Aminudin, *Op.cit*, hal. 163-164.

⁵ Aminudin, *Op.cit*, hal. 108-109

⁶ Dekmejian, *Op.cit*, hal 5

krisis legitimasi, konflik politik, konflik kelas, krisis ekonomi, krisis budaya, dan kemandulan kekuatan militer, yang bertindak sebagai katalisator dari respon revivalis Islam.⁷

Di tengah represi pemerintah ada beberapa pilihan artikulasi yang menurut Afan Gaffar dapat dilakukan. *Pertama*, melakukan akomodasi dengan sistem kekuasaan yang ada, seperti yang banyak dilakukan oleh kalangan alumni HMI yang bernaung dalam KAHMI. *Kedua*, memilih tetap bergabung dengan partai yang dianggap merepresentasikan Islam, seperti PPP. *Ketiga*, menjaga jarak sama sekali dengan sistem kekuasaan yang berlaku, bahkan dengan mengambil sikap kritis. *Keempat*, memilih sikap konfrontatif dengan pihak kekuasaan, seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok sempalan.⁸

Dari empat pilihan itu, gerakan Terbiyah kemudian memilih alternatif ketiga yaitu menjaga jarak terhadap sistem kekuasaan dan politik negara. Gerakan Tarbiyah menilai pentingnya gaya yang akomodatif dan fleksibel dalam praktiknya.⁹ Maka gerakan Tarbiyah memerankan diri dalam bentuk yang lebih akomodatif sebagai usaha mempromosikan ide-ide Islamnya agar bisa diterima, baik di level masyarakat maupun negara.¹⁰

Dalam tahap perkembangan selanjutnya, transformasi gerakan Tarbiyah menjadi PK—yang kemudian berubah menjadi PKS—dalam kancah politik nasional merupakan dampak dari demokratisasi yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1990-an. Dalam sistem demokrasi, eksistensi partai politik merupakan

⁷ *Ibid*, hal.8

⁸ Gaffar, *Op.cit.* hal. 135

⁹ Machmudi, *Op.cit.* hal. 33

¹⁰ *Ibid.* hal.35

sebuah keniscayaan. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara.¹¹

Demokratisasi inilah yang membuat gerakan Tarbiah berani menunjukkan diri dan menonjolkan identitas kelompoknya. Fenomena ini sebagaimana dijelaskan oleh Esposito-Voll bahwa dampak demokratisasi yang terjadi di negara-negara otoriter yang berdampak pada meningkatnya tuntutan terhadap partisipasi dan pemberdayaan rakyat diiringi pula dengan meningkatnya tuntutan lain yaitu tuntutan terhadap pengakuan identitas khusus atau komunitas-komunitas asli.¹²

Perubahan bentuk praktik politik PKS dari periode satu ke periode menggambarkan pola mobilitas menuju pusat kekuasaan. Fenomena ini bersesuaian dengan hasil pengamatan Esposito bahwa Kebangkitan terus berkembang menjadi gerakan sosio-religius yang luas. Gerakan itu merupakan gerakan yang mempunyai banyak segi yang memberikan dampak utama kebangkitan Islam di masa mendatang. Tujuannya adalah transformasi masyarakat melalui pembentukan individu-individu Islam.¹³

Mobilitas ini berawal dari lingkaran luar (*outer*) sistem politik negara. Tindakan ini merupakan strategi menarik diri (*withdrawal*) dari hiruk pikuk politik lokal pada akhirnya menjadi pilihan yang harus diambil.¹⁴ Kondisi yang melatarbelakangi adalah hebatnya represi rezim Orde Baru

¹¹ Koirudin, *Op.cit.* hal. 15

¹² Esposito-Voll, *Op.cit.* hal.16.

¹³ Esposito, *Op.cit.* hal. 33.

¹⁴ *Ibid*, hal. 53

Tabel 4
Bentuk-bentuk Praksis Politik PKS dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Periode		Bentuk-bentuk Praksis Politik	Faktor-faktor Penyebab
Waktu	Gerakan		
1970-1998	Ekstraparlementer	<p><i>Gerakan tanpa payung lembaga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlawanan dari dalam melalui internalisasi nilai-nilai keislaman • Moderasi yaitu menghindari interaksi dengan kelompok-kelompok yang bersikap dan bersikap radikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru yang represif (Asas Tunggal, Fusi Partai, deideologisasi, black propaganda, rekayasa tatanan politik, NKK/BKK)
		<p><i>Formalisasi gerakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan (Nurul Fikri, Al Hikmah, Sabili, SIDIK, Nasyid, Khairul Ummah, penerbit buku Islam) • Menguasai lembaga-lembaga formal kemahasiswaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendurnya represi terhadap umat Islam • Sikap akomodatif rezim terhadap aspirasi umat Islam • Adanya kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk entitas yang lebih luas • Berkembangnya mekanisme amal jama' I dalam gerakan Tarbiyah
1998--2003	Intraparlemeter	<p><i>Institusionalisasi aktivitas politik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan Partai Keadilan • Mengikuti Pemilu 1999 	<ul style="list-style-type: none"> • Mundurnya Soeharto dan berakhirnya kekuasaan Orde Baru • Reformasi disertai liberalisasi politik • Dicabutnya paket undang-undang politik produk Orba. • Kebutuhan akan wadah perjuangan politik

			<p>formal</p> <ul style="list-style-type: none"> Berpartai dalam kerangka mengembangkan komitmen dan meraih cita-cita dakwah itu dalam tahap lanjut.
		<ul style="list-style-type: none"> Menolak pencalonan Habibie di Pemilu 1999 	<ul style="list-style-type: none"> Buruknya <i>performance</i> pemerintahan Habibie Habibie sebagai representasi Golkar (Orde Baru)
		<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Fraksi Reformasi dan Poros Tengah yang mendukung pencalonan Gus Dur sebagai presiden 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenangan kubu Nasionalis sebagai "ancaman" Semakin berlarut-larutnya ketegangan-ketegangan antara Golkar dengan PDI-P
		<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan piagam Madinah—bukan piagam Jakarta—dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari politisasi amandemen pasal 29 UUD 1945 Sikap yang jelas untuk (1) menjunjung nilai-nilai agama sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945; (2) memberi penekanan pada keadilan posisi agama-agama di Indonesia.
		<ul style="list-style-type: none"> Mengkritisi dan akhirnya meminta Gus Dur mundur 	<ul style="list-style-type: none"> Terlalu mementingkan budaya politik Sering mengeluarkan kebijakan yang menyalahi aturan (inkonstitusional) keinginan Abdurrahman untuk membuka hubungan dagang dengan Israel
		<ul style="list-style-type: none"> Mengkritisi pemerintahan Megawati 	<ul style="list-style-type: none"> kinerja yang mengecewakan Menurunnya kepercayaan publik kepada Megawati Buruknya pola komunikasi

			<ul style="list-style-type: none"> • Privatisasi yang berakibat fatal
2003-- 2004	Pengokohan Gerakan Intraparlementer	<ul style="list-style-type: none"> • Menolak aturan <i>electoral threshold</i> dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 • Mendirikan Partai Keadilan Sejahtera • Melakukan fusi PK dan PKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak lolos ET • Tidak adanya konsistensi dalam UU Pemilu • Rekonsolidasi kekuatan Orba dan non-reformis
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyerukan Jihad siyasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terancamnya reformasi oleh kelompok-kelompok pro-staus quo. • Merupakan ajang pembuktian kuantitatif dari keseluruhan kekuatan internal
		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program-program populis 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbesar dukungan politik
2004-2006	<i>The Ruling Party</i>	<p><i>Membangun Koalisi Parlemen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat Poros Penyelamat Bangsa • Mendukung Amin-Yudoyono di Pilpres putaran 1 • Mendukung SBY- JK di Pilpres putaran 2 • Bergabung dalam Koalisi Kerakyatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekecewaan atas hasil Pemilu yang penuh kecurangan • Amin paling memenuhi kualifikasi • SBY-JK dinilai lebih mendekati kriteria calon presiden pilihan PK Sejahtera dan bersedia menandatangani nota kesepahaman • Polarisasi antara kekuatan oposisi dan pendukung pemerintah
		<p><i>Membangun Koalisi pemerintahan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoalisi dalam pemerintahan SBY-JK • Mengkritisi kebijakan dan Mengancam tarik dukungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan <i>musyarakah</i>... • Kebijakan-kebijakan tidak populis • Tidak dilibatkannya PKS dalam pengambilan keputusan mendasar yang berdampak besar

		<ul style="list-style-type: none"> • Batal menarik dukungan dan tetap berkoalisi 	<p>kepada rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sesuai dengan nota kesepahaman • Toleransi karena situasi bangsa masih dalam masa transisi
		<p><i>Pilkada</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pluralisme Politik 	<ul style="list-style-type: none"> • potensi dukungan masyarakat dan bagaiman kualitas figur yang diajukan saat harus berkoalisi • kesamaan platform kedaerahan • memelihara dan menjaga pluralisme bangsa

Pada tahun 1990-an gerakan Tarbiyah mulai nampakkan eksistensi kelompoknya dalam lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dua kesadaran penting. *Pertama*, kesadaran menyangkut apa yang harus dilakukan untuk dirinya, untuk memperbaiki mental, spiritual, akhlak dan keseluruhan dirinya. *Kedua*, muncul kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk entitas yang lebih luas.¹⁵ Selain itu, peluang politik yang mulai terbuka turut menjadi katalisatornya.

Di penghujung tahun 1990, PKS memasuki sistem (*inner*) politik negara berbarengan dengan transformasi kerakannya menjadi partai politik bernama Partai Keadilan. Namun hal ini tidak membuat gerakan Tarbiyah mematikan lembaga-lembaga yang dibentuknya sebelum kelahiran PK. Dalam periode ini PK mulai melibatkan diri dalam proses formal kenegaraan baik yang berkenaan dengan pembuatan kebijakan maupun pembuatan konstitusi negara.

Terbukanya peluang masuk dalam lingkaran kekuasaan pada Pemilu 2004 menjadikan PKS terlibat dalam proses kemenangan Pilpres yang akhirnya berdampak pada keterlibatan dalam pemerintahan. Namun tidak berarti koalisi ini berjalan lancar. Dengan prinsip sebagai mitra koalisi yang kritis dan konstruktif, PKS mengembangkan mekanisme kontrol yang seringkali menghasilkansikap politik yang bertolak belakang dengan pemerintah.

¹⁵ Damanik, *Op.cit*, hal. 150

V.2. Fator-faktor yang Mempengaruhi Bentuk-bentuk Praksis Politik PKS

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik politik PKS (sejak bernama Tarbiyah, PK kemudian PKS) dari periode ke periode selanjutnya dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah sistem nilai yang diyakini, visi—kepentingan politik, strategi perjuangan serta sumberdaya yang dimiliki dalam periode yang ada. Faktor kepentingan politik inilah yang disebut Esposito-Voll sebagai pendorong bagi kelompok revivalis untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang ada.¹⁶

Namun tetap tidak mengesampingkan pengaruh sistem nilai. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Sorensen bahwa prakondisi kedua dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah adanya sistem nilai dan keyakinan yang menjelaskan konteks dan makna dari tindakan politik.¹⁷ Namun Sorensen melakukan generalisasi yang salah saat dia menganggap Islam sebagai penghambat demokrasi. Ini generalisasi ini tidak dapat dilakukan terhadap PKS karena pemahaman Islam yang dimiliki PKS justru memotivasi keterlibatannya dalam demokratisasi di Indonesia. Terutama saat mendirikan partai politik. Mendirikan partai untuk para aktivis dakwah ini ada dalam kerangka mengembangkan komitmen dan meraih cita-cita dakwah itu dalam tahap lanjut.¹⁸

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah peluang yang ada dalam struktur politik dalam periodeisasi tersebut. Semakin kecilnya peluang yang ada maka semakin kecil aktifitas politis yang dilakuka. Sebaliknya, semakin

¹⁶ Esposito-Voll, *Op.cit*, hal.40

¹⁷ Sorensen, *Op.cit*, 42-46.

¹⁸ Damanik, *Op.cit*, hal. 221-222.

besar peluang politik yang ada maka PKS terlihat tidak pernah menyalahgunakan peluang itu untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sedangkan artikulasi kepentingan adalah suatu proses *peng-input-an* berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

19

Fungsi lainnya adalah pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah. Anggota partai mencapai persetujuan tentang tujuan-tujuan utama partai, dan sebelum itu mereka mempunyai kesempatan untuk memperdebatkan tujuan-tujuan tersebut.²⁰

Fungsi dukungan yang dijalankan oleh partai politik dilakukan dengan menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup sistem di mana partai tersebut beroperasi. Tidak ada partai yang dapat hidup untuk waktu yang lama tanpa adanya usaha menanamkan pola kepercayaan di kalangan rakyat yang bisa mendukungnya dan kelangsungan sistem politik secara keseluruhan.²¹

Suatu kompromi penting pada sebagian besar kasus demokratisasi barangkali adalah "tawar-menawar demokratis (*the democratic bargain*)", yakni penyeimbang antara partisipasi dengan pemoderatan. Secara implisit atau eksplisit dalam proses-proses perundingan yang mengarah ke demokratisasi, ruang lingkup partisipasi diperluas dan lebih banyak sosok politik dan kelompok memperoleh

¹⁹ Koirudin, *Op.cit*, hal.86.

²⁰ Macridis, *Op.cit*, hal. 28

²¹ *Ibid*, hal. 29

kesempatan berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan dan memenangkan kekuasaan berdasarkan kesepakatan yang implisit atau eksplisit bahwa mereka akan bersikap moderat dalam taktik dan kebijakan mereka.²²

V.3. Kesesuaian Bentuk Praktik Politik PKS dengan Prinsip dan Strategi Politik yang Dimilikinya.

Dalam kenyataannya ternyata perkembangan (konstalasi) politik mampu mengesampingkan strategi yang semula ditetapkan. Hal ini disebabkan peluang struktur politik yang terbuka dipandang sangat penting untuk dimanfaatkan. Hal ini terlihat dalam keputusan gerakan Tarbiyah untuk bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan yang memanfaatkan liberalisasi politik saat bergulirnya reformasi. Juga dapat dilihat saat PKS memutuskan terlibat dalam koalisi pemerintahan SBY-JK, padahal sebelumnya telah menyatakan berkonsentrasi dalam perjuangan di parlemen (DPR). Ini bersesuaian dengan prinsip dasar hubungan dan koalisi partai PKS yang menyatakan bahwa koalisi didasarkan pada tujuan merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa.

Ancaman dan kemudian batalnya penarikan dukungan PKS terhadap SBY-JK dapat disebut sebagai bentuk negosiasi yang menurut Sorensen memiliki motif agar memberikan akses atas pengaruh politik kepada PKS. Motif ini dimiliki oleh kelompok yang tidak memiliki hak-hak istimewa, yaitu mereka yang terhalang dari pengaruh politik.²³

²² *Ibid*, hal.217

²³ Sorensen, hal. 49

Korelasi antara bentuk praktik politik PKS dengan prinsip dan strategi politik yang dimiliki PKS terlihat dalam beberapa sikap penolakan PKS terhadap kebijakan yang dipandang tidak bersesuaian dengan keadilan sosial seperti menaikkan harga BBM dan impor beras. Langkah-langkah penegakan keadilan sosial ekonomi yang dilakukan oleh PKS menurut Dekmejian merupakan salah satu prinsip ideologis kalangan revivalis. Kembali pada jalan yang benar juga mensyaratkan penegakan keadilan sosial ekonomi.²⁴

Setelah menganalisa berbagai bentuk praksis politik, kita dapat menentukan kategori ideologi bagi PKS. Dengan menggunakan model kategori ideologi revivalis yang dibuat oleh Dekmejian, maka PKS tergolong dalam kelompok gradualis adaptasionis. Pola gerakan kelompok ini adalah mencoba bergerak pada skala yang besar dalam batas-batas legalitas seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena menyadari bahaya-bahaya yang menyertai konfrontasi revolusioner dengan para penguasa, gerakan-gerakan ini mengikuti kebijakan bertahap untuk mempertinggi kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat, sementara terus berupaya mendorong pelaksanaan syari'ah oleh negara. Dalam upaya mereka untuk menegakkan tatanan Islam pada akhirnya, kelompok-kelompok ini menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan untuk mengadaptasikan ideologi-ideologi dan program-program mereka dengan kondisi modern.

²⁴ Dekmejian, *Op.cit*, hal.15

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Politik adalah kompromi. Dan negara adalah ruang berkomprominya berbagai kepentingan warga negaranya. Oleh karena itulah semua warga negara tidak pernah bisa melepaskan diri dari sifat kompromis terhadap kepentingan warga negara lainnya.

Begitu juga dengan partai politik. Berinteraksinya sebuah partai politik dalam sistem politik sebuah negara mengharuskan mereka untuk dapat melakukan agregasi agar segala kepentingan yang dimiliki mampu dikompromikan secara proporsional.

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa,

Pertama, PKS masuk dalam kategori kelompok revivalis gradualis adaptasionis. Hal ini terlihat dari sikap kompromis yang dilakukannya baik terhadap kondisi objektif yang ada maupun terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa. Sikap kompromi ini bertujuan agar lembaga dan agenda-agenda politik yang ada dapat terus dijalankan tanpa ancaman. Oleh karena itu terdapat korelasi positif antara praksis politik PKS dan peluang politik yang ada.

Kedua, praktik politik PKS masih dapat dikatakan konsisten terhadap prinsip-prinsip kebijakan yang dimilikinya yaitu *Al-Syumuliyah, Al-Ishlah, Al-Syar'iyah, Al-Wasathiyah, Al-Istiqamah, Al-Numuw wa al-Tathawwur, Al-Tadarruj wa Al-Tawazun, Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah, Al-Hulul, Al-*

Mustaqbaliyah, Al-'Alamiyah. Namun begitu, dalam prakteknya strategi dan bentuk-bentuk artikulasinya menyesuaikan dengan kondisi dan peluang yang ada.

V.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh Penulis setelah melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian adalah,

Pertama, Fenomena praksis PKS hendaknya tetap dilihat sebagai fenomena artikulasi sebuah partai politik yang tidak dapat dilepaskan dari kompromi dan negosiasi.

Kedua, berbagai bentuk praksis politik PKS harus didasari oleh perencanaan yang matang terutama tentang dukungan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan agar PKS tidak terjebak dalam situasi sulit saat tidak mampu memenuhi tuntutan posisi politiknya.

Ketiga, Praksis politik PKS harus memperimbangkan opini publik agar kesan inkonsistensi dalam sikap—yang sebenarnya banyak dilakukan oleh partai-partai—tidak memperburuk apatisme politik masyarakat sekaligus memperburuk citra partai politik Islam dan dakwah—yang selama ini sering di sebutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Fachry, "Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia", dalam Nasrulloh Ali Fauzi, ICMI : *Antara Status Quo dan Demokratisasi*, dalam Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Batubara, Marwan, *Divestasi Indosat Kebusukan Sebuah Rezim*, Jakarta : Iluni, 2004
- Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah pengantar dalam Miriam Budiarjo (Peny.),Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Gramedia, 1982
- Black, James A dan Champion, Dean J., *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung : Eresco, 1992
- Bungin, Burhan, *Teknik-teknik Kualitatif dalam Penelitian Sosial dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : RT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Turbiyah di Indonesia*, Jakarta : Teraju, 2002
- Dekmejian, R. Hrair, *Kebangkitan Islam : Katalisator, Kategori dan Konsekuensi dalam Hunter, Shireen T., Politik Kebangkitan Islam (terj)*, jogjakarta: PT. Tiara Wacana, 2001
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan (terj)*, Yogyakarta : Bina Aksara, 1984
- Esposito, John L. dan Voll, John O, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999
- _____, *Islam Kontemporer: Reformasi atau Revolusi?*, Bandung: Mizan, 1995
- Fatah, Eep Saefulloh, *Bangsa Saya yang Menyebarkan Catatan tentang Kekuasaan yang Pongah*, PT. Renaja Rosdakarya Bandung, Bandung : 1998

- Furkon, Aay Muhamad, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Teraju, 2004
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan ketiga, 2002
- Greg Fealy dalam pengantar Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung : Harakatuna Publishing, 2005
- Harindja, Denny B.C., *Birokrasi Nan Pongah Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, Yogyakarta: 1999
- Haris, Syamsuddin, *Reformasi Setengah Hati*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997
- _____, dan Nelson, Joan M, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- Ismail, Nur Mahmudi, *Radikalisme dan Ekstrimisme Bukan Ajaran Islam* (wawancara) dalam Deliar Noer, *Mengapa Partai Islam. Mengapa Kalah*, Jakarta : ALVABET, 1999
- Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- M, M Alfian Alfian, *Eksperimen Islam Politik Jilid III*, dalam Deliar Noer (et.al), *Mengapa Partai Islam Kalah ?*, Jakarta: alvabet, 1999
- Machmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung : Harakatuna Publishing, 2005
- Macridis, Roy C., *Pengantar Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai*, dalam Ikhlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Yogyakarta : Tiara Wacana, edisi revisi 1996
- Marjono, Hartono, "*Fraksi Islam*" dan "*Poros Tengah*" dalam Deliar Noer (et.al.), *Mengapa Partai Islam Kalah ?*, Jakarta: ALVABET, 1999
- Mengapa Memilih PK Sejahtera*, Jakarta: M-PWC, cetakan ketiga, 2003

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1998
- O'Donnell Guillermo dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta : LP3ES, 1993
- Sekilas Partai Keadilan*, Diterbitkan oleh Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Smith, Donald Eugene, *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988
- Suharsono, *Cemerlangnya Poros Tengah*, Jakarta : Perenial Press, 1999
- Sujatmiko, Iwan Gardano dan Simanjuntak, Fritz E., *Legitimasi Pemerintahan Habibie dalam Selo Soemartjan (peny.)*, *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Urbaningrum, Anas, *Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999
- Wahono, Untung, *Penegakan Syari'at Islam dan Koalisi Islam Menjawab Tuduhan Terhadap PK Sejahtera*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003
- Yusuf, Saifullah dan Salim, Fahrudin, *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi*, Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 2000
- 15 Tokoh Bicara PK Sejahtera*, Jakarta : Pustaka Saksi, 2003

Surat kabar

- Aribowo, *Tiga Model Parpol yang Mengejutkan*, Jawa Pos, Senin, 26 April 2004.
- Liddle, R. William, *Islam, Nasionalis, dan Empati*, Harian Kompas, Kamis. 22 Juli 2004
- Pribadi. Airlangga, *PKS: Lintasan Baru Islam Politik dalam Republika*, 10 Juli 2004

Turmodzi, Didi, *Rekonfigurasi Politik Indonesia Dalam Pemilu 2004*, Pikiran Rakyat

Tamagola, Tamrin Amal, *Berpacu dalam Koalisi*, dalam Kompas, Kamis, 15 April 2004

Wahono, Untung, *Piagam Jakarta, PKS, dan Demokratisasi Referensi*, dalam Kompas, Selasa, 14 Desember 2004

Majalah

Saksi, No. 23 Tahun V, 26 Agustus 2003

Saksi, No. 7 Tahun VI, 4 Februari 2004

Saksi, No. 15 Tahun VI, 26 Mei 2004

Saksi, No. 16 Tahun VI, 9 Juni 2004

Saksi, No.21 Tahun VI, 18 Agustus 2004

Saksi, No. 5 Tahun VII, 8 Desember 2004

TEMPO edisi 28 Agustus - 3 September 2000

Situs

www.detik.com

www.gatra.com

www.kompas.com

www.pk-sejahtera.or.id